

EDISI
KEDUA

AUDITING

Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan

DR. DIEN NOVIANY RAHMATIKA, S.E., MM., AK., CA
EVA ANGRA YUNITA, S.E., M.ACC., AK.

tanah air
Beta

Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., MM., Ak., CA
Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc., Ak.

AUDITING

**DASAR - DASAR PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN**



Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)
Dien Noviany Rahmatika & Eva Anggra Yunita

Auditing. Dasar-dasar pemeriksaan laporan keuangan/
Dien Noviany Rahmatika & Eva Anggra Yunita ;
Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020.
176 hlm. ; 24 cm.

ISBN (Cetak) : 978-623-92876-8-9
ISBN (Elektronis/PDF) : 978-623-92876-9-6

1. Non Fiksi 2. Auditing I. Judul

Cetakan (Edisi) Kedua, Januari 2021

Penulis : Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., MM., Ak., CA
Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc., Ak.

Penyelaras Aksara : Moh. Taufik, S. AP, MM, MH
Kurnianto

Penata Letak : Mktb

Ilustrasi Sampul : Mktb

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh dan/atau sebagian isi buku ini dalam media apapun, baik digital maupun tercetak tanpa izin tertulis penerbit.

Diterbitkan Pertama Kali dalam bahasa Indonesia oleh:

Penerbit Tanah Air Beta

Jl. Jogja-Wates Km. 10, Pedes RT 04, Argomulyo
Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753
T: (0274) 6498157
E: tanahairbeta99@yahoo.co.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas terbitnya buku *Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan* ini.

Buku ini ditulis dengan tujuan sebagai dasar acuan mengenai pemeriksaan akuntan dalam memeriksa laporan keuangan, baik secara teori maupun contoh kasus pemeriksaan. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen dan peneliti yang sedang meneliti auditing dan akuntansi.

Isi dari buku ini menjelaskan dasar pemeriksaan akuntansi/ auditing terdiri dari tigabelas bab dimulai dari konsep dasar auditing sampai jenis audit EDP. Dalam buku ini penulis berusaha memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang bekerja baik Kantor Akuntan Publik, Internal dan Pemerintah. Penulis juga berusaha memberikan gambaran mengenai kertas kerja yang akan digunakan auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Penulis mengucapkan kepada banyak pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan buku ini. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan.

Terakhir, buku ini tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Agustus 2020

Penulis

PERSEMBAHAN KEPADA

Dien Noviany Rahmatika

Keluarga Benteng Takeshi

Tatag Koes Adianto

Allefka Kautsar Devandra

Fabian Haidar Abhinaya

Eva Anggra Yunita

Suamiku, Aprizal Muhammad Al Muttaqien

Anak-anakku, Khalifa dan Kamila

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	x
BAB I	
KONSEP DASAR AUDITING DAN PROFESI	
AKUNTAN PUBLIK	1
A. Konsep Dasar Auditing	1
B. Perbedaan Siklus Auditing dan Siklus Akuntansi	4
C. Klasifikasi Audit	5
D. Tipe Auditor	9
E. Profesi Akuntan Publik	9
F. Hirarki Kantor Akuntan Publik	10
G. Jasa Kantor Akuntan Publik	11
H. <i>Peer Review</i>	12
ISTILAH-ISTILAH PENTING	13
CONTOH SOAL.	13
BAB II	
ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK	14
A. Etika Profesi	14
B. Kode Etik Akuntan Indonesia	18
ISTILAH-ISTILAH PENTING	23
CONTOH SOAL	23

BAB III	
KONSEP DASAR DAN STANDAR AUDITING	24
A. Filosofi Auditing	24
B. Standar Auditing	27
ISITILAH-ISTILAH PENTING	29
CONTOH SOAL	29
BAB IV	
SISTEM PENGENDALIAN INTERN	30
A. Definisi dan Komponen Pengendalian Intern	30
B. Arti Penting Pengendalian Intern	31
C. Peran dan Tanggung Jawab	32
D. Komponen Pengendalian Intern	33
E. Dokumentasi Dari Pemahaman SPI	40
ISTILAH-ISTILAH PENTING	44
CONTOH SOAL	44
BAB V	
LAPORAN AUDIT	45
A. Pentingnya Audit Laporan Keuangan	45
B. Laporan Audit	46
C. Jenis Pendapat Akuntan	46
D. Kemampuan Entitas dalam Menjaga Kelangsungan Usahanya	55
E. Tahapan Audit Laporan Keuangan	55
ISTILAH-ISTILAH PENTING	57
CONTOH SOAL	57
BAB VI	
BUKTI AUDIT	58
A. Sifat Bukti Audit	58
B. Kecukupan Bukti	61
C. Kompetensi Bukti	61
D. Prosedur Audit	62

Daftar Isi

E. Klasifikasi Prosedur Auditing	64
ISTILAH-ISTILAH PENTING	65
CONTOH SOAL	65
BAB VII	
KERTAS KERJA AUDIT	66
A. Definisi Kertas Kerja	66
B. Manfaat Kertas Kerja	66
C. Pembuatan Kertas Kerja	67
D. Susunan Kertas kerja	70
E. Kepemilikan, Kerahasiaan dan Penyimpanan Kertas Kerja	76
ISTILAH-ISTILAH PENTING	77
CONTOH SOAL	77
BAB VIII	
MATERIALITAS DAN RESIKO AUDIT	78
A. Materialitas	78
B. Risiko Audit	83
C. Strategi Audit Awal	88
ISTILAH-ISTILAH PENTING	90
CONTOH SOAL	90
BAB IX	
PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALITIS	91
A. Perencanaan Audit Awal dan Manfaatnya	92
B. Langkah-langkah Dalam Kegiatan Perencanaan Audit	92
C. Prosedur Analitis	97
D. Jenis Prosedur Analitis	98
ISTILAH-ISTILAH PENTING	104
CONTOH SOAL	104

BAB X	
PENGUJIAN PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANSIF	106
A. Pengujian Pengendalian	106
B. Tipe Pengujian Pengendalian	107
C. Prosedur Pelaksanaan Pengujian Pengendalian	107
D. Lingkup Pengujian Pengendalian	108
E. Penentuan Risiko Pengendalian	108
F. Pengujian Substansif	110
G. Prosedur Pelaksanaan Pengujian Substansif	111
H. Sifat Pengujian Substansif	112
I. Pengujian Atas Transaksi	112
J. Penentuan Saat Pelaksanaan Pengujian Substansif	116
K. Luas Pengujian Substansif	117
ISTILAH-ISTILAH PENTING	118
CONTOH SOAL	118
BAB XI	
SAMPLING AUDIT	119
A. Tahapan <i>Sampling</i> Audit	120
B. Sampling Audit Statistik dan Non Statistik	121
C. <i>Sampling</i> dan Risiko Audit	124
D. Jenis <i>Statistical Sampling</i>	125
E. Risiko <i>Sampling</i>	126
F. Teknik <i>Sampling</i> Statistik	127
ISTILAH-ISTILAH PENTING	132
CONTOH SOAL	132
BAB XII	
FRAUD AUDITING	133
A. Gambaran Umum <i>Fraud</i>	133
B. Tipologi <i>Fraud</i>	135
C. Jenis-Jenis <i>Fraud</i>	138
D. Faktor-Faktor Pemicu <i>Fraud</i>	139

Daftar Isi

E. Pendeteksian <i>Fraud</i>	141
F. Penangan <i>Fraud</i>	144
ISTILAH-ISTILAH PENTING	147
CONTOH SOAL	147
BAB XIII	
AUDITING EDP	148
A. Definsi Auditing EDP	148
B. Kelebihan dan Kelemahan Sistem EDP Dibanding Sistem Manual	149
C. Pengendalian Intern Pada Sistem EDP	149
D. Penerapan Standar Auditing Pada Sistem EDP	150
E. Pemahaman Struktur Pengendalian Intern	150
F. Menentukan Risiko Pengendalian	151
G. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	151
H. <i>Auditing Around The Computer</i>	153
I. <i>Software Audit and Generalized Audit Software</i>	153
J. <i>Commercial Generak-Use Software</i>	154
K. Audit Komputer	155
L. Tahap-Tahap Audit Sistem Informasi	158
M. Metodologi Audit IT	159
ISTILAH-ISTILAH PENTING	161
CONTOH SOAL	161
Daftar Pustaka	162
Profil Penulis	165

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Perbedaan Siklus Akuntansi dan Siklus Auditing	5
Gambar 3.1	Hirarki Standar Auditing	28
Gambar 4.1	Simbol-Simbol Bagan Arus	40
Gambar 4.2	Bagan Alir Proses Audit	43
Gambar 5.1	Laporan Audit Bentuk Baku	53
Gambar 5.2	Contoh Laporan Audit Bentuk Baku	54
Gambar 7.1	Contoh Kertas Kerja	69
Gambar 7.2	Contoh Simbol Pemeriksaan (<i>Tick Mark</i>)	70
Gambar 7.3	Contoh <i>Working Balance Sheet</i> – Aktiva	72
Gambar 7.4	Contoh <i>Working Balance Sheet</i> – Passiva	73
Gambar 7.5	Contoh <i>Working Profit and Loss</i> – Rincian	74
Gambar 7.6	Contoh Mutasi <i>Working Profit and Loss</i>	75
Gambar 10.1	Hubungan Risiko–Risiko Audit dengan Sifat, Saat dan Luas Pengujian Subtansif	116
Gambar 12.1	<i>Fraud Tree</i>	137
Gambar 12.2	<i>Fraud Pentagon Theory</i>	139

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perbedaan Jenis Audit	8
Tabel 4.1	Hubungan Antar Komponen Pengendalian Internal	36
Tabel 4.2	Kuisisioner Pengendalian Internal Secara Umum	41
Tabel 5.1	Ringkasan Kondisi Opini	52
Tabel 6.1	Prosedur dan Bukti Analitis	63
Tabel 10.1	Contoh Langkah Pengujian Pengendalian	109
Tabel 10.2	Hubungan Risiko Deteksi dengan Pengujian Detail Saldo	116
Tabel 11.1	Tipe Sampling Audit	122
Tabel 12.1	Praktek Kecurangan dan Dalih Berdasarkan Sistem	142
Tabel 12.4	Penangan Kasus	144



BAB I

KONSEP DASAR AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

A. Konsep Dasar Auditing

Secara etimologi kata auditing bermula pada pertengahan abad ke-19 berbahasa Latin “*audere*” mengartikan “mendengar”. Sedangkan orang yang memeriksa laporan keuangan tersebut disebut “auditor”. Pada umumnya, publik mengasumsikan auditing (pemeriksaan akuntan) terdiri dari rangkaian prosedur, metode dan teknik. Auditing tidak lebih luas dari suatu cara untuk melaksanakan pemeriksaan dengan penjelasan, uraian, rekonsiliasi, dan argumentasi. Dalam perkembangannya, auditing menjadi hal yang penting bagi perusahaan dalam hal jaminan kebenaran dan kewajaran atas laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Auditing menjadi ilmu yang dipakai untuk proses pemeriksaan laporan keuangan dan kewajaran laporan keuangan.

Beberapa pengertian auditing oleh para ahli antara lain:

1. **Konrath (2002:5)** mendefinisikan auditing sebagai:
"Suatu proses sistimatis baik secara objektif dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meningkatkan keterkaitan antara asersi dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".
2. **Alvin A. Arens, Mark S. Beasley (2003 :11)**
"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".
3. **Soekrisno Agus (2017)**
"Auditing ialah suatu pemeriksaan yang dapat dilakukan baik secara kritis dan sistimatis, oleh pihak independen, atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".
4. **ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concept)**
"Auditing yaitu proses yang sistematis dalam menghimpun dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi mencakup berbagai tindakan dan kejadian ekonomi dalam upaya menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan"

Dari beberapa definisi Audit yang disebutkan di atas, terdapat beberapa elemen yang wajib diperhatikan dalam melaksanakan audit (Halim, 2018) yaitu:

1. **Proses sistematis**, yaitu auditing melakukan pemeriksaan yang dimulai dari siklus auditing sampai laporan keuangan dan bukti transaksi, yang bersifat logis terstruktur dan terorganisir.
2. **Evaluasi bukti secara sistematis**, yaitu auditor menghimpun bukti dan mengevaluasi bukti yang diperoleh. Bukti berupa Laporan Keuangan, terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus

Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan-catatan pembukuan terdiri dari buku harian (Buku Kas/Bank, Buku Penjualan, Buku Pembelian, Buku Serba Serbi), buku besar, sub buku besar (Piutang, Utang, Aktiva Tetap, Kartu Persediaan). Bukti juga berupa bukti pendukung antara lain bukti penerimaan dan pengeluaran kas/bank, faktur penjualan, journal voucher dan lain-lain.

3. **Asersi untuk berbagai tindakan dan kejadian ekonomi.** Asersi adalah pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggungjawab atas pernyataan tersebut. Dalam audit laporan keuangan historis, asersi adalah pernyataan manajemen melalui laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum,
4. **Menentukan tingkat kesesuaian (*degree of correspondence*),** berarti pengevaluasian bukti untuk menentukan dekat tidaknya asersi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
5. **Kriteria yang ditentukan,** yakni kriteria berupa prinsip akuntansi berterima umum dan aturan spesifik seperti anggaran dan ukuran kinerja lainnya.
6. **Menyampaikan Hasilnya,** berarti hasilnya dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengindikasikan antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan.
7. **Para pemakai yang berkepentingan,** dapat meliputi investor, calon investor di pasar modal, pemegang saham, manajemen dan publik.

Dari beberapa definisi para ahli diatas (Arens, 2003 dan Konrath, 2002) tujuan audit dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kelengkapan (*completeness*), berarti semua transaksi dicatat atau ada pada jurnal secara aktual telah dimasukkan.
2. Ketepatan (*accuracy*), berarti transaksi dan saldo diperkirakan telah dicatat berdasarkan jumlah, perhitungan, klasifikasi, serta pencatatan dengan benar dan tepat.
3. Eksistensi (*existence*), berarti seluruh harta dan kewajiban tercatat memiliki eksistensi maupun keterjadian pada suatu tanggal, sehingga transaksi tercatat tersebut wajib benar terjadi dan tidak fiktif.

4. Penilaian (*valuation*), bererti prinsip akuntansi yang berterima umum sudah diterapkan dengan benar.
5. Klasifikasi (*classification*), berarti transaksi dicantumkan pada jurnal dan diklasifikasikan secara tepat. Jika tentang saldo maka angka yang dimasukkan didaftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6. Ketepatan (*accuracy*), bererti semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun disesuaikan dengan angka buku besar. Serta penjumlahan saldo telah dilakukan dengan tepat.
7. Pisah Batas (*cut-off*), berarti transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Pisah batas meminimalisir kasus transaksi salah saji yang sering dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi.
8. Pengungkapan (*disclosure*), berarti saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berhubungan sudah disajikan secara wajar pada laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

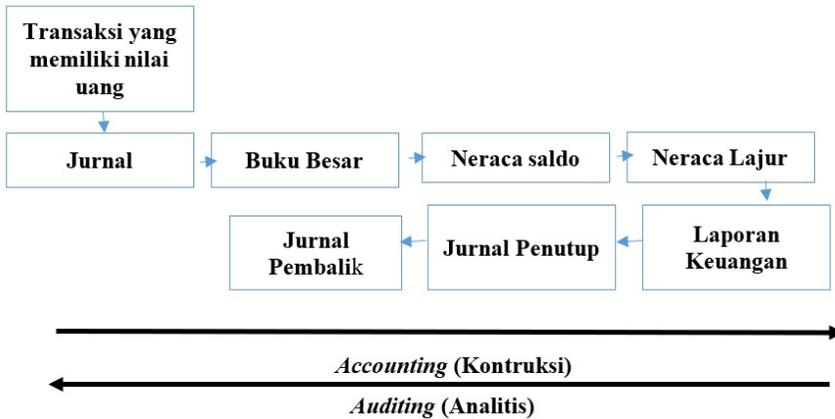
B. Perbedaan Siklus Auditing dan Siklus Akuntansi

Akuntansi mencakup semua kegiatan yang dimulai dari mengidentifikasi bukti dan transaksi, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan dibuatnya ringkasan/ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses sejalan dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU). Tujuan akhir akuntansi yakni komunikasi data yang andal dan relevan, sehingga dapat digunakan oleh pengambilan keputusan. Tanggung jawab akhir laporan keuangan adalah terletak pada manajemen perusahaan atau pemerintah. Accounting mempunyai sifat konstrutif, karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukan, buku besar dan buku besar pembantu masing-masing akun, neraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.

Auditing mempunyai **sifat analitis**, hal ini disebabkan akuntan publik memulai rangkaian pemeriksaannya dari angka-angka pada laporan keuangan, dilanjut dengan pencocokan neraca saldo (*trial balance*), buku besar (*general ledger*), buku harian (*special journals*), bukti-bukti pembukuan (*documents*) dan sub buku besar (*sub-ledger*).

Auditing dilakukan oleh akuntan publik (khususnya *financial audit*) dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Aturan Etika IAI Kompartemen Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu.

Audit laporan keuangan mencakup pemahaman bisnis dan industri klien serta mendapatkan dan menilai bukti laporan keuangan, sehingga auditor dapat meneliti apakah laporan keuangan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Auditor bertanggung jawab penuh dalam menjalankan Standar Auditing Yang Diterima Umum (*Generally Accepted Auditing Standard/GAAS*), melakukan penyesuaian bukti, serta menerbitkan laporan keuangan yang berisi kesimpulan auditor dalam bentuk pendapat (opini) atas laporan keuangan.



Gambar 1.1 Perbedaan Siklus Akuntansi dan Siklus Auditing

C. Klasifikasi Audit

Menurut Boynton, et al (2006) ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. *Financial Statement Audit* (Audit Laporan Keuangan)

Suatu pemeriksaan yang mencakup evaluasi bukti mengenai laporan keuangan entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat laporan yang disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh prinsip akuntansi yang diterima umum (PABU).

2. *Operational Audit (Audit Operasional)*

Adalah suatu tindakan pemeriksaan kegiatan perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang ditentukan oleh manajemen, dengan tujuan mengetahui kebijakan telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis (3E)

Penggolongan audit prosedur menurut Sukrisno Agus (2017) yang dilakukan mencakup:

- *Analytical review procedures*, yaitu membandingkan laporan keuangan antara periode berjalan dan periode yang lalu, budget dengan realisasinya serta analisa ratio (misalnya menghitung ratio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, dan membandingkannya dengan rasio industri)
- *Evaluasi atas management control system* perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian manajemen dan pengendalian intern (*internal control*) yang memadai dalam perusahaan, dalam upaya menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayainya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.
- *Compliance Test (Pengujian Ketaatan)*. Untuk menilai keefektifitasan dari suatu pengendalian intern dan suatu sistem pengendalian manajemen melalui pemeriksaan secara sampling dari bukti pembukuan, sehingga mengetahui transaksi bisnis dan pencatatan akuntansinya telah sesuai dilakukan dengan kebijakan yang ditentukan manajemen perusahaan.

Tahapan dalam suatu management audit terdiri atas:

- a. *Preliminary Survey* (Survei Pendahuluan)
- b. *Review and Testing of Management Control System* (Penelaahan dan Pengujian Atas Sistem Pengendalian Manajemen)
Biasanya digunakan *management control questionnaires* (ICQ), *flowchart* dan penjelasan narrative serta dilakukan pengesanan atas beberapa transaksi (*walk through the documents*).
- c. *Detailed Examination* (Pengujian Terinci)

Meliputi pemeriksaan transaksi perusahaan dapat mengetahui proses pencatatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini auditor wajib melakukan observasi pada kegiatan fungsi-fungsi yang terdapat diperusahaan.

d. *Report Development* (Pengembangan Laporan).

Dalam penyusunan laporan pemeriksaan, auditor berisi *audit findings* (temukan pemeriksaan) mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap standard yang berlaku sehingga menimbulkan inefisiensi, inefektifitas dan ketidakhematan (pemborosan) dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen (*management control system*) yang terdapat diperusahaan. Selain itu auditor juga memberikan saran-saran perbaikan.

3. ***Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan)**

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui perusahaan mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, sesuai yang telah ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak extern (pemerintah, Bap-epam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

4. ***Internal Audit* (Pemeriksaan Internal)**

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, ataupun ketaatan pada kebijakan manajemen yang ditentukan.

5. **Computer Audit**

Pemeriksaan ini dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) System oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya.

Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor:

- a. *Audit around the Computer*. Auditor hanya melakukan pemeriksaan *input* dan *output* dari *EDP System* tanpa melaksanakan tes terhadap proses dalam *EDP System* tersebut.
- b. *Audit through the Computer*. Selain melakukan pemeriksaan input dan output, Auditor juga melakukan pengetesan proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software* dan memasukkan *dummy* data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. KAP harus mempunyai *Computer Audit Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

Tabel 1.1
Perbedaan Jenis Audit.

Tipe Audit	Sifat Asersi	Kriteria yang ditetapkan	Sifat Laporan Auditor
Audit Laporan Keuangan (financial statement audit)	Data Laporan Keuangan	Prinsip akuntansi yg berterima umum	Pendapat atas kewajaran laporan keuangan
Audit Kepatuhan	Kepatuhan terhadap kebijakan perundang undangan	Kebijakan manajemen, hukum, persyaratan dll	Ringkasan temuan atau keyakinan tentang kepatuhan
Audit operasional	Data operasional atau kinerja	Menetapkan tujuan	Efisiensi dan efektivitas yang diamati, rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan

Sumber : Halim (2018)

D. Tipe Auditor

Auditor yang bertugas mengaudit entitas pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor Independen adalah tipe auditor yang bekerja di Kantor Akuntan publik dengan memberi jasa pada klien. Klien tersebut meliputi perusahaan bisnis, organisasi nirlaba, badan pemerintahan, koperasi, dan entitas lainnya. Disamping itu auditor dapat memberikan jasanya seperti penyusunan laporan keuangan, konsultan pajak, konsultan manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan jasa lainnya. Secara umum, entitas mengharapkan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan. Auditor independen biasanya pemegang sertifikat *Certified Public Accountant (CPA)*.

2. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang dipekerjakan pada masing-masing perusahaan untuk melaksanakan audit bagi manajemen. Tujuan audit internal dalam perusahaan adalah membantu manajemen dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Auditor internal biasanya pemegang sertifikat *Certified Internal Auditor (CIA)*.

3. Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah merupakan auditor yang bekerja di instansi pemerintah. Tugas utamanya mencakup pengauditan atas laporan keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintahan. Auditor pemerintahan biasanya bekerja didalam BPK, BPKP, inspektorat dan Kantor Pajak.

E. Profesi Akuntan Publik

Perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Badan usaha yang didirikan berdasarkan undang undang ini salah satunya adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Syarat menjadi akuntan publik menurut UU No 5 Tahun 2011 pasal 6 yaitu;

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
2. Berpengalaman praktik memberikan jasa
3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;
6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan Tidak berada dalam pengampunan.

Profesi akuntan publik wajib memiliki register akuntan yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan RI sebagaimana pasal 3 ayat 4 Undang-Undang No 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan.

F. Hirarki Kantor Akuntan Publik

Hirarki staf organisasi dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) pada umumnya adalah:

1. **Partner**, adalah auditor yang bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan audit.
2. **Manager**, merupakan auditor yang berhubungan dengan klien, mengawasi terhadap jalannya tugas audit, melakukan *review* atas pekerjaan audit dan fee audit.
3. **Senior Akuntan**, adalah staf yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan bertanggungjawab atas pekerjaan auditor junior
4. **Junior Akuntan**, merupakan staff pelaksana yang bertanggungjawab atas pekerjaan lapangan.

Kantor-kantor Akuntan Publik didunia didominasi oleh “The Big Four”. Empat perusahaan akuntan publik terbesar di Amerika Serikat dikenal dengan sebutan perusahaan akuntan Publik Internasional. Keempat perusahaan ini memiliki kantor-kantor di seluruh AS dan di banyak kota lainnya di seluruh dunia. Perusahaan

akuntan publik *The Big Four* mengaudit hampir semua perusahaan terbesar baik yang ada di AS maupun di seluruh dunia, serta mengaudit pula banyak perusahaan yang berskala lebih kecil. KAP yang disebut Big Four antara lain **Deloitte, Price Waterhouse Coopers, Ernst and Young**, dan **KPMG**. Keempat KAP ini mempunyai partner lokal Indonesia. Sebelum dikenalnya sebutan *Big Four*, ada sebutan *Big Five*—plus **Arthur Andersen** yang telah bangkrut akibat skandal Enron pada 2002. Sang Big Four inilah yang kini menguasai pasar besar.

G. Jasa Kantor Akuntan Publik

Pelayanan Assurance ialah professional independent atau pelayanan yang meningkatkan kualitas suatu informasi untuk penentuan keputusan. Jasa yang bisa diberikan oleh KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua; yaitu Jasa atestasi dan Jasa non Atestasi.

1. Jasa Atestasi

Atestasi adalah salah satu jenis jasa assurance yang disediakan kantor akuntan publik, dimana nantinya akuntan publik akan menerbitkan laporan tertulis yang berupa suatu kesimpulan terkait kepercayaan asersi (pernyataan yang menyebutkan sesuatu itu benar yang dibuat oleh pihak lain).

Ada empat jasa atestasi yang dapat diberikan kepada kantor akuntan publik, yaitu:

a. Audit Laporan Keuangan Historis

Audit ini merupakan bentuk jasa atestasi yang mana si auditor menerbitkan laporan tertulis berisi pendapat atau opininya mengenai apakah laporan keuangan historis tersebut telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

b. Pemeriksaan (*examination*)

Pemeriksaan merupakan bentuk jasa yang memberikan pendapat terhadap asersi suatu pihak yang sesuai kriteria ditentukan. Contoh jasa examination adalah keyakinan atas pemeriksaan laporan proyeksi bisnis suatu entitas atau laporan keuangan prospektif, pemeriksaan pengendalian internal.

c. Penelaahan (*Review*)

Review adalah jasa pengkajian ulang dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan perusahaan. Jasa *review* biasanya tersaji dalam laporan interim perusahaan. Outputnya adalah “tidak perlu modifikasi yang material.....” sebagai pengganti “telah disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum”

d. Prosedur yang telah disepakati (*Agreed upon review*)

Jasa ini diberikan oleh auditor dengan hasil akhir ringkasan temuan, keyakinan negatif atau keduanya. Jasa ini diberikan dengan melakukan kesepakatan atas prosedur elemen tertentu dalam laporan keuangan.

2. Jasa Non Atestasi

Jasa non atestasi adalah jenis jasa yang bisa diberikan oleh auditor seperti jasa akuntansi, pajak dan jasa konsultasi manajemen. Jasa *Assurance* lainnya, diantaranya adalah:

- a. Penilaian resiko yang berhubungan dengan investasi dan derivatif.
- b. Penilaian risiko pengumpulan, penyimpanan informasi digital.
- c. Penilaian risiko penipuan (*fraud*) dan tindakan ilegal.
- d. Penilaian kesesuaian kebijakan dan prosedur operasional perusahaan.
- e. Pemenuhan perjanjian royalti .
- f. Sertifikat ISO 9000.
- g. Audit lingkungan.

H. *Peer Review*

Kantor Akuntan Publik akan dievaluasi dan ditelaah untuk melihat apakah suatu Kantor Akuntan Publik telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu sebagaimana disyaratkan dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) no.20 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pelaksanaan *peer review* dilakukan minimal 1 kali dalam setiap tiga tahun.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Audire*/Auditor
- Pemeriksaan Akuntan
- Objektif, Kritis dan Sistematis
- Elemen Pelaksanaan Audit
- Tujuan Audit
- Siklus Auditing dan Akuntansi
- Jenis Audit
- Tipe Auditor
- Etika Profesi
- Jasa Atestasi
- Jasa Non Atestasi
- KAP
- *Peer Review*

CONTOH SOAL

1. Sebutkan definisi auditing (pemeriksaan akuntan) dilihat dari berbagai pendapat!
2. Apa perbedaan antara auditing dengan akuntansi. Jelaskan!
3. Sebutkan beberapa jenis pemeriksaan dan berikan penjelasannya!
4. Jelaskan apa yang disebut dengan *Peer Review*?
5. “Umumnya laporan keuangan yang menjadi objek pemeriksaan akuntan publik meliputi laporan laba rugi dan neraca saja”. Setujukah Saudara atas pernyataan tersebut? Jelaskan!



BAB II

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK

A. Etika Profesi

Etika, moral, etos, dan etiket pada komunikasi keseharian dianggap sesuai maknanya, padahal tidak semua istilah ini sama. Dalam pengertian sempitnya, etika bermakna dengan makna moral, yakni sebuah adat istiadat atau disebut kebiasaan. Namun, etika dapat juga dipandang sebagai suatu bidang ilmu filsafat atau ilmu yang mempelajari tentang adat istiadat atau kebiasaan. (Bartens, 2001)

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai rangkaian prinsip atau nilai-nilai moral untuk beberapa kelompok profesi. Perilaku yang disertai dengan etika harus dilakukan agar di dalam kehidupan bermasyarakat dapat berjalan secara teratur. Kita dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan salah satu jenis perilaku yang dapat mengeratkan kehidupan bermasyarakat.

Di bidang pemeriksaan akuntansi, pekerjaan ini membutuhkan kejujuran yang sangat besar dan komitmen moral yang sangat tinggi. Masyarakat sangat menuntut adanya auditor publik yang sangat menjunjung nilai etika profesional. Itulah mengapa profesi auditor perlu menetapkan standar teknis dan pedoman beretika yang wajib dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan.

Berikut adalah enam nilai dasar etika perilaku oleh Josephson Institute:

1. Keterpercayaan (*trustworthiness*) yakni meliputi kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran dalam menuntut hak untuk menyampaikan kenyataan yang sebenarnya. Integritas dapat diartikan bahwa seseorang dalam bertindak harus sesuai dengan kata hati nuraninya, di dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Reliabilitas berarti melaksanakan segala upaya yang pantas dalam memenuhi komitmennya. Loyalitas adalah tindakan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya dalam mengembangkan dan melindungi berbagai macam kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu.
2. Penghargaan (*respect*) meliputi gagasan-gagasan seperti etika kesopanan (*civility*), harga diri, toleransi, dan penerimaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) hal ini berarti adanya tindakan untuk bertanggung jawab atas tindakan seseorang dan melakukan pengendalian diri.
4. Kesepadan (*fairness*) dan keadilan meliputi isu-isu tentang kesejajaran, sikap independensi, proporsionalitas, keterbukaan, dan perlindungan hukum.
5. Perhatian (*caring*) berarti secara sungguh-sungguh dalam memperhatikan tingkat kesejahteraan sesamanya termasuk tindakan yang selalu memperhatikan kepentingan sesama dan menunjukkan perbuatan baik.
6. Kewarganegaraan (*citizenship*) yang termasuk kedalam nilai kewarganegaraan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara agar proses dalam bermasyarakat dapat berjalan dengan baik, kewajiban dalam bernegara dapat berupa melakukan

pemungutan suara, bertindak sebagai juri pengadilan di AS, serta melindungi sumber daya yang ada.

Kode Etik Profesi AICPA menjadi dasar dalam menentukan perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus yang mengatur tentang perilaku yang semestinya dilakukan. Kode etik profesi akuntan berdasarkan AICPA ini terdiri dari empat bagian, yakni:

1. Prinsip-prinsip Etika

Prinsip-prinsip etika yang dimaksudkan antara lain:

- a. **Tanggung Jawab.** Dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai profesional, para pihak harus mempunyai kepekaan yang tinggi serta memiliki pertimbangan sikap yang selaras dengan moral bangsa.
- b. **Kepentingan Publik.** Para pihak wajib mengemban kewajiban untuk bertindak dengan sebaik mungkin agar dapat melayani kepentingan publik secara baik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalismenya.
- c. **Integritas.** Dalam mempertahankan dan memperluas keyakinan publik, para pihak harus dapat menunjukkan semua tanggung jawab keprofesionalannya dengan tingkat integritas yang tinggi.
- d. **Obyektivitas dan Independensi.** Semua pihak harus mempertahankan obyektivitasnya dan memiliki sikap independensi dalam melaksanakan tanggungjawab profesionalnya. Para pihak yang sedang melakukan praktek terhadap publik harus berada di dalam posisi yang independen baik dalam penampilan maupun kondisi kenyataannya ketika menyediakan jasa audit maupun jasa atestasi lainnya.
- e. **Due Care.** Seorang anggota harus selalu memperhatikan pedoman teknik dan etika profesi, selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa yang diberikannya, serta menjalankan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya.
- f. **Lingkup dan Sifat Jasa.** Para pihak dalam melaksanakan praktek terhadap publik harus memperhatikan prinsip-

prinsip yang ada pada kode etik profesi untuk menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

2. Peraturan Etika

Peraturan etika diterapkan bagi seluruh akuntan publik atas semua jasa yang telah disediakan baik pada saat anggota tersebut melakukan praktek maupun tidak melakukan praktek, kecuali jika dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Setiap peraturan perlu diterapkan pada pelayanan jasa-jasa attestasi, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Di Indonesia, aturan etika harus ditetapkan oleh para anggota Ikatan Akuntan Indonesia Komptemen Akuntan Publik (IAI- KAP). Pimpinan KAP bertanggungjawab terhadap peraturan yang mengatur tentang etika yang ditaati oleh anggota KAP.

3. Interpretasi dan peraturan etika

Kebutuhan terhadap adanya interpretasi peraturan etika yang dipublikasikan akan timbul ketika terdapat berbagai macam pertanyaan dari para praktisi. Setiap interpretasi berdasarkan pada adanya konsensus komite yang terdiri atas anggota utama dari para praktisi akuntan publik. Sebelum disahkan, interpretasi tersebut dikirimkan terlebih dahulu kepada sejumlah individu kunci dalam profesi untuk diminta masukkannya.

4. Kaidah etika

Kaidah merupakan sebuah rangkaian penjelasan yang dilakukan oleh komite eksekutif terhadap divisi etika profesional menyangkut situasi spesifik nyata (*Specific Factual Circumstances*). Banyak kaidah etika yang dipublikasikan kedalam bentuk yang lengkap Kode Etik Profesional AICPA. Peraturan etika yang terdapat di dalam Kode Etik Profesi AICPA harus diterapkan bagi seluruh anggota AICPA atas semua jasa yang telah mereka sediakan baik pada saat anggota tersebut berpraktek maupun tidak berpraktek sebagai akuntan Publik, kecuali jika dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut.

B. Kode Etik Akuntan Indonesia

Di Indonesia, etika profesional mencakup standar sikap anggota profesi yang dirancang praktis, realistis dan idealis (Halim, 2018). Dalam mukadimah Kode etik IAI disebutkan bahwa ..."Prinsip etika profesi dalam kode etik ikatan akuntan indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan, Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya".

Kode etik Akuntan Indonesia diatur dalam Rumusan Kode Etik dan diatur dalam Pernyataan Etika profesi Akuntan Indonesia. Yang mencangkup Prinsip Etika, Aturan Etika, Interpretasi Dam Tanya Jawab. Rerangka kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, secara garis besar mencakup.

1. Prinsip Etika

Kode Etik Akuntan Indonesia mengatur delapan prinsip etika yang terdiri:

- a. Tanggung Jawab Profesi
- b. Kepentingan Publik
- c. Integritas
- d. Obyektifitas
- e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- f. Kerahasiaan
- g. Perilaku Profesional
- h. Standar Teknis

2. Aturan Etika

Aturan etika memuat aturan yang mengikat semua anggota kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan ini mengatur antara lain:

a. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Seorang auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independensinya sebagaimana yang telah diatur di dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Sikap mental independensi tersebut harus meliputi unsur independen di

dalam fakta (*in fact*) maupun di dalam penampilan (*in appearance*). Interpretasi atas peraturan ini melarang para anggotanya untuk memiliki saham atau investasi langsung lainnya terhadap klien audit, hal ini dikarenakan dapat berpotensi untuk merusak independensi seorang auditor.

Pada saat melaksanakan tugasnya, para anggota KAP harus dapat mempertahankan integritas dan objektivitas, dengan terbebas dari adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) terjadi sehingga dapat mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Anggota staf audit juga tidak diperbolehkan untuk menyerahkan hasil penilaian mereka kepada penyelia yang memiliki posisi lebih rendah atas penugasan audit terhadapnya. Staf Auditor harus bertanggungjawab atas penilaian mereka yang akan didokumentasikan di dalam arsip audit.

b. Standar dan Prinsip Akuntansi

Para anggota KAP wajib untuk selalu berpedoman teguh pada standar umum akuntansi beserta interpretasi yang dikeluarkan dan disahkan oleh IAI. (Halim, 2018). Standar Umum tersebut yaitu:

- 1) **Kompetensi Profesional.** Anggota KAP harus secara layak (*reasonable*) dalam memberikan jasa profesionalnya dan harus diselesaikan melalui kompetensi profesional.
- 2) **Kecermatan dan Keseksamaan Profesional.** Anggota KAP dalam memberikan jasa profesionalnya wajib dilaksanakan dengan penuh ketelitian dan keseksamaan yang professional.
- 3) **Perencanaan dan Supervisi.** Para anggota KAP harus membuat perencanaan sebelum memberikan jasa profesionalnya dan mensupervisi setiap melakukan pelayanan jasa professional dengan cara yang memadai.
- 4) **Data yang Relevan.** Anggota KAP wajib mendapatkan dan mengumpulkan data yang relevan serta sesuai un-

tuk dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam memberikan kesimpulan atau rekomendasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jasa profesionalnya.

Anggota KAP dalam melaksanakan tugas profesional wajib mematuhi standar dan prinsip akuntansi yang telah dibentuk dan disahkan oleh IAI. Ada 2 (dua) unsur yang wajib diperhatikan oleh anggota KAP, diantaranya adalah:

- 1) Tidak diperkenankan memberikan penegasan atau pendapat bahwa laporan keuangan beserta data keuangan lainnya yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
- 2) Tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan bahwa tidak perlu adanya modifikasi material terhadap adanya laporan keuangan agar dapat sesuai dengan prinsip akuntansi jika laporan keuangan tersebut ditemukan adanya suatu penyimpangan atau kesalahan yang berdampak pada keseluruhan material dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

c. Tanggung Jawab Kepada Klien

1) Kerahasiaan Informasi Klien

Anggota KAP dilarang mengungkapkan atau memberikan informasi milik klien yang dianggap rahasia kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari klien.

2) Fee Profesional

a) Besaran Fee

Anggota KAP memberikan besarnya *fee* bervariasi dan ditentukan sesuai pada risiko penugasan, kompleksitasnya jasa, dan tingkat kemampuan (*skills*) seebagai penyelesaian pekerjaan tersebut. Pada saat proses mencari klien baru, anggota KAP dilarang menawarkan *fee* yang dapat merusak harga diri seorang profesi akuntan publik.

b) *Fee Kontinjen*

Fee kontinjen merupakan *fee* yang disepakati untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tertentu. Besaran *fee* akan dibebankan kepada klien, kecuali apabila terdapat temuan khusus yang disesuaikan dengan besaran jumlahnya. Anggota KAP dilarang untuk meminta *fee* kontinjen jika dapat berdampak pada kurangnya sikap independensi dari KAP.

d. **Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi**

Tanggung jawab kepada rekan seprofesi, artinya setiap anggota wajib menjaga citra profesi, dengan tidak melakukan perbuatan atau perilaku yang bisa mengancam reputasi rekan seprofesi.

e. **Tanggung Jawab dan Praktik Lain**

1) **Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan**

Anggota wajib menjaga tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang dapat mendiskreditkan dan mencemarkan profesinya.

2) **Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran lainnya**

Anggota KAP dalam memperkenalkan dan memasarkan jasa akuntan publik kepada klien diperbolehkan melalui pemasangan iklan atau melakukan promosi lainnya sepanjang iklan tersebut tidak dipergunakan untuk merendahkan citra profesi.

3) **Komisi dan *Fee Referral***

a) **Komisi**

Komisi merupakan imbalan yang diterima dari klien sebagai bentuk hasil dari perikatan yang terjadi antar para pihak. Komisi dapat berbentuk uang dan/atau barang yang lainnya.

b) ***Fee Referral* (Rujukan)**

Fee Referral (rujukan) merupakan hadiah/imbalan baik yang diterima/dibayarkan antar sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.

4) Bentuk Organisasi dan KAP

Anggota dapat mendirikan kantor praktek akuntan publik yang berbentuk organisasi yang telah mendapatkan payung hukum dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta tidak ditujukan untuk menyesatkan dan merendahkan citra profesi akuntan publik.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Etika Profesi
- Prinsip Etika
- Kaidah Etika
- Kode Etik
- Integritas
- Obyektivitas
- Independensi
- Fee Profesional
- Fee Kontinjen
- Fee Referral
- Komisi

CONTOH SOAL

1. Mengapa diperlukan aturan etika dalam profesi akuntansi?
2. Jelaskan aturan etika dalam kode etik IAI!
3. Jelaskan prinsip-prinsip etika yang ada di AICPA atau di Indonesia!
4. Jelaskan standar pelaporan yang menjadi pedoman untuk auditor dalam menyusun laporan audit!
5. Dengan adanya beberapa kasus kecurangan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik dengan kliennya, mengakibatkan perusahaan kurang percaya dengan komitmen auditor terhadap kode etik profesinya. Bagaimana menurut pendapat saudara? Mengapa demikian?



BAB III

KONSEP DASAR DAN STANDAR AUDITING

A. Filosofi Auditing

Suatu teori yang terbentuk sebagai penerangan fenomena hasil observasi nyata. Keberadaan adanya teori dapat menimbulkan suatu masalah, disebabkan teori ini memiliki keterbatasan. Teori juga dapat menentukan definitif, terbuka yang didebatkan dan didiskusikan.

R. K. Mautz dan H. A. Sharaf, dalam bukunya menyebutkan "*the philosophy of auditing*", merupakan tokoh pertama yang melakukan usaha tersebut, buku diterbitkan tahun 1993. Pada tahun 1978 CW. Shcandl mengembangkan suatu pemikiran yang berasal dari Maoutz dan Sharaf, yakni mengemukakan elemen dasar teori sebagai berikut:

1. **Postulat** yakni konsep dasar yang wajib diterima tanpa adanya pembuktian. Berdasarkan definisi ini, Mautz dan Sharaf (1993) atas bukunya "The Philosophy of Auditing" membagi delapan tentatif postulat auditing:
 - a. **Asersi atau Objek Audit Harus Verifiable atau Auditabile.** Verifikasi ataupun audit diperlukan agar memperoleh keyakinan terkait kewajaran asersi laporan maupun objek dari audit. Nilai akuisisi suatu aset, laba, tagihan, pajak, kinerja dibayar, menaati peraturan, maupun tingkat pengangguran, sebagai contoh, praktisnya diuji sehingga memenuhi asumsi pertama auditing
 - b. **Memiliki Hubungan Netral dan Tidak Mempunyai Konflik dengan Objek Audit.** Netral ini dimaksudkan memuat kepentingan akan ekonomis dan adanya hubungan personal, olehnya seorang auditor dipercayai mampu memberi jaminan (*assurance*) dalam kesimpulannya asersi yang diaudit.
 - c. **Asersi adalah Bebas dari Kekeliruan Sampai Proses Pembuktian Menunjukkan Sebaliknya.** Auditor wajib melakukan asersi akan diuji dalam sajian layak. Maka, tindakan auditor dianggap bias jikalau menyimpulkan suatu penyimpangan ataupun kekeliruan terjadi sebelum dilakukannya pembuktian. Auditor juga tidak diperbolehkan gegabah dalam membuat kesimpulan tertentu sebelum melakukan proses pengujian selesai. Auditor diwajibkan mengambil sikap kehati-hatian (*prudent*) untuk upaya penetapan simpulan audit sesudah mendapatkan bukti yang diperoleh memadai.
 - d. **Sistem Pengendalian Internal yang Berjalan dengan Semestinya.** Pada audit keuangan semisalnya, suatu sistem pengendalian internal dievaluasi untuk pemetaan risiko beragam. Auditor perlu juga mengambil tindakan serupa melalui asumsi ayat ketiga, yaitu menyatakan sistem atas pengendalian internal efektif hingga hasil dan proses pembuktian dilaksanakan oleh auditor pada fakta sebaliknya.
 - e. **Konsistensi penyajian Laporan keuangan.** Standar, kriteria, ketentuan, atau *benchmark* sedang berlaku dapat digunakan menilai kewajaran asersi. Tetapi, sebelum adanya hasil penilaian maupun pemeriksaan didapatkan, auditor setidaknya bera-

da diposisi netral yang semua ukuran atau standar ideal sudah usahakan konsisten, kecuali auditing yang menunjukkan hasil sebaliknya. Tanpa mengasumsikan, pekerjaannya yang bias, dan cenderung pretensius dalam penyimpangan.

- f. **Dalam hal bukti tidak jelas atau bertentangan, maka apa yang dianggap benar dalam laporan keuangan yang diperiksa akan dianggap benar dan masa sekarang.**
 - g. **Pemeriksaan dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, auditor harus bersifat jujur.** Fungsi auditing bagi auditor meliputi otoritas suatu profesi yang privilese dari masyarakat, termasuk didalamnya pemakai langsung dari hasil auditing. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan auditor dalam melangsungkan fungsi auditing semestinya baik secara implisit penugasan auditing. Dengan demikian postulat mempunyai penekanan sisi lain bahwasanya auditor semestinya mempertahankan dan membina kemampuan profesionalnya baik pengetahuan yang cukup ataupun pengembangan diri secara kontinyu.
 - h. **Status profesional dari seorang independen auditor menekankan tanggung jawab profesional.**
2. **Teori** yaitu dalil yang diterangkan oleh postulat.
 3. **Struktur** yaitu komponen disiplin tertentu dan hubungan antara komponen tersebut.
 4. **Prinsip**, yaitu kaidah-kaidah yang diterapkan dalam praktek.
 5. **Standar**, yaitu kualitas yang ditetapkan dalam hubungannya dengan praktek.

Menurut Mautz dan Sharaf (1993), teori auditing tersusun atas lima konsep dasar yaitu

1. Bukti (*evidence*)
2. Kehati hatian dalam pemeriksaan (*due audit care*)
3. Penyajian dan pengungkapan yang wajar (*fair presentation*)
4. Independensi (*independence*)
5. Etika perilaku (*ethical conduct*)

B. Standar Auditing

Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan saat pelaksanaan dan penyusunan laporan audit.

Berikut ini adalah Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Auditing diatur dalam PSA No. 01 (SA Sakti 150) yang meliputi sepuluh (10) standar yang dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok besar, yaitu:

1. Standar Umum

- a. Audit wajib dilakukan oleh satu atau lebih orang yang memiliki pelatihan dan keahlian cukup sebagai auditor.
- b. Semua hal yang berkaitan pada independensi dan perikatan memuat sikap mental harus dipertahankan bagi auditor.
- c. Saat pelaksanaan dan penyusunan laporan auditnya, auditor harus memakai kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.

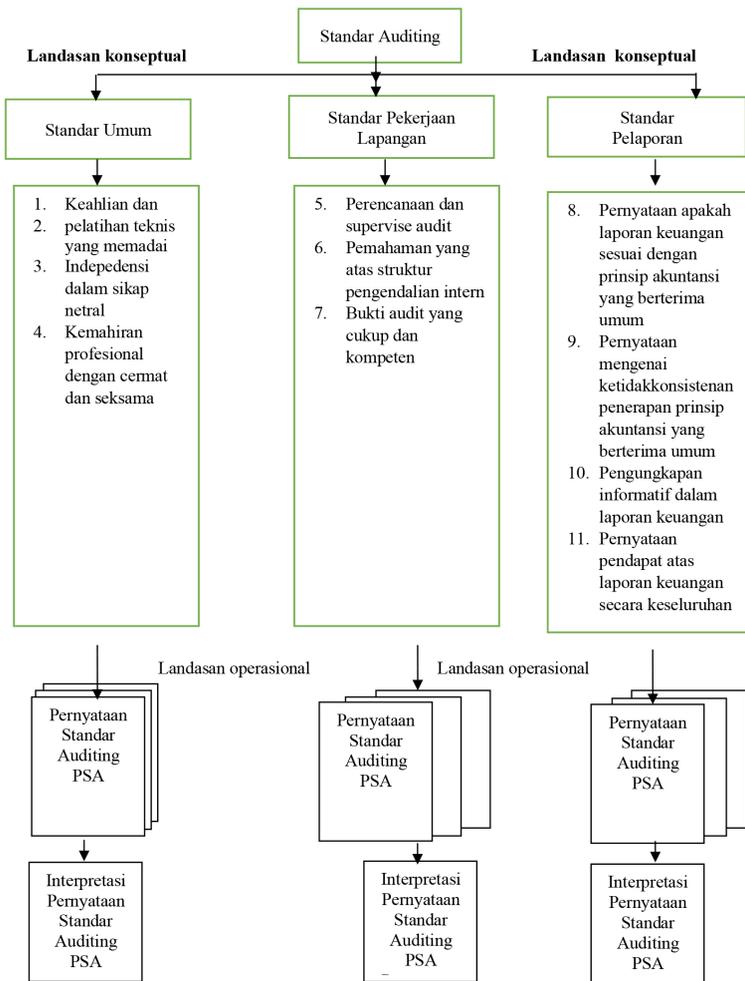
2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan direncanakan kehati-hatian dan jika diperlukan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman memadai dalam pengendalian intern harus diolah untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, lingkup dan saat pengujian yang dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten cukup diperoleh mengikuti inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai landasan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
- b. Laporan auditor harus menunjukkan adanya tidak konsisten (jika ada) penerapan prinsip akuntansi pada tahap penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibanding penerapan prinsip akuntansi dalam periode lalu.

- c. Pengungkapkan informatif laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor berisikan suatu pernyataan pendapat tentang laporan keuangan baik secara keseluruhan atau asersi pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan atas laporan keuangan, olehnya laporan auditor memuat petunjuk yang jelas terkait sifat dan tanggungjawab auditor (IAI, 2001 : 150. 1 & 150. 2)



Gambar 3.1. Hirarki Standar Auditing.

Sumber: SPAP (h.001.12)

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Philosophy of Auditing*
- Postulat
- Asersi
- Objek Audit
- *Auditable*
- *Verifiable*
- Hirarki Standar Auditing
- Pernyataan Standar Audit

CONTOH SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan *the philosophy of auditing*?
2. Bagaimana hubungan antara konsep dasar dengan standar auditing?
3. Menurut anda hal-hal apa sajakah yang menjadi inti untuk selalu diperhatikan oleh auditor?
4. Elemen apa sajakah yang terkandung dalam hirarki standar auditing? Jelaskan!
5. Jelaskan perbedaan antara standar auditing, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan!



BAB IV

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Definisi dan Komponen Pengendalian Intern

Pada tahun 1990-an penyebutan yang digunakan dalam sistem pengendalian internal adalah sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Namun pada Tahun 2001, IAI meresmikan dengan sebutan sistem pengendalian internal. Standar Pekerjaan Lapangan kedua dari standar auditing menjelaskan: pemahaman pengendalian intern yang memperoleh perencanaan audit dalam penentuan sifat, waktu, dan luasnya pelaksanaan pengujian-pengujian.

Pengendalian Intern (internal control) yakni proses yang dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, manajemen dan personel lain ntuk menyediakan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efesiensi, dan efektivitas operasi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. (Standar Profesional Akuntan Publik 2013 SA 315 Par 4(c))

Dari definisi diatas Sistem Pengendalian internal mencakup beberapa kebijakan dan prosedur sistematis, antara lain:

- a) Keandalan laporan keuangan
- b) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
- c) Kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992 juga mengembangkan sebuah model untuk mengevaluasi pengendalian internal. Model tersebut telah diadaptasi sebagai kerangka pengendalian internal berlaku umum dan diakui sebagai standar definitif, di mana organisasi harus mengukur efektivitas system pengendalian internalnya.

B. Arti Penting Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah salah satu bagian utama pengelolaan organisasi. Pengendalian intern terdiri dari rencana, metode, dan prosedur untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung untuk mencapai visi, misi, tujuan dan kinerja. Adapun faktor-faktor pentingnya pengendalian intern yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan lingkup bisnis emiten yang sudah menjadi kompleks dan luasnya penyebaran sehingga manajemen bergantung atas sejumlah laporan dan analisis untuk mengendalikan operasi efektif.
2. Pengujian dan penelaahan yang terdapat di sistem pengendalian intern baik yang menyediakan perlindungan pada kelemahan manusia dan juga mengurangi adanya kemungkinan ketidakberesan dan kekeliruan.
3. Tidak praktis untuk seorang auditor melaksanakan audit pada perusahaan dengan pembatasan biaya ekonomi tanpa mengganggukan sistim pengendalian intern klien.

Terdapat tiga konsep yang menjadi dasar dalam penilaian struktur pengendalian intern dan penetapan resiko pengendalian yaitu:

1. **Tanggung jawab manajemen.** Manajemen bukan seorang auditor yang dapat menetapkan pelaksanaan pengendalian konsisten dan memiliki tanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan selaras dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
2. **Keyakinan memadai.** Peningkatan struktur pengendalian intern dengan melalui pertimbangan biaya dan manfaat, wajib dapat memberikan sebuah keyakinan yang memadai bukan sebuah keyakinan yang absolute bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar.
3. **Keterbatasan bawaan.** Struktur pengendalian intern tidak dapat dinyatakan efektif, meskipun telah diiringi dengan kehati-hatian pada perancangan dan pelaksanaannya. Bahkan, meskipun pegawai sistem dapat merancang sebuah sistem yang ideal, namun efektivitasnya tergantung kepada kompetensi dan ketergantungan seseorang yang menggunakan sistem tersebut.

C. Peran dan Tanggung Jawab

1. **Manajemen.** Tanggung jawab manajemen dalam menciptakan pengendalian intern yang efektif.
2. **Dewan direksi** dan komite audit. Sebagaimana dimaksudkan anggota dewan harus menentukan manajemen untuk tanggung jawabnya membentuk dan menjaga pengendalian intern. Komite audit harus berwaspada saat mengidentifikasi adanya keberadaan penolakan manajemen terhadap pengendalian pelaporan keuangan yang curang, dan mengambil tindakan yang diperlukan.
3. **Auditor internal.** Auditor internal harus melakukan pemeriksaan dan evaluasi cakupan pengendalian intern suatu entitas baik secara periodik dan rekomendasi perbaikan, namun mereka tidak memiliki pertanggung jawaban utama atas menciptakan dan memelihara pengendalian intern.
4. **Personel entitas lainnya.** Peran dan tanggung jawab bagi personel lain dalam menyediakan suatu informasi maupun penggunaan informasi atas tanggung jawab pengkomunikasian masalah yang tak sesuai dengan pengendalian tindakan dalam melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi.

5. **Auditor independen.** Sebagai hasil dari rangkaian prosedur audit laporan keuangan, auditor eksternal mungkin dapat menemukan kelemahan terhadap pengendalian intern yang dikomunikasikan pada manajemen, komite audit, atau dewan direksi, bersama rekomendasi perbaikan.
6. **Pihak eksternal lainnya.** Pencipta aturan yang menetapkan persyaratan minimum kaitannya dengan pengadaan pengendalian intern bagi entitas tertentu. Contohnya *Foreign Corrupt Act* tahun 1977 dan *Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act* tahun 1991.

D. Komponen Pengendalian Intern

Komponen pengendalian intern diturunkan dari cara manajemen menjalankan kegiatan organisasi dan bagian integral dalam proses manajemen. Tahun 1990, COSO mengeluarkan laporan Kerangka Integral Pengendalian Intern, Konsep ini kemudian dikembangkan menjadi konsep pemahaman auditor terhadap pengendalian klien, dan diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik 2013, SA 315. Pengendalian intern ini terdiri dari lima komponen saling berkaitan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Memutuskan suatu bentuk organisasi dalam memengaruhi tingkat kesadaran pengendalian. Bagian pengendalian ini yakni pondasi bagi seluruh komponen pengendalian intern yang menyediakan kedisiplinan dan terstruktur. Berikut cakupan lingkungan pengendalian:

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

2. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analaisi terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar penentuan bagaimana resiko dikelola. Berikut ini keadaan yang dapat mengubah risiko:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
 - b. Personel baru
 - c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki
 - d. Teknologi baru
 - e. Lini produk, produk, atau aktivitas baru
 - f. Restrukturisasi korporasi
 - g. Operasi luar negeri
 - h. Standar akuntansi baru
- 3. Aktivitas pengendalian**

Aktivitas pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin arahan manajemen yang dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai macam tujuan yang diterapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas ini memungkinkan relevan dengan audit yang digolongkan sebagai prosedur dan kebijakan berkaitan dengan hal berikut:

- a. *Review* terhadap kinerja
 - b. Pengolahan informasi
 - c. Pengendalian fisik
 - d. Pemisahan tugas
- 4. Informasi dan komunikasi**

Informasi dan komunikasi ialah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan seseorang melakukan tanggungjawab mereka. Sistem informasi yang bersifat relevan ini bertujuan untuk pelaporan keuangan, memuat sistem akuntansi, terdiri atas metode dan catatan yang dibuat sebagai pencatatan, pengolahan, peringkasan, dan pelaporan transaksi entitas (baik kondisi maupun peristiwa) dan juga digunakan untuk menjaga akuntabilitas aktiva, hutang dan ekuitas yang berhubungan. Mutu suatu informasi yang telah dihasilkan dari sistem tersebut dapat berdampak pada kemampuan manajemen dalam membuat sebuah keputusan yang semestinya untuk mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan sebuah laporan keuangan yang handal. Yang harus diketahui oleh auditor:

- a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang penting bagi laporan keuangan

- b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai
- c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang meliputi pengolahan dan pelaporan transaksi
- d. Pengolahan akuntansi yang meliputi dimulainya transaksi sampai dengan dimasukkannya transaksi tersebut ke dalam laporan keuangan,

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan sebuah proses dimana penentuan kualitas kinerja pengendalian intern dilakukan sepanjang waktu. Berbagai entitas baik auditor intern atau personal yang tengah melaksanakan pekerjaan yang serupa memberikan perannya dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup penggunaan sebuah informasi dari komunikasi dengan pihak luar seperti keluhan kustomer.

Tabel 4.1
Hubungan Antar Komponen Pengendalian Intern.

Komponen	Uraian relatif terhadap laporan keuangan	Faktor kunci	Faktor teknologi informasi yang penting
Lingkungan Pengendalian	Menetapkan suasana untuk suatu organisasi; mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang di dalam organisasi, merupakan fondasi untuk semua komponen pengendalian intern lainnya.	Faktor lingkungan pengendalian: <ul style="list-style-type: none"> - Integritas dan nilai etika. - Komitmen terhadap kompetensi. - Dewan direksi dan komite audit. - Filosofi dan gaya operasi manajemen. - Struktur organisasi. - Penetapan wewenang dan tanggung jawab. - Kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan manajemen dalam menetapkan kebijakan untuk membangun, memodifikasi, dan menggunakan program komputer dan data. • Bentuk struktur organisasi dan pemrosesan data. • Metode penempatan otoritas dan tanggung jawab terhadap pendokumentasian sistem komputer, termasuk prosedur untuk mengotorisasi transaksi dan menyetujui perubahan sistem.

<p>Penilaian Risiko</p>	<p>Identifikasi entitas, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP</p>	<p>Proses harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hubungan risiko dari asersi laporan keuangan spesifik dan aktivitas pencatatan, pemrosesan, penjumlahan, dan pelaporan data keuangan. - Kejadian dan situasi intern dan eksternal. - Pertimbangan khusus mengenai perubahan dalam situasi. Serupa dengan perkiraan auditor mengenai risiko yang melekat. 	<p>Penilaian Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jejak transaksi dapat tersedia hanya untuk periode waktu yang pendek. - Bukti dokumentasi yang dikurangi mengenai kinerja pengendalian. - File dan catatan biasanya tidak dapat dibaca tanpa sebuah komputer. - Keterlibatan manusia yang menurun dalam pemrosesan komputer dapat mengaburkan kekeliruan yang mungkin dapat diamati dalam sistem manual. - Sistem teknologi informasi rentan terhadap bencana fisik, manipulasi yang tidak diotorisasi, dan kerusakan mekanis. - Sistem teknologi informasi dapat mengurangi pwwmisahan tugas tradisional.
-------------------------	--	--	--

<p>- Pembahasan dalam sistem lebih sulit untuk diimplementasikan dan dikendalikan.</p> <p>- Transaksi dapat dimulai oleh komputer.</p> <p>- Jejak audit dapat dalam bentuk elektronik.</p> <p>- Bagaimana data dikonservasi dari dokumen sumber ke dalam bentuk mesin.</p> <p>- Keterlibatan pemrosesan komputer mulai dari dimulainya transaksi hingga dimasukkan dalam laporan keuangan.</p> <p>- Keterlibatan komputer dalam melaporkan proses yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan</p>	<p>Fokus sistem akuntansi adalah pada transaksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem akuntansi yang efektif seharusnya menghasilkan penangan transaksi dengan suatu cara yang mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen. - Sistem seharusnya menyediakannya suatu jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap. Termasuk manual kebijakan, bagan akur, dan memorandum. 	<p>Sistem informasi termasuk sistem akuntansi dan terdiri dari metode dan catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, menyatakan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dari memelihara akuntabilitas untuk aktif dan kewajiban yang berbungan; komunikasi meliputi menyediakan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern terhadap laporan keuangan.</p>	<p>Informasi dan Komunikasi</p>
<p>- Pengendalian umum: pengendalian organisasi dan operasi.</p> <p>- Pengendalian pengem-</p>	<p>Kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemisahan tugas - Pengendalian pemrosesan informasi 	<p>Kebijakan dan prosedur yang memantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan-</p>	<p>Aktivitas Pengendalian</p>

Sistem Pengendalian Intern

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian umum. - Pengendalian aplikasi. - Pengendalian fisik. - Peninjauan performansi 	<p>bangan sistem dan Pendokumentasian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak sistem. - Pengendalian akses. - Pengendalian data dan prosedur
<p>Pemantauan</p>	<p>Diproses oleh personel yang tepat yang diperkirakan kualitas pengendalian intern sepanjang waktu; termasuk memperkirakan dan merancang, apakah telah beroperasi seperti yang dimaksudkan, dan apakah telah dimodifikasi secara sesuai untuk perubahan kondisi.</p>	<p>Dapat muncul melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas yang berkelanjutan - Evaluasi periode yang terpisah. <p>Dapat meliputi masukan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber intern seperti manajemen dan audit internal. - Sumber eksternal seperti konsumen, pemasok, pembuat aturan, dan auditor eksternal. 	<p>Pengendalian aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masukan - Pemrosesan - Keluaran <p>Teknologi informasi dapat dimonitor dengan cara yang sama dengan pengendalian intern lainnya</p>

Disarikan dari berbagai sumber, 2020.

E. Dokumentasi Dari Pemahaman SPI

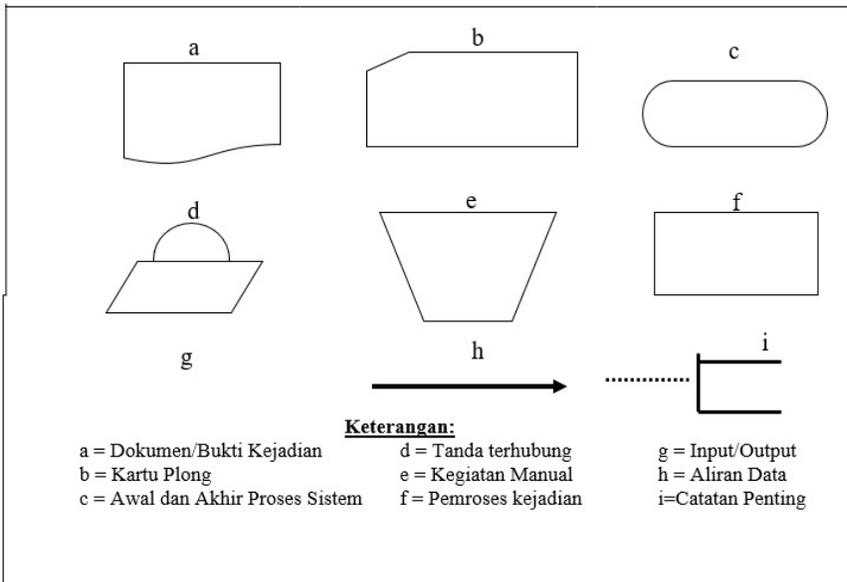
Tiga metode yang digunakan untuk mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian intern adalah dalam bentuk:

1. Deskripsi naratif

Narasi deskripsi yakni deskripsi yang tertulis dari struktur pengendalian intern klien. Penggunaan deskripsi naratif sudah lazim untuk struktur pengendalian intern karena sederhana dan mudah dijelaskan. Kerugiannya adalah sulit untuk menggambarkan rincian struktur pengendalian intern dengan jelas dan dengan kalimat yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi.

2. Bagan Arus

Bagan arus adalah penggambaran simbol, diagram atas dokumen klien dan urutan arus pada organisasi. Bagan arus menguntungkan terutama karena dapat memberikan tinjauan sekilas yang tepat atas sistem klien yang bermanfaat sebagai perangkat analitis auditor dalam evaluasi.



Gambar 4.1. Simbol-Simbol Bagan Arus.

3. Kuesioner pengendalian intern

Menanyakan salah satu rangkaian pertanyaan terkait pengendalian tiap bidang audit, termasuk lingkungan pengendalian untuk alat auditor dalam mengindikasikan aspek-aspek struktur pengendalian intern yang tidak memadai. Keuntungan utama pendekatan kuesioner adalah relatif lengkap cakupan setiap bidang audit yang menempuh instrumen yang baik serta dapat disiapkan relatif lebih cepat pada saat permulaan penugasan audit. Kerugian utama adalah bahwa bagian-bagian individual dari sistem klien diperiksa tanpa memberikan tinjauan menyeluruh.

Klien:..... Dikerjakan Oleh: Tgl:.....
Tgl. Lap. Keu: Di-review Oleh: Tgl.:

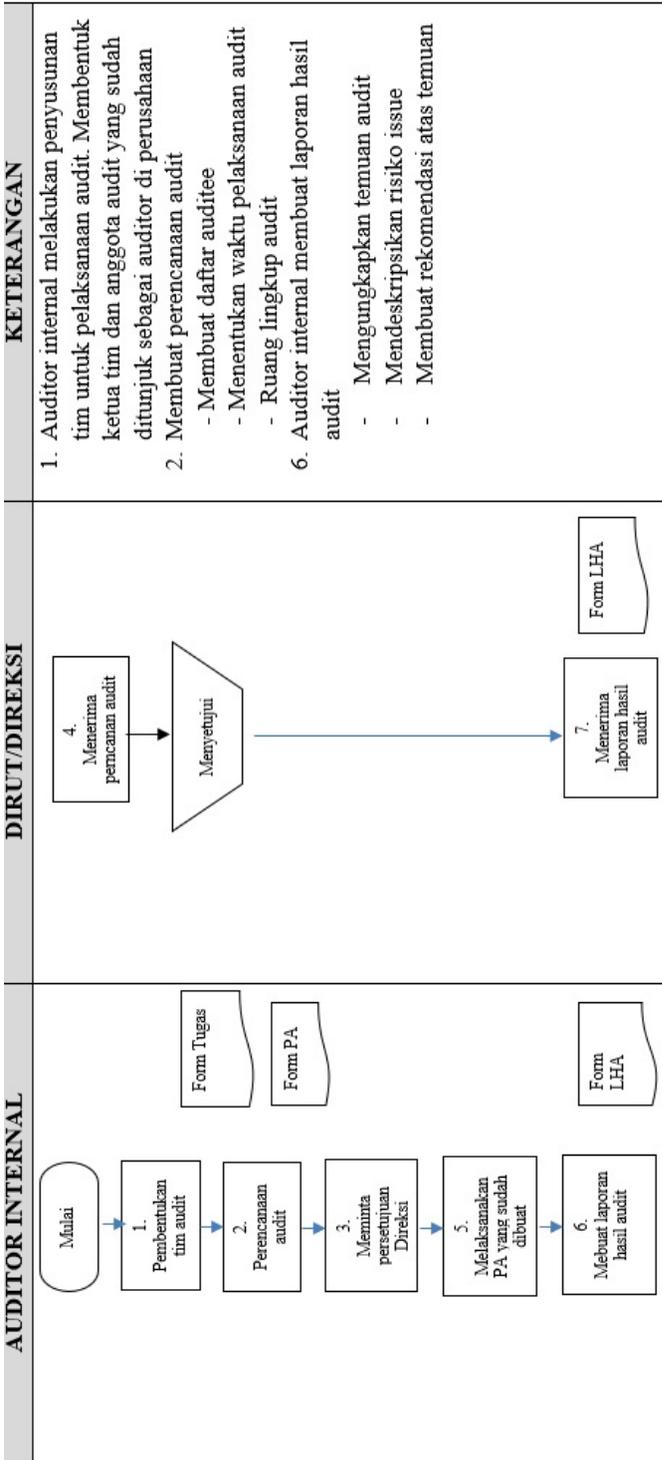
Tabel 4.2.
Kuisisioner Pengendalian Internal Secara Umum.

No	Pertanyaan	Y	T	TR
STRUKTUR ORGANISASI				
1	Apakah struktur organisasi tampak jelas ?	x		
2	Apakah terdapat penjelasan pembagian tugas masing-masing bagian?	x		
3	Apakah terdapat internal audit? Bila Ya: 3.1 Apakah jumlah anggota internal audit mencukupi? 3.2 Apakah SOP pemeriksaannya sudah jelas? 3.3 Apakah tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah dijalankan? 3.4 Apakah mempunyai perencanaan audit tahunan dan kertas kerja? 3.5 Apakah internal audit memberikan dampak perbaikan yang signifikan?	x		
4	Apakah dewan direksi melakukan rapat terjadi dengan semua elemen ?		x	

AUDITING - Dasar-Dasar Pemeriksaan Laporan Keuangan

AKUNTANSI				
1	Apakah tenaga untuk bagian akuntansi : 1.1 berkompeten ? 1.2 Jumlahnya memadai? 1.3 Ada persyaratan yang jelas untuk bagian akuntansi?	x x	x	
2	Apakah terdapat buku harian untuk pengelolaan kas?	x		
3	Apakah pencocokan kas fisik dengan data dilakukan setiap hari?	x		
4	Apakah penjurnalan dilakukan menggunakan aplikasi akuntansi?	x		
5	Apakah ada validasi setiap melakukan penjurnalan?	x		
6	Apakah laporan keuangan internal cukup memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan?	x		
DOKUMENTASI				
1	Apakah dokumentasi terdapat nomor transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan?	x		
2	Apakah setiap dokumen dilakukan verifikasi?	x		
3	Apakah dokumen-dokumen tertata dan tersimpan dengan rapi pada tempat pengarsipan?	x		
	Keterangan: Y = Ya T = Tidak TR = Tidak Relevan			

Contoh Bagan Alir Proses Perencanaan Audit Internal



Gambar 4.2. Bagan Alir Proses Audit.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Internal Control*
- Struktur Pengendalian Intern
- Konsep Dasar
- Lingkungan pengendalian'
- Penaksiran Risiko
- Aktivitas Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- *Monitoring*
- *Document*

CONTOH SOAL

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal? Dan seberapa pentingkah pengendalian internal dalam sebuah perusahaan? Jelaskan!
2. Bagaimanakah konsep dasar dalam sistem pengendalian internal?
3. Bagaimana hubungan antara masing-masing komponen dalam pengendalian internal?
4. Buatlah contoh bagan alir untuk proses pengeluaran kas!
5. Bagaimanakah mendokumentasikan sistem pengendalian internal?



BAB V

LAPORAN AUDIT

A. Pentingnya Audit Laporan Keuangan

Menurut Halim (2018), Laporan keuangan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, karena beberapa alasan:

1. **Perbedaan Kepentingan**, Manajemen mempunyai kepentingan untuk mempertahankan jabatannya, sehingga akan memperlihatkan kinerjanya baik. Di lain sisi, para pengguna laporan keuangan memiliki berbagai macam kepentingan yang berbeda-beda terhadap pelaporan keuangan perusahaan.
2. **Konsekuensi**, para pengguna laporan keuangan menghendaki agar pengungkapan (*disclosure*) yang memadai. Para pengguna laporan keuangan juga mengandalkan auditor untuk menyusun laporan selaras dengan Prinsip Akuntansi yang Bersifat Umum (PABU).

3. **Kompleksitas**, Pengembangan kompleksitas dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko kekeliruan dalam menginterpretasikan dan menyajikan laporan keuangan.
4. **Keterbatasan akses (*remoteness*)**, Para pengguna laporan keuangan biasanya mengalami keterbatasan dalam mengakses data keuangan. Oleh karenanya, mereka mempercayakan pemeriksaan kepada pihak independen.

B. Laporan Audit

Pada tahap akhir pemeriksaan umum (*general audit*), KAP akan menyerahkan suatu laporan akuntan yang terdiri dari:

- a. Lembaran Opini
- b. Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan.
 - 2) Laporan Laba Rugi.
 - 3) Laporan perubahan Ekuitas.
 - 4) Laporan Arus Kas.
 - 5) Catatan atas laporan keuangan, berisi bagian umum, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos pos neraca .
 - 6) Informasi tambahan, berupa lampiran atas pos pos yang penting.

C. Jenis Pendapat Akuntan

Laporan yang dibuat oleh akuntan merupakan suatu bukti pekerjaan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan. Laporan ini juga menjadi alat formal auditor untuk mengkomunikasikan hasil pekerjaannya mengenai kewajaran laporan keuangan. Bagi akuntan publik pendapat yang diberikan berupa opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah diperiksa. (Arens, 2014; Mulyadi, 2002; Agus, 2017; Halim, 2018)

1. Laporan Audit Bentuk Baku

Standar pelaporan yang keempat mewajibkan laporan audit mengandung suatu petunjuk yang jelas tentang karakteristik pekerjaan auditor serta tingkat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas laporan keuangan. Agar para pemakai

laporan dapat memahami laporan audit, maka para profesional telah menyiapkan standar kalimat yang dapat digunakan dalam membuat laporan auditor.

Laporan audit bentuk baku (*standar unqualified audit report*) merupakan laporan yang dikeluarkan oleh seorang auditor pada saat seluruh kondisi audit telah tercapai, tidak ditemukan kekeliruan saji yang signifikan yang terbengkalai dan tidak diperbaiki, serta laporan ini mengandung pendapat auditor bahwa laporan keuangan telah disediakan secara wajar sesuai dengan GAAP/PSAK.

Berikut unsur-unsur Laporan Audit Bentuk Baku:

- a. *Judul laporan.* Standar auditing mengharuskan setiap laporan diberikan judul laporan, dan di dalam judul tersebut tercantum pula kata independen. Sehingga format judul dapat berbentuk “laporan auditor independen,” “laporan dari auditor independen,” atau “pendapat akuntan independen.” Independen diartikan bahwa dalam melakukan auditing, wajib dilakukan secara objektif/tidak memihak.
- b. *Alamat laporan audit.* Laporan ini pada umumnya diperuntukkan kepada perusahaan, para pemegang saham atau dewan direksi perusahaan.
- c. *Paragraf pendahuluan.* Pada paragraf pertama laporan wajib menunjukkan tiga hal: Pertama, membuat suatu pernyataan sederhana bahwa Kantor akuntan publik telah melakukan audit. Kedua, pada paragraf ini juga menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk mencantumkan tanggal neraca serta periode akuntansi dari laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ketiga, pada paragraf pendahuluan ini juga menyatakan bahwa laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang berdasarkan pada pelaksanaan audit.
- d. *Paragraf scope.* Berisikan tentang pernyataan faktual tentang apa saja yang perlu dilakukan auditor selama proses audit.

- e. *Paragraf pendapat*. menyajikan hasil kesimpulan auditor yang berdasarkan pada proses audit yang sudah dilaksanakan. Pada bagian ini dapat disebut dengan pendapat auditor.
- f. *Nama KAP*. Nama yang dituliskan adalah nama dari kantor akuntan publik karena tanggung jawab dari kantor akuntan publik tersebut merupakan tanggung jawab seluruh anggota, baik secara hukum maupun secara profesi,
- g. *Tanggal laporan audit*. Merupakan tanggal yang dicantumkan pada saat auditor telah menyelesaikan prosedur auditing terpenting di lokasi pemeriksaan.

2. Jenis-Jenis Pendapat Akuntan Publik

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508), ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu:

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini diberikan jika auditor tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dengan disampaikannya pendapat Wajar Tanpa Pengecualian oleh auditor, maka auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang berbentuk material, posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan menggunakan bahasa penjelasan yang ditambahkan di dalam laporan audit yang berbentuk baku (*Unqualified Opinion With Explanatory Language*)

Pendapat ini diberikan apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang mewajibkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) di dalam laporan auditor, meskipun paragraf tersebut tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi

- 1) Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan auditor independensi lain
- 2) Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak mengalami kekeliruan karena situasi-situasi yang luar biasa, laporan keuangan disajikan secara menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Jika terdapat pada suatu kondisi dan peristiwa yang menyebabkan auditor yakin tentang adanya keraguan mengenai keberlangsungan hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor menghasilkan suatu kesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat dilakukan secara efektif dan pengungkapan mengenai hal tersebut telah terpenuhi.
- 4) Diantara dua masa akuntansi terdapat suatu perubahan pada material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau pada metode penerapannya.
- 5) Keadaan tertentu yang berkaitan dengan laporan audit atas adanya laporan keuangan komparatif
- 6) Data keuangan kuartalan tertentu yang diwajibkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapeppam) namun tidak diberikan atau tidak diulas kembali.
- 7) Informasi tambahan yang diwajibkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah ditiadakan, yang penyediannya melenceng jauh dari pedoman yang diterbitkan oleh Dewan tersebut, dan auditor tidak dapat melengkapi prosedur audit yang berhubungan dengan informasi tersebut, atau auditor tidak dapat melenyapkan keraguan besar tentang informasi tambahan tersebut apakah telah sesuai dengan padoman yang diterbitkan oleh Dewan tersebut.
- 8) Informasi yang lainnya di dalam suatu dokumen yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang diberikan di dalam laporan keuangan.

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila:

- 1) Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya suatu pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang berdampak pada auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- 2) Auditor memiliki keyakinan atas dasar auditnya bahwa laporan keuangan mengandung penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia yang berdampak pada material dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
- 3) Jika auditor memberikan suatu pernyataan pendapat wajar dengan pengecualian, maka ia wajib menjelaskan semua alasan yang menguatkan pendapatnya di dalam satu atau lebih paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat.

d. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa suatu laporan keuangan tidak menyajikan laporannya secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Apabila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, maka ia harus menjelaskan pendapatnya di dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat. Di dalam laporannya mengandung unsur: (a) semua argumen yang mendukung pendapat tidak wajar, dan (b) dampak utama hal yang mengakibatkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas, jika secara praktis

untuk dilakukan. Jika dampak tersebut tidak dapat dipastikan secara beralasan laporan audit harus menyatakan hal tersebut.

e. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan. Hal ini disebabkan auditor merasa tidak yakin atas kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Jika auditor menyatakan untuk tidak memberikan pendapat, maka laporan auditor tersebut harus memberikan semua alasan substantif yang mendukung pernyataannya tersebut.

Pernyataan tidak memberikan pendapat adalah pilihan yang tepat apabila auditor tidak melakukan audit yang ruang lingkupnya untuk memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat dapat dilakukan apabila auditor telah yakin apabila di dalam laporan klien terdapat sebuah penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia.

Tabel 5.1.
Ringkasan Kondisi Opini.

Kondisi pada saat pemeriksaan	Tingkat Materialitas		Material hingga terlihat tidak wajar
	Tidak Material	Material Tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan	
Masalah Akuntansi			
1. Laporan Keuangan tidak disajikan menggunakan PABU	WTP	WDP	Tidak Wajar
2. Prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten	WTP	WTP dengan paragraf penjas	WTP dengan paragraf penjas
3. Pendekatan apabila terjadi masalah	Tidak dapat diterapkan	WTP dengan paragraf penjas	WTP dengan paragraf penjas
Masalah Auditing			
1. Adanya pembatasan ruang lingkup oleh klien	WTP	WDP	Menolak memberi pendapat Tidak dapat diperiksa Tidak Wajar
2. Klien menggunakan auditor lain	WTP	WTP	
3. Laporan diperiksa sesuai SPAP	WTP	WDP	
Masalah Lain: Adanya Ketidakpastian	WTP	WTP dengan paragraf penjas	WTP dengan paragraf penjas
Auditor Tidak Independen	Menolak memberi pendapat (<i>Disclaimer of opinion</i>)		

Diolah dari berbagai sumber (2020).

Laporan Audit

Berikut ini contoh lembar laporan audit kantor akuntan publik:

	Purwanto, Sungkoro & Surja	
	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia	Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100 isy.com/id
		The original report included herein is in the Indonesian language.
Laporan Auditor Independen	Independent Auditors' Report	
Laporan No. RPC-5630/PSS/2018	Report No. RPC-5630/PSS/2018	
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega Tbk	The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors PT Bank Mega Tbk	
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Mega Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.	We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Mega Tbk, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.	
Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan	Management's responsibility for the financial statements	
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.	Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.	
Tanggung jawab auditor	Auditors' responsibility	
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.	Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.	
	 Peter Surja, CPA Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686/Public Accountant Registration No. AP.0686 5 Februari 2018/February 5, 2018	

Gambar 5.1 Laporan Audit Bentuk Baku.
Sumber: Laporan Keuangan Bank Mega tahun 2017
(www.idx.co.id)

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
EDSON & REKAN
Izin Usaha No. 777/KM.7/2002
Cipinang Elok Blok K No. 2
Jakarta Timur
Telp. (021) 8501629
Email: estris777@yahoo.com**

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. : 007/D-2011/EMR

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Utama
PT PETA

Kami telah mengaudit PT PETA tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laproan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian terhaap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PETA tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

ttd

Dr. Edson, S.E., Ak., M.Si., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik: 30.37.20

Jakarta, 25 Maret 2012

Gambar 5.2 Contoh Laporan Audit Bentuk Baku
Sumber: Agoes dan Trisnawati, 2017

D. Kemampuan Entitas dalam Menjaga Kelangsungan Usahanya

Menurut IAI (2001) dalam PSA No. 30 menjelaskan bahwa:

“ Auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat risiko yang besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dalam periode waktu pantas, tidak melebihi satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Evaluasi auditor berdasarkan atas pengetahuan tentang keadaan dan kejadian/peristiwa yang terjadi dari penerapan prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit yang bersangkutan dengan asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan yang sedang diaudit.”

Jika auditor sangsi terkait dengan penilaian kecakapan entitas dalam menjaga usahanya setelah mempertimbangkan rencana manajemen, maka auditor harus memprediksi dan mempertimbangkan risiko yang kemungkinan muncul atas laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, auditor harus mengungkapkan kesangsiannya dalam laporan hasil audit setelah paragraf pendapat. Apabila, berdasarkan pertimbangan auditor, rencana manajemen untuk mengatasi permasalahan dalam kelangsungan usahanya tidak berjalan dengan efektif maka auditor menyatakan tidak memberikan pendapat dan auditor harus menjelaskan alasan tidak memberikan pendapat pada laporan hasil audit sebelum paragraf pendapat.

E. Tahapan Audit Laporan Keuangan

Auditor independen pada saat melakukan audit laporan keuangan, setidaknya harus melewati empat tahapan audit sebagai berikut:

1. Penerimaan penugasan audit. Penerimaan tugas dalam hal ini adalah mendapat surat tugas untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan sebuah entitas
2. Perencanaan Audit. Merupakan rencana kegiatan selama melaksanakan audit yang terdiri dari waktu pelaksanaan audit dan dan ruang lingkup audit.

3. Pelaksanaan Audit. Auditor melaksanakan semua aktivitas audit yang sudah direncanakan sesuai dengan ruang lingkup dan pada waktu yang sudah ditentukan
4. Pelaporan Hasil Temuan. Auditor setelah melaksanakan audit, tentunya membuat laporan hasil audit dengan menjabarkan temuan-temuan serta memberikan pendapat atas temuan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk manajemen.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Laporan Audit
- *Disclosure*
- Kompleksitas
- PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum)
- *Fraud*
- *Conflict of Interest*
- *Remoteness*
- Pendapat Akuntan
- Standar *Unqualified Audit Report*
- Standar Profesional Akuntan Publik
- Materialitas

CONTOH SOAL

1. Menurut pendapat Anda seberapa penting audit terhadap laporan keuangan? Jelaskan!
2. Sebutkan lima jenis pendapat akuntan, dan jelaskan penerapan dari kelima jenis pendapat akuntan dalam perusahaan!
3. Berikan contoh laporan Audit bentuk baku. Jelaskan dengan menggunakan bahasa Saudara!
4. Apakah manfaat dari audit laporan keuangan?
5. Apakah *disclaimer* dari akuntan publik bisa dikatakan akibat adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan? Mengapa demikian, jelaskan menurut pendapat Anda!



BAB VI

BUKTI AUDIT

A. Sifat Bukti Audit

Menurut Arens (2003), yang dimaksud dengan bukti audit adalah semua informasi yang dipakai auditor untuk dijadikan dasar pemeriksaan sesuai dengan kriteria. Bukti audit juga dapat berupa segala data pendukung laporan keuangan berupa data akuntansi dan informasi yang kuat oleh auditor. Data ini dapat berupa jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman seputar akuntansi, baik secara catatan lembaran kerja (work sheet) dan spread sheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya yaitu bukti mendukung laporan keuangan.

Menurut Konrath (2002: 114 & 115) ada enam tipe bukti audit, yakni:

1. *Physical evidence*

Physical evidence tersusun atas sesuatu yang dapat diperhitungkan, dijaga, dan di observasi ataupun di inspeksi, terutama digunakan sebagai mendukung tujuan keberadaan atau eksistensi. Contohnya bukti fisik dari kas opname, observasi atas perhitungan fisik dalam persediaan, pemeriksaan surat berharga dan inventarisasi pada aktiva tetap.

Bukti fisik diperoleh dari prosedur audit melalui inspeksi, observasi dan perhitungan. Pada umumnya biaya dalam mendapatkan bukti fisik sangat tinggi, karena berkaitan dengan asersi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan dan penilaian.

2. *Evidence obtain through confirmation*

Confirmation evidence, merupakan bukti yang diperoleh seputar eksistensi, penilaian atau kepemilikan berasal dari pihak ketiga selain klien. Contohnya jawaban atas konfirmasi suatu piutang utang, barang konsinyasi, surat berharga yang ada di biro efek dan juga konfirmasi penasihat hukum klien. Ada tiga konfirmasi, yaitu

- a. Konfirmasi positif.
- b. Konfirmasi negatif.
- c. Blank confirmation.

Secara umum, konfirmasi dilakukan pada pemeriksaan kas di bank, piutang usaha, persediaan dan hutang.

3. *Documentary evidence*

Documentary evidence, terdiri dari catatan akuntansi dan segala dokumen yang mendukung pencatatan transaksi. Contohnya *copy faktur penjualan, journal voucher, general ledger, faktur pembelian, dan sub ledger*. Bukti ini berhubungan dengan eksistensi dan completeness dengan audit trail yang berkeungkinan auditor dalam *tracing* dan *vouching* terhadap transaksi. Dokumen ini juga merupakan asersi manajemen pada kejadian dalam dokumen buku besar dan sebaliknya.

4. *Mathematical evidence*

Mathematical evidence, yaitu perhitungan kembali dan rekonsiliasi oleh auditor. Contoh perhitungan termasuk *footing*, *cross footing* dan *extension* dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba/rugi penarikan aktiva tetap, PPh dan *accruals*. Untuk rekonsiliasi misalnya pemeriksaan rekonsiliasi bank, saldo piutang usaha dan hutang sesuai buku besar dan sub buku besar.

5. *Analytical evidence*

Analytical evidence, bukti dengan menggunakan telaah analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan analitis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit, sebelum melakukan substantive test dan pada akhir pekerjaan lapangan (*audit field work*). Prosedur analitis bisa dilakukan dalam bentuk :

- a. *Trend* (Horizontal) Analysis, meliputi perbandingan angka laporan keuangan periode terkini dengan periode sebelumnya serta penyelidikan peningkatan/penurunan signifikan baik dalam jumlah rupiah maupun persentase.
- b. *Common Size* (Vertikal) Analysis, yaitu analisis yang disusun dengan memperhitungkan tiap-tiap rekening laporan neraca dan laba rugi untuk mencari proporsi atas total penjualan.
- c. *Ratio Analysis*, contohnya perhitungan rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan manajemen asset.

6. *Bukti Lisan (Hearsay evidence)*

Hearsay (oral) evidence, bukti dalam bentuk jawaban secara lisan oleh klien terhadap pertanyaan yang diajukan auditor. Mencakup pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern, ada tidaknya *contingent liabilities*, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, kejadian penting sesudah tanggal neraca dan lain-lain.

B. Kecukupan Bukti

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecukupan bukti audit, yaitu:

1. Materialitas

Menurut FASB No. 2, materialitas adalah total atau besarnya kekeliruan atas salah saji informasi akuntansi dalam kondisi yang bersangkutan, kemungkinan besar dapat mempengaruhi pertimbangan keputusan pihak yang berkepentingan. Materialitas dapat berupa derajat signifikansi terhadap transaksi, saldo akun dan pengungkapan laporan keuangan.

2. Resiko audit

Resiko Audit adalah resiko bawaan yang asersinya mungkin disalah sajian dan resiko pengendalian yang pengendalian internalnya gagal mendeteksi salah saji bersifat material pada asersi. Terdapat suatu hubungan yang terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti. Rendahnya resiko audit yang mengartikan tingginya kepastian diyakini.

3. Faktor faktor ekonomi

Auditor harus melakukan perhitungan setiap tambahan biaya dan waktu saat menghimpun bukti yang sesuai manfaat perolehan kualitas dan kuantitas bukti yang dihimpun.

4. Ukuran dan karakteristik populasi

Pengumpulan terhadap bukti audit berdasarkan *sampling*. Dimana semakin besar populasi maka semakin besar pula total sampel yang diambil dari populasi. Karakteristik populasi mengenai homogenitas dan variabilitas item individual anggota populasi. Auditor memerlukan sampel dan informasi kuat untuk mendukung populasi yang bervariasi.

C. Kompetensi Bukti

Kompetensi bukti audit berkaitan dengan semakin efektif pengendalian interen klien semakin kompeten pula catatan akuntansi yang dihasilkan. Kompetensi bukti audit berupa informasi yang tergantung dari beberapa faktor yaitu:

1. Relevansi

Bukti yang relevan ialah bukti tentang asersi manajemen pada laporan keuangan. Bukti yang relevan berkaitan dengan penggunaan bukti yang tepat digunakan untuk suatu maksud tertentu. Sebagaimana dicontohkan dalam pengamatan fisik persediaan sebagai penentuan pemeriksaan persediaan.

2. Sumber bukti

Bukti audit langsung merupakan bukti audit yang paling dipercaya. Bukti ini memberikan keyakinan dan keandalan yang besar atas hasil dan perolehan dari dalam. Pengetahuan yang dimiliki auditor secara langsung melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan dan inspeksi lebih memberikan keyakinan dari pengetahuan yang diperoleh dari tidak langsung.

3. Ketepatan waktu

Berkaitan dengan tanggal pemakaian bukti, terutama dalam verifikasi asset lancar, utang lancar dan rekening laba rugi. Bukti yang berada dalam satu periode tanggal akuntansi tahun yang diperiksa, menjadi catatan ketepatan bukti karena sesuai dengan tahun yang diperiksa.

4. Obyektivitas

Adalah bukti yang dapat dipercaya (*reliable*) dari sudut pandang auditor, bukti yang memiliki sifat obyektivitas lebih baik daripada bukti yang dilihat dari sudut pandang subyektivitas.

D. Prosedur Audit

Halim (2018) menyatakan prosedur audit dilakukan sebagai pemenuhan tujuan audit, yaitu:

1. Mendapatkan pemahaman entitas sebagai penilaian resiko salah saji level laporan keuangan dan asersi (test penilaian resiko).
2. Menguji efektifitas operasi suatu pengendalian sebagai upaya mencegah dan mendeteksi salah saji material pada level asersi (test pengendalian)

3. Mendukung asersi ataupun mendeteksi salah saji bersifat material (*test substansial*)

Beberapa tindakan yang potensial dalam prosedur audit yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti audit.

1. Inspeksi pada dokumen dan catatan.
2. Inspeksi atas aktiva berwujud.
3. Observasi.
4. Pengajuan pertanyaan.
5. Konfirmasi.
6. Rekalkulasi.
7. Melakukan penilaian kinerja ulang (*reperformance*).
8. Prosedur analitis.
9. Teknik audit berbasis komputer.

Tabel 6.1
Prosedur dan Bukti Analitis.

Prosedur Audit	Contoh Penerapan (Asersi)	Jenis Audit
Inspeksi terhadap dokumen dan catatan	Pemeriksaan fisik secara rinci terhadap dokumen dan catatan	Bukti dokumenter
Inspeksi dalam aktiva berwujud	Pemeriksaan fisik persediaan	Bukti fisik
Observasi	Mengamati pelaksaannya suatu kegiatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan klien (<i>auditee</i>)	Bukti fisik
Konfirmasi	Mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga	Bukti konfirmasi
Pengajuan Pertanyaan (<i>inquiring</i>)	Mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis	Bukti lisan
Rekapitulasi	Mengulang kembali perhitungan klien	Bukti matematis
Prosedur analitis	Melakukan perbandingan laporan keuangan	Bukti analitis

Sumber: Halim (2018).

E. Klasifikasi Prosedur Auditing

Prosedur auditing dapat dibagi menjadi dua kategori

1. Pengujian *Compliance* (Pengujian Ketaatan)

Pengujian *Compliance* (Pengujian Ketaatan) merupakan pengujian yang ditujukan terhadap rancangan, kebijakan, prosedur atas struktur pengendalian internal dalam perusahaan untuk melihat apakah keefektifan untuk mencegah dan menemukan adanya salah saji material suatu asersi laporan keuangan.

2. Pengujian Substantif

Pengujian substantif adalah pengujian yang rinci dan prosedur analitis atas salah saji material suatu golongan transaksi, saldo rekening dan unsur pengungkapan laporan keuangan lainnya.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Evidence*
- Sifat Bukti Audit
- Jenis Bukti
- Konfirmasi
- *Tracing*
- *Vouching*
- Kompetensi Bukti
- Obyektifitas
- *Compliance*
- Substantif
- Prosedur Audit
- Relevansi
- Sumber Bukti

CONTOH SOAL

1. Sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan 3 (tiga) bukti konfirmasi!
2. Menurut pendapat anda seberapa pentingkah bukti audit dalam proses audit laporan keuangan? Jelaskan!
3. Bagaimanakah prosedur dalam proses audit?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecukupan bukti audit? Jelaskan!
5. Jelaskan secara singkat bagaimana auditor mengevaluasi bukti audit!



BAB VII

KERTAS KERJA AUDIT

A. Definisi Kertas Kerja

Menurut Halim (2018), kertas kerja adalah catatan auditor yang memuat prosedur rangkaian audit yang diselenggarakan, mencakup pengujian, perolehan informasi dan kesimpulan berkenaan pelaksanaan audit. Kertas kerja dapat dikatakan suatu mata rantai yang menghubungkan antara catatan akuntansi klien dengan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor.

B. Manfaat Kertas Kerja

Manfaat kertas kerja secara umum membantu auditor terhadap kelayakan dan kepastian bukti pemeriksaan, sesuai dengan standart-standart pemeriksaan yang lazim (Arens, 2008). Terdapat beberapa kegunaan kertas kerja tersebut antara lain:

1. Sebagai bahan bukti dalam memberikan saran dan pendapat perbaikan (*audit report*).
2. Membantu perencanaan, menjalankan dan *me-review* proses audit.
3. Memungkinkan atasan untuk menilai langsung atas delegasian pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik.
4. Membantu auditor dalam menilai suatu hasil kerja yang dilakukan sesuai rencana dan memuat aspek financial dilanjut operasional sebagai pedoman pendapat dan saran perbaikan
5. Sebagai dasar bukti prosedur audit telah diikuti, dilakukannya pendapat, diketahuinya sebab-sebab masalah, dan akibat dari masalah yang diungkapkan sebagai pendukung pendapat (*opini*) dan saran (perbaikan yang diberikan).
6. Memungkinkan staf auditor lain untuk menyesuaikan tugas yang diberikan dari periode berdasarkan rencana penggantian staf audit.
7. Sebagai alat bantu untuk mengembangkan profesionalisme bagi auditor internal
8. Menunjukkan ke pihak lain bahwa pekerjaan audit usai dilaksanakan berlandaskan standar keahlian oleh staf audit hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan “audit proses”.

C. Pembuatan Kertas Kerja

Tujuan pembuatan kertas kerja memudahkan semua kegiatan mencakup pemeriksaan tercatat, terekam, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dijadikan dasar dan bukti yang dapat disimpulkan dan dikomunikasikan tentang laporan hasil pemeriksaan kepada pihak pemakai laporan dan pihak yang diperiksa. Mengingat pentingnya peranan kertas kerja yang dapat mendukung laporan hasil auditor maka diwajibkan pada saat menyusun kertas kerja dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kewajiban penyusunan kertas kerja tertuang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) tambahan kelima Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan bertujuan Tertentu dan PSP keempat Pemeriksaan Kinerja menyatakan bahwa: “Pemeriksaan diharuskan memelihara dan mem-

persiapkan pemeriksaan ke bentuk kertas kerja pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman, namun tidak memiliki hubungan dengan auditor tersebut memastikan dokumentasi pemeriksaan tersebut menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan auditor. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan”.

Adapun terdapat beberapa teknik dasar dalam pembuatan kertas kerja (Halim, 2008):

1. Membuat heading yang berisi nama klien dan judul berisi isi kertas kerja, tanggal neraca dan periode audit
2. Nomor indeks untuk identifikasi dan referensi silan antar kertas kerja. Nomor ini berisi urutan akun beserta nomor halamannya. Misalnya adalah:
 - a. Menggunakan satu huruf (A, B, C dan seterusnya)
 - b. Menggunakan dua huruf (AA, BB, CC dan seterusnya)
 - c. Menggunakan nomor (10,20,30 dan seterusnya) untuk penghasilan dan biaya.

Misal C2, dapat berarti kertas kerja C untuk persediaan. Dan angka 2 untuk kertas kerja C yang ke enam.
3. Referensi Silang (*cross referencing*), yaitu data suatu kertas kerja yang berasal dari kertas kerja atau dalam kertas kerja lain yang harus diberi referensi silang dengan nomor
4. *Tick Mark*, berupa simbol yang digunakan auditor dalam pemrosesan referensi penjelasan naratif dalam kertas kerja
5. Adanya pencantuman tanda tangan pembuat ataupun penelaah

Menurut Mulyadi (2002) kertas kerja dan standar auditing, berhubungan erat dengan tiga kelompok yaitu:

1. Kertas kerja audit dan standar umum, standar umum yang menyatakan tentang kompetensi, independensi, dan kecermatan dan keseksamaan pelaksanaan tugas.
2. Keras kerja audit dan standar pekerjaan lapangan, hal ini berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan stuktur pengendalian internal bukti audit kompeten yang memadai.

3. Kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja juga berhubungan erat dengan standar pelaporan.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
EDSON & REKAN**

Izin Usaha No. 777/KM.7/2002
Cipinang Elok Blok K No. 2
Jakarta Timur
Telp. (021) 8501629
Fax (021) 8501629
Email: estris777@yahoo.com

PT PETA			
Ringkasan Piutang Tak Tertagih			
Per 31 Desember 2011			
Saldo Cadangan Kerugian Piutang, 31/12/2011			Rp275.000 V
Penghapusan selama 2011:			
Tn. Adam	B7	Rp 27.500	
Nona Betty	B7	RP 46.500	
Toko Citra	B7	RP 117.500	
UD. Dodi	B7	RP 43.250	
Total			Rp234.750
Tambahan cadangan kerugian piutang tahun 2010			Rp250.000
Saldo Cadangan Kerugian Piutang, 31/12/2011			B1 Rp290.250
V= Cocok dengan buku besar			
Tickmark dan penjelasan	Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Indeks
	Helena	Herman	B-6
Tanda Tangan Pembuat dan Pemeriksa	Tanggal:	Tanggal:	Periode:
	02/01.2012	12/03/2012	31/12/2011

Gambar 7.1 Contoh Kertas Kerja.

Berikut ini contoh simbol yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja audit:

	: Simbol ini menunjukkan bahwa auditor telah melakukan perbandingan antara laporan keuangan dengan dokumen asli
	: Simbol ini menunjukkan bahwa auditor telah melakukan pengecekan penjurnalan dari atas kebawah
	: Simbol ini menunjukkan bahwa auditor telah menelusuri bukti ke bukti jurnal dan seterusnya sampai ke buku besar.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa komentar telah dibuktikan, diuji, dilakukan penyesuaian dan diterima.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa suatu angka telah diperiksa dan dikaitkan dengan angka transaksi dari periode audit yang bersangkutan.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan telah sama dengan jumlah individual.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa semua cek telah dimasukkan oleh auditor dalam melakukan rekonsiliasi bank.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa perbedaan cek akibat kesalahan penulisan telah dibayarkan oleh klien.
	: Kode ini merupakan kode dalam neraca percobaan yang menunjukkan bahwa skedul akan disiapkan.
	: Simbol ini menunjukkan bahwa skedul telah diselesaikan.

Gambar 7.2 Contoh Simbol Pemeriksaan (Tick Mark)

Sumber: Halim, 2018.

D. Susunan Kertas Kerja

Bentuk dan isi Kertas Kerja Auditor dirancang sedemikian rupa hingga sesuai kondisi masing-masing auditor. Informasi dimasukkan kedalam dokumentasi pemeriksaan menggambarkan catatan penting mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor sesuai standard. Kuantitas, jenis, dan isi Kertas Kerja Auditor berlandaskan pertimbangan profesional auditor. SA Seksi 339 Kertas Kerja, Paragraf 05, menyatakan bahwa,

Kertas Kerja Audit

“kertas kerja harus mencukupi mellihatkan bahwa catatan akuntansi cocok dengan laporan keuangan atau informasi lain yang dilaporkan serta standard pemeriksaan yang dapat diterapkan telah dilaksanakan oleh auditor”.

Beberapa kertas kerja yang sudah dibuat harus disajikan dalam susunan kertas kerja yang sistematis. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

1. Draft Laporan Audit.
2. Laporan Keuangan Auditan.
3. Ringkasan informasi bagi penelaah.
4. Program audit.
5. Laporan keuangan atas neraca lajur yang dibuat oleh klien.
6. Ringkasan jurnal penyesuaian.
7. *Working Trial Balance*.
8. Daftar Utama.
9. Daftar pendukung.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

EDSON & REKAN

Izin Usaha No. 777/KM.7/2002

Cipinang Elok Blok K No. 2

Jakarta Timur

Telp. (021) 8501629

Fax (021) 8501629

Email: estris777@yahoo.com

PT PETA			
Ringkasan Piutang Tak Tertagih			
Per 31 Desember 2011			
Saldo Cadangan Kerugian Piutang, 31/12/2011			Rp275.000 V
Penghapusan selama 2011:			
Tn. Adam	B7 Rp 27.500		
Nona Betty	B7 Rp 46.500		
Toko Citra	B7 Rp 117.500		
UD. Dodi	B7 Rp 43.250		
Total			Rp234.750
Tambahan cadangan kerugian piutang tahun 2010			Rp250.000
Saldo Cadangan Kerugian Piutang, 31/12/2011			B1 Rp290.250
V= Cocok dengan buku besar			
Tickmark dan penjelasan	Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Indeks
	Helena	Herman	B-6
Tanda Tangan Pembuat dan Pemeriksa	Tanggal:	Tanggal:	Periode:
	02/01.2012	12/03/2012	31/12/2011

Gambar 7.3 Contoh Working Balance Sheet - Aktiva.

Sumber: Agoes dan Trisnawati, 2017

Kertas Kerja Audit

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
EDSON & REKAN**
Izin Usaha No. 777/KM.7/2002
Cipinang Elok Blok K No. 2
Jakarta Timur
Telp. (021) 8501629
Fax (021) 8501629
Email: estris777@yahoo.com

Keterangan	Ref.	Per Audit	Per Klien	Pare		Per Audit
	KK	31/12/2010	31/12/2011	Dr	Cr	12/12/2011
KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang usaha	M1	575.600.000	380.009.006		41.250.000	421.259.006
Utang lain-lain		93.810.000	14.605.913			14.605.913
Utang pajak	M2	33.908.600	30.222.547	3.750.000	5.850.491	32.323.038
Beban yang masih harus dibayar		90.000.000	92.900.000		100.000	93.000.000
Total Kewajiban Jangka Pendek		793.319.200	517.737.466	3.750.000	47.200.491	561.187.957
		^	^	^	^	^
Kewajiban Jangka Panjang						
Kewajiban pajak ditangguhkan		1.239.946				
Total Kewajiban Jangka Panjang		1.239.946				
		^	^	^	^	^
EKUITAS						
Modal saham - Rp 10.000 per lembar		1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000
Saldo Laba		2.192.800.419	2.677.267.751	10.773.491	90.481.726	2.756.975.986
Total Ekuitas Pemegang Saham		3.192.800.419	3.677.267.751	10.773.491	90.481.726	3.756.975.986
		^	^	^	^	^
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM		3.987.359.565	4.195.005.217	14.523.491	137.682.217	4.318.163.943
		^	^	^	^	^
Klien				Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Indeks
PT PETA				Helena	Herman	A2.1
Skedul:				Tanggal:	Tanggal:	Periode:
Kertas Kerja Neraca				02/01.2012	12/03/2012	31/12/2011

Gambar 7.4 Contoh Working Balance Sheet – Passiva.

Sumber: Agoes dan Trisnawati, 2017

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
EDSON & REKAN
Izin Usaha No. 777/KM.7/2002
Cipinang Elok Blok K No. 2
Jakarta Timur
Telp. (021) 8501629
Fax (021) 8501629
Email: estris777@yahoo.com**

Keterangan	Ref. KK	Per Audit 31/12/2010	Per Klien 31/12/2011	Pare		Per Audit 12/12/2011
				Dr	Cr	
PENDAPATAN USAHA-BERSIH	PL1	5.822.664.000	5.721.597.850			5.721.597.850
BEBAN POKOK USAHA		4.556.000.000	4.377.276.195			4.377.276.195
LABA KOTOR		1.266.664.000	1.344.321.655			1.344.321.655
		^	^	^	^	^
BEBAN USAHA	PL3	699.809.750	686.719.174	4.923.000		691.642.174
LABA USAHA		566.854.250	657.602.481	4.923.000		652.679.481
		^	^	^	^	^
PENDAPATAN DAN USAHA LAIN						
LABA/RUGI VALUTA ASING		-8509500	91.550.600		90.250.000	1.300.000
PENDAPATAN BUNGA		20.500.000	8.422.774		231.726	8.654.500
BEBAN BUNGA		950.700	1.864.000			1.864.000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-BERSIH		-28.058.800	84.991.826		90.481.726	658.169.381
		^	^	^	^	^
LABA SEBELUM PAJAK		594.913.050	572.610.655	4.923.000	90.481.726	658.169.381
		^	^	^	^	^
BEBAN PAJAK-TAHUN BERJALAN	PL5	84.518.000	88.143.323	5.850.491		93.993.814
BEBAN PAJAK-DITANGGUHKAN		1.239.946				
		85.757.946	88.143.323	5.850.491		93.993.814
		^	^	^	^	^
LABA BERSIH		509.155.104	484.467.332	10.773.491	90.481.726	564.175.567
		^	^	^	^	^
Klien PT PETA				Dibuat Oleh: Helena	Diperiksa Oleh: Herman	Indeks A3.1
Skedul: Kertas Kerja Laba Rugi				Tanggal: 02/01/2012	Tanggal: 12/03/2012	Periode: 31/12/2011

Gambar 7.5. Contoh Working Profit and Loss – Rincian.
Sumber: Agoes dan Trisnawati, 2017

E. Kepemilikan, Kerahasiaan Dan Penyimpanan Kertas Kerja

SA Seksi 339 *Kertas Kerja*, Paragraf 06, mengatur kertas kerja milik Kantor Akuntan Publik, bukan milik klien maupun milik pribadi auditor. Sedangkan kertas kerja pemeriksa sektor publik menjadi hak milik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Kertas kerja tidak diizinkan ataupun pengganti dari catatan akuntansi klien. Kertas kerja menjadi tanggung jawab kantor akuntan publik dan auditor berkewajiban untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan kertas kerja dan harus disimpan minimal selama sepuluh tahun.

Kertas kerja tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa ada seijin dari pihak klien. Kertas kerja harus disimpan dengan teratur dan rapi agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat disiapkan dengan cepat. Oleh sebab itu kertas kerja harus disimpan dalam arsip permanen maupun arsip kini. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 301 memuat aturan berkaitan kerahasiaan kertas kerja "*Anggota kompartemen akuntan public tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien*".

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Kertas Kerja Audit
- Tujuan Kertas Kerja Audit
- Klasifikasi Kertas Kerja Audit
- *Cross Indeks*
- *Cross Referencing*
- Indeks
- *Trick Mark*
- *Heading*
- Bentuk Kertas Kerja Audit
- *Working Balance Sheet*
- *Working Profit and Loss*
- *Trial Balance*
- Penyimpanan dan Pengarsipan Kertas Kerja Audit
- Analisa Auditor
- Pendapat Auditor

CONTOH SOAL

1. Apakah definisi dari kertas kerja audit?
2. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun kertas kerja audit? Jelaskan!
3. Jelaskan maksud dari prinsip umum dalam pembuatan kertas kerja audit!
4. Mengapa kertas kerja audit merupakan milik kantor akuntan publik dan isi dari kertas kerja audit menjadi tanggung jawab auditor secara pribadi ? Jelaskan menurut pendapat Anda!
5. Sebutkan dan jelaskan tipe kertas audit yang Anda ketahui!



BAB VIII

MATERIALITAS DAN RESIKO AUDIT

A. Materialitas

1. Konsep Materialitas

Financial Accounting Standard Board (FASB) berpendapat bahwa materialitas dapat dikatakan sebagai:

“Besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang, dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut.”

Definisi tersebut mewajibkan seorang auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan satuan usaha dan segala informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Karena dalam sebuah tanggung jawab dapat menentukan

apakah laporan keuangan berpotensi salah saji secara material, maka auditor harus menyampaikan hal tersebut kepada klien berdasarkan temuan salah saji secara material, sehingga laporan keuangan dapat dilakukan tindakan pengoreksian.

Langkah-Langkah Dalam Menerapkan Materialitas:

- a. Merencanakan luas pengujian
Langkah 1:
Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas
Langkah 2:
Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen
- b. Mengevaluasi hasil-hasil
Langkah 3:
Mengestimasi total salah saji dalam segmen
Langkah 4:
Memperkirakan salah saji gabungan
Langkah 5:
Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas.

Istilah kekeliruan dapat diartikan sebagai salah saji atau kesalahan yang tidak disengaja terkait jumlah atau pengungkapan pada sebuah laporan keuangan. Kekeliruan tersebut meliputi:

- a. Kesalahan dalam mengumpulkan atau mengolah data yang menjadi sumber dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal dan timbul dari kelalaian atau kesalahan dalam menafsirkan fakta.
- c. Kekeliruan dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, cara dalam penyajian, atau dalam melakukan pengungkapan.

Dalam membuat laporan audit atas laporan keuangan, auditor tidak bisa memberikan jaminan untuk klien atau pengguna laporan keuangan lainnya karena laporan keuangan yang telah diaudit adalah laporan keuangan yang akurat.

2. Pentingnya Konsep Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan

Mulyadi (2002) mengatakan bahwa dalam melaksanakan auditing atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan baik untuk klien atau pengguna laporan keuangan lainnya bahwa laporan keuangan yang telah diaudit adalah laporan keuangan yang akurat sehingga tidak perlu untuk memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Auditor tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor harus memberikan keyakinan (*assurance*) sebagai berikut:

- a. Auditor dapat memberikan sebuah keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang telah disajikan di dalam sebuah laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkaskan, digolongkan, dan dikompilasikan.
- b. Auditor dapat memberikan sebuah keyakinan bahwa auditor tersebut telah mengumpulkan seluruh bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk memberikan pendapatnya atas laporan keuangan yang telah diaudit.
- c. Auditor dapat memberikan sebuah keyakinan dalam bentuk pendapat (atau dapat juga memberikan suatu informasi yang dalam hal ini terdapat pengecualian), bahwa laporan keuangan sebagai dari keseluruhan yang telah disajikan secara wajar dan tidak adanya salah saji material karena kekeliruan dan ketidakwajaran.

Maka terdapat dua konsep yang mendasari suatu keyakinan yang diberikan oleh seorang auditor yaitu: konsep materialitas seberapa besar tingkat terjadinya salah saji dan konsep risiko audit seberapa besar tingkat risiko kegagalan seorang auditor untuk mengubah pendapatnya terhadap laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

3. Pertimbangan Pendahuluan Mengenai Materialitas

Pertimbangan ini merupakan maksimum jumlah yang memicu auditor yakin laporan keuangan terjadi sebuah salah saji namun tidak akan memengaruhi keputusan yang telah dimiliki oleh para pengguna.. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, maka akan semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Sehingga selama pelaksanaan auditing, auditor sering kali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas (Arens, 2011).

Sebagai contoh jumlah material ini akan berbeda pada setiap perusahaan. Bisa jadi Rp. 5.000.000 merupakan jumlah yang material bagi perusahaan kecil yang mempunyai asset bersih Rp. 50.000.000. Sementara itu, kesalahan sejumlah yang sama dapat menjadi kesalahan yang tidak material bagi perusahaan yang mempunyai asset 500 milyar.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas terhadap seperangkat laporan keuangan tertentu, yakni:

- a. Materialitas merupakan sebuah konsep yang memiliki sifat relatif daripada absolut. Salah saji material bagi suatu perusahaan belum tentu merupakan kesalahan penyajian material juga bagi perusahaan lain.
- b. Dasar yang diperlukan dalam melakukan sebuah evaluasi materialitas.

Materialitas akan selalu bersifat relatif, sehingga dalam hal ini diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji tersebut berbentuk material. Contohnya adalah seperti *Earning before tax* (EBT) sering digunakan sebagai dasar dalam penentuan jumlah material perusahaan yang berorientasi pada laba.

- c. Faktor-faktor kualitatif yang dapat juga mempengaruhi materialitas, contohnya sebagai berikut:
 - 1) Jumlah dalam suatu ketidakwajaran lebih penting daripada kekeliruan yang tidak disengaja. Hal itu karena ketidakwajaran dapat mencerminkan kejujuran dan keandalan dari pihak manajemen atau pihak yang terlibat.

- 2) Kekeliruan yang kecil dianggap material jika dikaitkan dengan kewajiban kontrak.
- 3) Kekeliruan yang tidak material dapat menjadi material apabila dapat mempengaruhi kecenderungan laba.

4. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan

Auditor dapat menggunakan dua metode dalam menerapkan materialitas (Arens, 2011). Pertama auditor dapat menggunakan materialitas dalam melakukan perencanaan audit, yang kedua adalah pada saat mengevaluasi bukti-bukti auditing dalam pelaksanaan audit. Pada saat merencanakan audit, auditor perlu membuat sebuah estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah di dalam laporan keuangan dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran pada laporan keuangan. Jika auditor dalam menentukan jumlah materialitas terlalu rendah, maka auditor akan membuang waktu dalam. Sebaliknya, jika auditor dalam menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, maka auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga auditor harus memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

5. Materialitas Pada tingkat Saldo Akun

Materialitas pada tingkat saldo akun merupakan salah saji minimum yang dimungkinkan terdapat pada saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh disatu padukan dengan saldo akun material. Hal itu dikarenakan saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang telah dicatat, sedangkan untuk konsep materialitas lebih berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi keuangan. Saldo suatu akun yang telah dicatat umumnya mencerminkan batasan atas lebih saji di dalam akun tersebut (Mulyadi, 2002).

Halim, (2018) menyatakan pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun baik akun neraca maupun laporan

laba rugi lebih didasari atas neraca. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Besar relatif akun.
- b. Besar variabel akun.
- c. Pertimbangan profesional.

6. Hubungan Antara Materialitas dan Bukti Audit

Jika materialitas rendah, maka jumlah salah saji yang rendah dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi keuangan, sehingga auditor perlu mengumpulkan bukti-bukti audit yang berkompeten dalam jumlah banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, maka jumlah salah saji yang besar baru dapat mempengaruhi keputusan pengguna informasi keuangan, sehingga auditor perlu mengumpulkan bukti audit yang berkompeten dalam jumlah sedikit.

B. Risiko Audit

Menurut SA Seksi 312 Audit Risk And Materiality In Conducting An Audit, risiko audit merupakan risiko yang terjadi pada auditor yang tidak disadari dan tanpa adanya pendapat modifikasi sebagaimana mestinya dalam laporan keuangan berisikan salah saji material. Keseluruhan konsep ini merupakan konsep terbalik dari konsep keyakinan memadai. Semakin tingginya tingkat kepastian yang diharapkan seorang auditor dalam suatu pendapat yang benar, maka semakin rendahnya pula risiko audit yang akan diterima oleh auditor.

Auditor harus membuat rumusan suatu pendapat laporan keuangan untuk keseluruhan dasar bukti yang diperoleh melalui verifikasi asersi berhubungan saldo akun individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah memberi batasan terhadap risiko audit tingkat saldo akun hingga sedemikian rupa pada akhir proses audit, risiko audit pada saat menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan tingkatan rendah (Halim, 2008).

Model risiko audit dipakai untuk tahap perencanaan saat menentukan besaran bahan bukti yang dikumpulkan dalam tiap siklus.

$$\text{PDR} = \text{AAR IR} \times \text{CR}$$

Dimana:

PDR = Risiko penemuan yang direncanakan (*Planned Detection Risk*)

AAR = Risiko audit yang dapat diterima (*Acceptable Audit Risk*)

IR = Risiko bawaan (*Inherent Risk*)

CR = Risiko pengendalian (*Control Risk*)

1. Menilai Komponen Resiko Audit

Komponen resiko audit terdiri atas:

a. Risiko Bawaan

Adalah kerentangan saldo akun ataupun golongan transaksi terhadap suatu peristiwa terjadinya salah saji material, dengan asumsi tidak adanya suatu kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait (Halim, 2018)

Penilaian risiko ini sebuah pertimbangan terkait hal-hal yang mungkin mempunyai dampak mendalam atas asersi terhadap semua akun dan hal lainnya yang berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik.

Risiko bawaan lebih besar daripada asersi-asersi yang lainnya. Risiko ini timbul independen dari audit laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor tidak mengganti tingkat aktualisme dari risiko bawaan. Sebaliknya, auditor dapat mengubah tingkat risiko bawaan yang dinilai.

Beberapa pertimbangan mengenai dampak yang mendalam terhadap asersi-asersi untuk semua atau banyak akun dan hal-hal yang hanya berkaitan dengan asersi spesifik untuk suatu akun spesifik. Contoh dari hal-hal yang mungkin memiliki dampak mendalam dapat termasuk sebagai berikut:

1. Profitabilitas dari entitas secara relatif terhadap industri. Semakin tinggi profitabilitas semakin kecil resiko bawaannya..
2. Sensitivitas dari hasil operasi terhadap faktor-faktor ekonomi.
3. Masalah *going concern* seperti kurangnya modal kerja
4. Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan kemungkinan salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu
5. Perputaran manajemen, reputasi manajemen dan keahlian akuntansi

Hal-hal yang mungkin saja hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik dapat termasuk sebagai berikut:

1. Akun-akun atau transaksi-transaksi yang sulit untuk diaudit.
2. Masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan
3. Kerentanan terhadap penyalagunaan
4. Sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji yang terdeteksi dalam audit sebelumnya
5. Sensitivitas dari penilaian faktor-faktor.

b. Risiko Pengendalian

Risiko pengendalian adalah terjadinya resiko peristiwa salah saji material asersi yang tidak dicegah atau dideeteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas.

Secara normal, auditor akan memastikan tingkat penilaian risiko pengendalian yang direncanakan setiap asersi di dalamnya tahap perencanaan audit. Penilaian yang direncanakan didasar asumsi-asumsi mengenai efektivitas rancangan dan pengoperasian bagian pengendalian intern klien yang relevan.

c. Risiko deteksi

Risiko deteksi adalah risiko yang timbul akibat auditor tidak mendeteksi salah saji material terdapat pada suatu as-

ersi. Risiko deteksi sebagai kombinasi dari risiko prosedur analitis dan risiko pengujian terinci. Dalam menentukan risiko deteksi auditor juga diharuskan untuk mempertimbangkan kemungkinan yang akan membuat suatu kekeliruan.

2. Risiko Audit pada Tingkat Laporan Keuangan dan Tingkat Saldo Akun

Auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan. Auditor harus bisa mempertimbangkan materialitas maupun risiko audit yang tanpa disadari dan tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material (Arens, 2011).

Risiko audit materialitas dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- a. Risiko audit keseluruhan yang berhubungan dengan laporan keuangan.
- b. Risiko audit individual yang berhubungan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan pada laporan keuangan.

1) Risiko Audit Keseluruhan (*Overall Audit Risk*)

Risiko ini adalah auditor menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan termasuk besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor pada saat menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, padahal realitanya laporan keuangan tersebut masih berisi salah saji material.

2) Risiko Audit Individual

Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting disebabkan oleh besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Dari pengalaman audit di tahun sebelumnya, auditor dapat menaksir risiko audit atas akun tertentu yang memiliki keterkaitan.

3. Hubungan Antara Risiko Audit dan Bukti Audit

Terdapat suatu hubungan terbalik antara risiko audit dan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Semakin rendah tingkat risiko audit yang ingin dicapai, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat yang dapat diterima dari risiko prosedur analitis atau risiko pengujian terinci yang ditentukan oleh auditor, maka semakin besar kecukupan dan kompetensi pengujian substansial yang diperlukan untuk membatasi risiko deteksi keseluruhan pada tingkat tersebut.

4. Hubungan Timbal Balik antara Materialitas, Risiko Audit, dan Bukti Audit

Jika risiko audit konstan dan mengurangi tingkat materialitas, maka bukti audit wajib untuk ditingkatkan. Namun, apabila tingkat materialitas konstan dan mengurangi bukti audit, maka yang perlu ditingkatkan adalah risiko auditnya. Dengan kata lain, apabila ingin mengurangi risiko audit kita dapat melakukan salah satu dari ketiga hal berikut ini:

- a. Menaikkan tingkat materialitas sementara menahan bukti audit konstan
- b. Menaikkan bukti audit sementara menahan tingkat materialitas konstan.
- c. Membuat kenaikan yang lebih kecil untuk jumlah bukti audit dan tingkat materialitas

5. Peringatan akan Adanya Risiko Audit

Peringatan akan adanya risiko audit bertujuan oleh lembaga pengawas auditor untuk memberikan suatu peninjauan mengenai perkembangan ekonomi terbaru kepada auditor, perkembangan profesional dan perkembangan peraturan yang dimungkinkan akan mempengaruhi audit untuk klien dalam banyak industri.

Setelah auditor melaksanakan perencanaan penugasan dan pengumpulan bukti audit, hasil audit dinyatakan pula sejumlah istilah dari versi evaluasi atas model risiko audit. Model

resiko audit untuk mengevaluasi resiko audit dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{ACAR} = \text{IR} \times \text{CR} \times \text{ACDR}$$

Dimana:

ACAR : *Achieved Audit Risk*, suatu pengukuran resiko yang dilakukan oleh auditor dan menyatakan bahwa suatu akun dalam laporan keuangan mengandung salah saji yang material setelah auditor melakukan pengumpulan bukti audit.

IR : *Inherent Risk* (resiko bawaan)

CR : *Control Risk* (resiko pengendalian)

ACDR : *Achieved detection Risk* (resiko deteksi yang tercapai)

C. Strategi Audit Awal

Strategi audit awal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan terutama substantif (*primarily substantive approach*), dan pendekatan tingkat risiko pengendalian taksiran rendah (*lower assessed level of control risk approach*)

1. Komponen Strategi Audit Pendahuluan

Dalam mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-aseri, auditor memberikan perhatian untuk tingkat risiko bawaan yang dinilai, tingkat risiko pengendalian yang direncanakan, tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan dan Tingkat pengujian rincian yang direncanakan,

2. Strategi Audit Tambahan

a. Pendekatan Substantif yang Menekankan Pada Prosedur Analitis

Menurut Mulyadi (2002) dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan substantif utama menekankan pada prosedur analitis, auditor mencirikan komponen-komponen strategi audit sebagai berikut:

- 1) Mendapati pengetahuan luas tentang proses bisnis klien yang memiliki keterkaitan dengan asersi.

- 2) Auditor berusaha untuk memperhitungkan bahwa dia memperoleh bukti kompeten dari prosedur analitis untuk mendukung suatu penilaian risiko sedang atau rendah dari bukti tersebut.
 - 3) Gunakan suatu tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai
 - 4) Rencanakan untuk memperoleh suatu pemahaman minimum mengenai bagian relevan dari pengendalian intern.
 - 5) Rencanakan sedikit apabila terdapat suatu pengujian pengendalian.
 - 6) Rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai dampak dari adanya pengurangan risiko yang diberikan oleh prosedur analitis.
- b. Penekanan pada Risiko Bawaan dan Prosedur Analitis
- Penekanan pada risiko bawaan dan prosedur analitis juga dapat diasumsikan bahwa prosedur analitis lebih terjangkau daripada prosedur audit yang lainnya. Oleh karena itu, pendekatan auditor dapat dispesifikasikan menjadi beberapa komponen strategi audit sebagai berikut:
- 1) Risiko bawaan dinilai pada tingkat di bawah maksimum.
 - 2) Gunakan tingkat risiko prosedur analitis yang direncanakan untuk dinilai serendah mungkin.
 - 3) Gunakan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan untuk dinilai pada tingkat yang tinggi (atau pada tingkat maksimum).
 - 4) Rencanakan untuk memperoleh pemahaman minimum mengenai bagian yang relevan dari pengendalian intern.
 - 5) Rencanakan sedikit apabila terdapat suatu pengujian pengendalian.
 - 6) Rencanakan pengujian substantif atas transaksi dan saldo yang lebih sempit sebagai dampak dari pengurangan risiko yang diberikan dari pengurangan risiko bawaan dan prosedur analitis rendah.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Materialitas
- Luas Pengujian
- Risiko Audit (*Audit Risk*)
- Strategi Audit (*Strategy Audit*)
- Risiko Pengendalian (*Control Risk*)
- Materialitas Tingkat Laporan Keuangan
- Materialitas Tingkat Saldo Akun
- Konsep Materialitas
- Audit Laporan Keuangan
- Fraudulent Financial Reporting
- Interent Risk
- Risiko Kecurangan
- Risiko Audit Keseluruhan
- Risiko Audit Individualis
- Bukti Audit

CONTOH SOAL

1. Definiskan materialitas dan persyaratan apakah yang diajukan pada auditor menurut definisi materialitas!
2. Dalam perencanaan audit, auditor harus mengakui bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berhubungan dengan laporan keuangan. Jelaskan!
3. Salah saji yang secara kuantitatif tidak material mungkin akan material secara kualitatif. Jelaskan!
4. Identifikasikan 2 faktor yg hrs dipertimbangkan auditor dalam mengalokasikan materialitas laporan keuangan pada akun-akun!
5. Jika jumlah kekeliruan yang ditemukan dalam suatu akun lebih kecil dari alokasi materialitas, dampak apakah yg mungkin terjadi pada audit terhadap akun lain?



BAB IX

PERENCANAAN AUDIT DAN PROSEDUR ANALITIS

Dalam banyak literatur audit, tahap persiapan audit disamakan dengan tahap perencanaan audit. Dalam beberapa literatur yang mengungkapkan bahwa tahap persiapan adalah tahap yang berhubungan tentang penerimaan penugasan audit dan proses perolehan berbagai informasi yang diperlukan pada tahap perencanaan. Perencanaan dan persiapan seksama diperlukan hingga proses audit dimanfaatkan optimal dalam penyediaan jasa terbaik kepada pengguna. Hasil perencanaan audit yaitu rencana audit tertulis untuk melakukan pekerjaan lapangan dan pernyataan tujuan audit untuk pembuatan laporan auditor.

A. Perencanaan Audit Awal dan Manfaatnya

Perencanaan audit awal (*initial audit planning*) berdasarkan cakupan perencanaan, perencanaan audit dapat dikategorikan dua kelompok utama yaitu, perencanaan organisasi audit dan perencanaan penugasan audit. Sebelum melakukan dua perencanaan awal dalam audit terdapat empat hal yang semuanya harus dilakukan lebih dulu dalam audit yaitu:

1. Auditor memutuskan untuk menerima atau tidaknya klien baru maupun terus melayani klien sekarang.
2. Auditor mengidentifikasi keinginan atau kebutuhan klien audit. Informasi ini selanjutnya mempengaruhi proses perencanaan selanjutnya.
3. Untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien.
4. Auditor mengembangkan strategi audit keseluruhan, termasuk didalamnya staf penugasan dan spesialis audit yang diperlukan.

Manfaat dari perencanaan audit yang sebaik-baiknya, yaitu:

1. Mendapatkan bahan bukti yang kompeten.
Perencanaan audit sebaik-baiknya dilakukan agar auditor dapat menentukan kecukupan bahan bukti yang diperlukannya sesuai dengan risiko dan materialitas tiap-tiap pos laporan keuangan.
2. Membantu menentukan sumber daya yang diperlukan dan biaya audit.

Dengan perencanaan, auditor dapat menentukan prosedur audit yang dilakukan sehingga lamanya pemeriksaan dan biaya audit dapat diperkirakan. Dengan perencanaan, auditor dapat menentukan prioritas prosedur audit individual sebelum waktunya penyelesaian dan juga dapat meningkatkan disiplin dalam penyelesaian proses audit.

B. Langkah-Langkah dalam Kegiatan Perencanaan Audit

Langkah langkah dalam kegiatan perencanaan audit adalah

1. Memahami Bisnis Industri Klien

Informasi yang harus diperoleh dalam rangka pengetahuan tentang bisnis yang diharapkan meliputi:

- a. Kondisi ekonomi secara umum.
- b. Industri dimana klien menjalankan usahanya.
- c. Rasio-rasio keuangan rata-rata industri.
- d. Entitas klien.

Tiga alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang industri klien dan lingkungan eksternal adalah:

- a. Risiko berkaitan dengan industri tertentu yang mempengaruhi penilaian auditor terhadap risiko bisnis klien dan risiko audit yang diterima dan juga yang mempengaruhi auditor saat penerimaan penugasan industri yang berisiko. Contoh kasus ini seperti industri simpan-pinjam dan asuransi kesehatan.
- b. Risiko inheren tertentu sudah umum bagi semua klien dalam industri tertentu. Contohnya meliputi kemungkinan keusangan persediaan dalam industri pakaian jadi, risiko inheren atas penagihan piutang usaha dalam industri pinjaman konsumen, serta cadangan untuk risiko inheren kerugian dalam industri asuransi kecelakaan.
- c. Banyak industri yang memiliki persyaratan akuntansi yang harus dipahami auditor dalam mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan klien dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, apabila auditor melakukan audit atas sebuah pemerintahan, auditor harus memahami prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. Juga ada PSAK bagi perusahaan konstruksi, kereta api, organisasi nirlaba, lembaga keuangan, dan banyak organisasi lainnya.

2. Memahami dan Menilai Struktur Pengendalian Internal

Pengendalian Internal merupakan proses yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Tujuan pemahaman terhadap pengendalian intern adalah untuk merencanakan audit. Pemahaman atas pengendalian intern meliputi pemahaman atas desain pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dan pemahaman atas operasi pengendalian intern. Pengetahuan tersebut harus digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi tipe kesalahsaji potensial dan kecurangan yang mempengaruhi laporan keuangan
 - b. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salah saji material.
 - c. Mendesain pengujian substantif
 - d. Kesimpulan atas efektifitas struktur pengendalian intern harus meliputi Penilaian menyeluruh struktur pengendalian intern klien dan sikap tim pengendalian, yaitu:
 - 1) Pengendalian intern yang memadai dan penilaian atas pengendalian (*rely on control*)
 - 2) Pengendalian intern memadai tetapi tim tidak akan menguji pengendalian karena pengujian substantif secara langsung lebih efektif.
 - 3) Pengendalian intern tidak memadai dan tim tidak mengandalkan pada pengendalian intern.
 - 4) Penilaian atas risiko kecurangan (*risk of fraud*)
 - 5) Tindak lanjut kemungkinan risiko audit yang tidak bisa ditanggulangi oleh pengendalian intern klien.
3. Menentukan Tingkat Materialitas Awal dan Salah Saji yang Bisa Diterima

Materialitas adalah besaran nilai yang jika dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap informasi tersebut. Pertimbangan kuantitatif tentang prosentase salah saji terhadap:

- a. Laba bersih sebelum pajak.
- b. Total aktiva.
- c. Total aktiva lancar.
- d. Total ekuitas pemegang saham.

Dalam perencanaan audit, tim harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini yaitu Tingkat laporan keuangan (materialitas awal) dan Tingkat saldo akun (salah saji yang bisa diterima/*tolerable error*). Penentuan materialitas awal didasarkan dari sudut pandang pemakai laporan keuangan. Selain itu, materialitas awal juga dipengaruhi pengalaman tim audit terhadap salah saji yang ditemukan pada audit tahun-tahun sebelumnya apabila terdapat perulangan audit.

4. Menentukan Tingkat Risiko Audit Awal

Dalam menentukan risiko audit jika tanpa disadari, auditor tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jenis-jenis risiko:

- a. Risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran besaran auditor dalam menerima salah saji material dalam laporan keuangan setelah audit diselesaikan dan opini wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan
- b. Risiko bawaan adalah kerentanan saldo akun maupun golongan transaksi suatu salah saji material, dengan mengasumsi tidak adanya kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern terkait
- c. Risiko pengendalian adalah risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah ataupun dideteksi tepat waktu oleh struktur pengendalian intern entitas.
- d. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul akibat auditor tidak mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam asersi.

5. Melakukan Komunikasi dengan Auditor Lain

Komunikasi dengan auditor lain tergantung posisi KAP, sebagai auditor utama atau auditor lainnya. Apabila melakukan tindakan auditor lain dan menerima instruksi auditor utama, KAP harus menjawab tiap pertanyaan auditor lain. Komunikasi antar auditor meliputi:

- a. Petunjuk audit.
- b. Jadwal penyerahan laporan-laporan yang diinginkan dari auditor lain.
- c. Pernyataan independen dari auditor lain.
- d. Rencana audit yang disusun oleh auditor lain.
- e. Audit clearance oleh auditor lain.
- f. Kuesioner audit yang harus diisi oleh auditor lain.
- g. Catatan penyelesaian audit.
- h. Rincian saldo dan transaksi antar afiliasi.
- i. *Check list* pengungkapan.
- j. *Review* kejadian setelah tanggal neraca.

6. Menyusun Rencana Audit

Rencana audit merupakan ringkasan perikatan, ikhtisar sifat dan karakteristik operasi bisnis klien serta strategi audit secara keseluruhan. Tujuan penyusunannya Rencana Audit adalah:

- a. Menyediakan bukti dokumentasi bahwa kantor telah memenuhi standar lapangan pertama.
- b. Menyediakan alat bagi auditor untuk mengkoordinasikan, menjadwalkan dan mensupervisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota tim yang terlibat dalam perikatan.

Cakupan Rencana Audit meliputi:

- a. Tujuan perikatan.
- b. Kondisi bisnis dan industri klien.
- c. Pengendalian intern.
- d. Area-area kritis dan penting.
- e. Penetapan materialitas.
- f. Risiko audit.
- g. Rencana *sample*.
- h. Personalia dan jadwal.

Rencana Audit merupakan proses akumulatif, bisa dirubah jika dalam peelaksanaan terdapat perkembangan kasus pemeriksaan. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan

dijumpai adanya ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan kondisi lapangan, maka auditor in-charge segera menginformasikan penyimpangan ini, saran perubahan terhadap rencana audit, kepada manager dalam sebuah memorandum. Manager kemudian menginformasikan perubahan ini kepada Partner untuk mendapatkan persetujuan. Perubahan terhadap rencana audit yang telah disetujui oleh Partner diringkaskan dalam Revisi Rencana Audit.

7. Menyusun Audit Program

Audit program adalah daftar terinci prosedur audit yang dilakukan dalam proses audit. Audit program tentatif dibuat sebagai bagian perencanaan audit. Karena sifatnya tentatif, audit program seringkali dimodifikasi sesuai perkembangan audit. Audit program didesain sebagai upaya pemenuhan tujuan audit atas transaksi dan akun-akun utama dalam laporan keuangan. Tujuan audit adalah untuk menguji asersi manajemen dalam laporan keuangan yang meliputi:

- a. Eksistensi atau keberadaan.
- b. Kelengkapan.
- c. Hak dan kewajiban.
- d. Penilaian atau alokasi.
- e. Penyajian dan pengungkapan.

C. Prosedur Analitis

Prosedur analitis didefinisikan oleh SAS 56 (AU 329) sebagai:

“evaluasi suatu informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan masuk akal antara data keuangan dan nonkeuangan ... melibatkan perbandingan jumlah tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor.”

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan penilaian apakah saldo akun atau data lain wajar berhubungan dengan ekspektasi auditor. Penekanan prosedur analitis sesuai definisi SAS 56 tertuju ekspektasi yang dikembangkan auditor. Sebagai contoh, auditor membandingkan beban komisi tercatat se-

lama tahun berjalan dengan total penjualan tercatat dikali tingkat komisi rata-rata sebagai satu pengujian kewajaran komisi yang dicatat secara keseluruhan. Agar prosedur analitis menjadi relevan dan dapat diandalkan, auditor cenderung menyimpulkan bahwa penjualan yang tercatat telah dinyatakan dengan benar, semua penjualan mendapatkan komisi, dan rata-rata tingkat komisi aktual dapat ditentukan.

Prosedur analitis dapat dilaksanakan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan:

1. Prosedur analitis diwajibkan pada tahap perencanaan untuk menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit.
2. Prosedur analitis sering kali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai uji substantif yang mendukung saldo akun.
3. Prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyelesaian audit. Pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan. Biasanya, seorang partner senior, yang memiliki pengetahuan yang luas atas bisnis klien, melakukan prosedur analitis selama *review* akhir file audit dan laporan keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaktepatan dalam audit.

D. Jenis Prosedur Analitis

Prosedur analitis berguna sebagai bukti audit bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi terkait saldo akun atau rasio dicatat, tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan. Auditor mengembangkan ekspektasi saldo akun ataupun rasio dengan pertimbangan informasi periode sebelumnya, tren industri, ekspektasi anggaran yang disiapkan klien, dan informasi nonkeuangan. Biasanya auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan menggunakan satu maupun lebih jenis prosedur analitis berikut. Dalam setiap kasus, auditor membandingkan data klien dengan:

1. Data industri.
2. Data periode sebelumnya yang serupa.
3. Hasil yang diharapkan yang ditentukan klien.

4. Hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor.
5. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan data nonkeuangan.

1. Membandingkan Data Klien dan Industri

Andaikan anda sedang melakukan audit dan memperoleh informasi berikut tentang klien serta rata-rata perusahaan dalam industri klien:

	Klien		Industri	
	2007	2006	2007	2006
Perputaran persediaan	3,4	3,5	3,9	3,4
Presentase marjin kotor	26,3%	26,4%	27,3%	26,2%

Dari data diatas terlihat, perusahaan terlihat stabil tanpa ada indikasi kesulitan. Akan tetapi, jika kita menggunakan data industri untuk mengembangkan ekspektasi tentang dua rasio tahun 2007, kita berharap kedua rasio klien itu meningkat. Walaupun kedua rasio itu sendiri mungkin tidak menunjukkan masalah yang berarti, data ini mengilustrasikan bagaimana pengembangan ekspektasi dengan menggunakan data industri dapat memberikan informasi yang berguna tentang kinerja klien dan salah saji yang material. Mungkin perusahaan telah kehilangan pangsa pasar, penetapan harganya tidak kompetitif, telah mengeluarkan biaya yang abnormal, atau mungkin memiliki item persediaan yang usang atau melakukan kesalahan dalam mencatat pembelian. Auditor harus menentukan apakah kedua hal yang terjadi terakhir memberikan kepastian yang layak bahwa laporan keuangan tidak salah saji.

Manfaat penting perbandingan industri ialah membantu pemahaman bisnis klien dan indikasi kemungkinan adanya kegagalan keuangan, namun kurang membantu auditor mengidentifikasi salah saji yang potensial. Sebagai contoh, rasio yang ada pada Robert Morris Associates terutama adalah jenis yang digunakan para bankir dan eksekutif kredit lainnya untuk mengevaluasi apakah perusahaan mampu melunasi pinjamannya. Informasi yang sama tersebut berguna bagi auditor dalam menilai kekuatan relatif dari struktur modal klien, kapasitas pinjamannya, dan kemungkinan kegagalan keuangan.

Kelemahan utama pengguna rasio industri pada auditing adalah perbedaan sifat informasi keuangan klien dengan perusahaan industri. Lini bisnis klien tidak sama seperti standar industri. Selain itu, perusahaan yang berbeda menerapkan metode akuntansi yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi komparabilitas data. Sebagai contoh, jika sebagian besar perusahaan dalam industri menggunakan penilaian persediaan FIFO serta penyusutan garis lurus, dan klien audit menggunakan LIFO serta penyusutan saldo menurun berganda, perbandingannya mungkin tidak berarti. Ini bukan berarti bahwa perbandingan industri harus diabaikan. Sebaliknya, ini dipandang sebagai indikasi dari perlunya kecermatan dalam menginterpretasikan hasilnya. Salah satu pendekatan untuk mengatasi keterbatasan rata-rata industri adalah membandingkan klien dengan satu atau lebih perusahaan yang menjadi tolak ukur dalam industri.

2. Membandingkan Data Klien dengan Data Periode Sebelumnya yang Serupa

Andaikan presentase margin kotor sebuah perusahaan antara 26 dan 27 persen untuk masing-masing 4 tahun terakhir tetapi turun menjadi 23 pada tahun berjalan. Penurunan margin kotor ini diperhatikan auditor jikalau penurunan itu tidak diperkirakan. Penyebab penurunan ini berupa perubahan kondisi ekonomi, di samping disebabkan salah saji laporan keuangan, antara lain kesalahan *cut-off* penjualan atau pembelian, penjualan yang belum tercatat, lebih saji utang usaha, atau kesalahan kalkulasi biaya persediaan. Penurunan margin kotor mungkin akan mengakibatkan meningkatnya bukti dalam satu atau lebih akun yang mempengaruhi margin kotor tersebut. Auditor harus menentukan penyebab terjadinya penurunan margin kotor untuk meyakinkan laporan keuangan tidak salah saji secara material.

Berbagi prosedur analitis akan memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari satu lebih periode sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa contoh yang umum:

a. **Membandingkan Saldo Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya.**

Salah satu cara adalah mencantumkan hasil neraca saldo tahun lalu dalam kolom terpisah dari spreadsheet neraca saldo tahun berjalan. Auditor dapat membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk memutuskan, secara dini dalam audit, apakah suatu akun harus mendapat perhatian lebih karena terjadi perubahan yang signifikan dalam saldo.

b. **Membandingkan Rincian Total Saldo dengan Rincian yang Serupa untuk Tahun Sebelumnya.**

Dengan membandingkan secara singkat rincian periode berjalan dengan rincian periode sebelumnya yang serupa, auditor mengisolasi informasi pemeriksaan lebih lanjut. Perbandingan rincian dapat dilakukan beberapa waktu, misalnya membandingkan total penjualan bulanan, perbaikan, dan akun lainnya untuk tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

c. **Menghitung Rasio dan Hubungan Presentasi untuk Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.**

Kelemahan dari metode ini adalah Pertama, tidak mempertimbangkan pertumbuhan atau penurunan aktivitas bisnis. Kedua, hubungan data yang satu dengan yang lainnya, seperti penjualan dengan harga pokok penjualan, diabaikan. Rasio dan hubungan presentase dapat mengatasi kedua kelemahan itu.

d. **Membandingkan Data Klien dengan Hasil yang Diharapkan yang Ditentukan Klien.**

Kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran (*budgets*) untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangannya. Karena anggaran dapat sebagai ekspektasi klien selama periode berjalan, olehnya auditor harus menyelidiki perbedaan paling signifikan antar hasil anggaran dengan aktual, disebabkan area ini mengandung salah saji potensial. Jika tidak adanya perbedaan, salah saji tidak mungkin terjadi.

Dalam beberapa organisasi, anggaran disiapkan dengan asal-asalan sehingga bukan merupakan ekspektasi yang realistis. Informasi semacam itu memiliki nilai yang rendah sebagai bukti audit. Pembahasan tentang prosedur anggaran dengan personil klien digunakan untuk memenuhi tujuan ini. Kemungkinan lain bahwa informasi keuangan saat ini telah diubah oleh personil klien agar sesuai dengan anggaran. Jika hal ini terjadi, auditor tidak akan menemukan perbedaan ketika membandingkan data aktual dengan data yang dianggarkan, meskipun ada salah saji dalam laporan keuangan. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian audit yang terinci atas data aktual biasanya dilakukan untuk meminimalkan masalah ini.

e. Membandingkan Data Klien dengan Hasil yang Diharapkan yang Ditentukan Auditor

Perbandingan umumnya antara data klien dan hasil yang diharapkan ketika auditor menghitung saldo untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis prosedur ini, auditor mengestimasi rupa saldo akun yang seharusnya menghubungkan ke beberapa akun neraca atau akun laporan laba-rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Berikut ini adalah dua contohnya:

- a. Auditor melakukan perhitungan independen terhadap beban bunga atas wesel bayar jangka panjang dengan mengalikan saldo akhir bulan wesel bayar dengan suku bunga rata-rata bualanan. Estimasi independen ini didasarkan pada pengujian atas kelayakan beban bunga yang tercatat.
- b. Auditor dapat menghitung rata-rata penyisihan piutang tak tertagih sebagai presentase piutang usaha kotor, dan menerapkannya pada saldo piutang usaha kotor akhir tahun audit. Dengan tren historis seperti, auditor dapat menentukan nilai yang diharapkan untuk penyisihan tahun berjalan.

f. Membandingkan Data Klien dengan Hasil yang Diharapkan dengan Menggunakan Data Non keuangan.

Auditor dapat menghitung perkiraan total pendapatan dari kamar hotel dengan mengalihkan jumlah kamar dengan tarif

setiap kamar, tarif harian rata-rata untuk setiap kamar, dan tingkat hunian rata-rata. Auditor juga membandingkan estimasi pendapatan yang tercatat sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Pendekatan yang sama juga dapat diterapkan untuk melakukan estimasi dalam situasi lain, seperti pendapatan uang kuliah di universitas (rata-rata uang kuliah dikali pendaftar), penggajian pabrik (total jam kerja dikali tarif upah), dan biaya bahan yang dijual (unit yang terjual dikali biaya bahan per unit).

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Perencanaan Audit
- Standar Auditing
- Risiko Audit yang Dapat Diterima (*Acceptable Audit Risk*)
- Risiko Inhern (*Inhern Risk*)
- Perencanaan Audit Awal (*Initial Audit Planning*)
- Investigasi
- Penugasan Audit
- Strategi Audit
- Bisnis dan Industri Klien
- Prosedur Analitis
- Risiko Bisnis Klien

CONTOH SOAL

Lengkapilah Audit Program untuk siklus piutang usaha sesuai dengan template berikut ini!

AUDIT PROGRAM

No. Ref. Audit Program	No. Ref. SOP	FK-01		
	Siklus	Revenue	Prosedur	Pengakuan Piutang Usaha
	Pusat Pertanggungjawaban			
	Lokasi Pengujian			
Siklus	Pendapatan			
Proses	Pengakuan Piutang Usaha			
Resiko Ref.	FK-01-R1			
Deskripsi Resiko	Pendapatan dicatat tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung			
Control Ref.	FK-01 C1			
Aktivitas Pengendalian Internal	1. Adanya kelengkapan dokumen penjualan seperti Surat Kontrak, Nota Kesepakatan, BAST.			
Penanggung jawab				
Audit Program				
Tujuan Pengujian	Untuk memperoleh bukti pengujian bahwa pendapatan telah di catat dengan benar dan dokumen penjualan yang diperlukan telah lengkap dan tersedia			
Jenis Pengujian	Dokumen Pendukung:			

Perencanaan Audit dan Prosedur Analitis

Periode Pengujian		1. Surat Kontrak	2. BAST
Metode Sampling		3. Nota Kesepakatan (NoKes)	
Prosedur Audit	Diselesaikan		WP Ref.
	Oleh	Tgl	
1. Melakukan tanya jawab dengan Supervisor atas prosedur pengakuan piutang usaha			
2. Melakukan inspeksi terhadap Surat Kontrak, BAST, dan Nota Kesepakatan (NoKes)			
3. Melakukan inspeksi atas kesesuaian antara Surat Kontrak, BAST, dan Nota Kesepakatan (NoKes) dengan pencatatan penjualan			
4. Melakukan inspeksi adanya tanda tangan Manager sebagai bukti review atas pemeriksaan yang dilakukan			

Siklus	Pendapatan
Proses	Pengakuan Piutang Usaha
Resiko Reff.	FK-01-R2
Deskripsi Resiko	Pendapatan belum dibuatkan invoice
Control Reff.	FK-01 C2
Aktivitas Pengendalian Internal	Adanya kelengkapan dokumen penjualan seperti Surat Kontrak, Nota Kesepakatan, BAST, Invoice, Faktur Pajak. Adanya integritas dari urutan/pengurutan nomor faktur penjualan
Penanggung jawab	

Audit Program

Tujuan Pengujian	Untuk memperoleh bukti pengujian bahwa dokumen penjualan yang diperlukan telah lengkap dan tersedia dan telah terdapat integritas dari urutan/pengurutan nomor faktur penjualan		
Jenis Pengujian	Dokumen Pendukung:		
Periode Pengujian	1. Surat Kontrak	3. BAST	
Metode Sampling	2. Nota Kesepakatan (NoKes)	4. Invoice	5. Faktur Pajak
Prosedur Audit	Diselesaikan		WP Ref.
	Oleh	Tgl	
1.			
2.			
3.			



BAB X

PENGUJIAN PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANTIF

A. Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian adalah pengujian pada rancangan pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan struktur pengendalian internal. Menurut Mulyadi (2002) pengujian ini merupakan prosedur audit sebagai alat verifikasi efektivitas pengendalian intern klien. Pengujian pengendalian ditujukan mendapatkan informasi mengenai: (1) frekuensi kegiatan pengendalian yang ditetapkan, (2) mutu pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut dan (3) karyawan yang melakukan aktivitas pengendalian tersebut.

B. Tipe Pengujian Pengendalian

Ada dua tipe pengujian pengendalian menurut William (2003), yaitu:

1. *Concurrent test of control*, merupakan pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor dengan prosedur memperoleh pemahaman SPI klien.
2. Pengujian pengendalian tambahan atau perencanaan adalah pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan.

C. Prosedur Pelaksanaan Pengujian Pengendalian

Menurut Mulyadi (2002), prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian yaitu:

1. **Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien.**
Prosedur ini dilakukan untuk pemeriksaan prosedur seperti, pengendalian atas aktiva, dokumen dan catatan akuntansi yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Prosedur ini tidak bisa menghasilkan bukti yang kuat dalam mengevaluasi efektifitas operasi pengendalian.
2. **Pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya.**
Auditor dapat melakukan pengamatan terhadap kinerja yang dilakukan karyawan klien untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian berjalan dengan baik.
3. **Melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan.**
Inspeksi dokumen, catatan dan laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa bukti telah lengkap, dapat dibandingkan dengan dokumen lain serta ditandatangani sebagaimana mestinya. Prosedur ini paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian yang meninggalkan bukti.
4. **Mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor.**
Prosedur ini bisa disebut sebagai reperformance, yaitu pengujian yang bertujuan untuk menilai akurasi mekanis kegiatan pengendalian yang pada pengujian sebelumnya hasilnya masih kurang untuk menilai efektifitas operasi pengendalian.

D. Lingkup Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian langsung dipengaruhi oleh tingkat risiko pengendalian yang direncanakan oleh auditor. Semakin kecil tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang diperlukan untuk diolah menjadi data.

Luas lingkup pengujian pengendalian dipengaruhi juga penggunaan bukti pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Auditor memastikan tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur pengendalian mulai pengujian pelaksanaan audit tahun sebelumnya (Arens, 2011). Pengujian pengendalian biasanya dilaksanakan pada dua waktu, yaitu Selama pekerjaan interim dan pada saat mendekati akhir tahun. Idealnya pengujian pengendalian dilaksanakan mendekati akhir tahun karena hal tersebut dapat mencerminkan keseluruhan periode tahun pembukuan perusahaan di audit.

E. Penentuan Risiko Pengendalian

1. Mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi pada pengujian pengendalian.
2. Mengidentifikasi dan menyiapkan uji pengendalian yang mencegah atau mendeteksi salah saji.
3. Menghimpun bukti dari pengujian pengendalian untuk rancangan dan operasi pengendalian relevan.
4. Mengevaluasi bukti yang diperoleh
5. Menentukan risiko pengendalian.

Tabel 10.1
Contoh Langkah Pengujian Pengendalian.

Salah Saji Potensial	Pengendalian yang Diperlukan	Pengujian Pengendalian
Tanda bukti pembayaran mungkin dibayar dua kali	Memberikan tanda bukti atau catatan "Lunas" pada setiap cek yang diterbitkan	Melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap pemberian cap atau catatan "Lunas" kepada dokumen yang telah dibayarkan.
Barang yang diterima tidak cocok jumlahnya	Penghitungan barang yang telah diterima oleh petugas dan inspeksi fisik serta membandingkan barang fisik dengan dokumen perintah pembelian.	Melakukan observasi penerimaan barang
Suatu cek diterbitkan untuk jumlah yang salah atau kesalahan pencatatan jumlah dalam penerbitan cek	Menggunakan computer melakukan perbandingan antara jumlah cek yang diterbitkan dengan jumlah yang dicatat dalam pengeluaran kas serta melakukan rekonsiliasi dengan bank	Melakukan pengujian untuk menguji pengendalian atas aplikasi computer dan melakukan pengawasan terhadap proses rekonsiliasi bank.
<i>Voucher</i> mungkin tidak dicatat	Melakukan pengecekan setiap hari atas ringkasan voucher dengan jumlah yang dicatat pada voucher.	Memeriksa bukti hasil pengecekan atau melakukan pengecekan kembali.

Sumber: Arens (2011).

F. Pengujian Substantif

Pengujian substantif adalah langkah ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substantif meliputi prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi *monetary errors* salah saji secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2002), Pengujian substantif dapat dinyatakan prosedur audit yang dirancang sebagai upaya penemuan kesalahan moneter langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter yang terdapat dalam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena kesalahan dalam:

1. Penerapan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2. Tidak diterapkannya prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
3. Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia.
4. Ketidaktepatan pisah batas (*cutoff*) pencatatan transaksi
5. Perhitungan (penambahan, pengurangan, pengalihan, dan pembagian).
6. Pekerjaan penyalinan, penggolongan dan peringkasan informasi. Pencantuman pengungkapan (*disclosure*) unsur tertentu dalam laporan keuangan.

Sebagai contoh dalam pengujian substantif terhadap pendapatan penjualan (*sale revenues*), auditor melakukan prosedur audit untuk menemukan:

1. Kemungkinan adanya kesalahan klien dalam penerapan prinsip akuntansi di Indonesia, sehingga menyajikan laporan menjadi lebih rendah atau lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya.
2. Kemungkinan klien menyajikan informasi pendapatan penjualan yang tidak sesuai dengan PABU sehingga mengakibatkan pemakai laporan keuangan salah dalam membuat keputusan.
3. Kemungkinan klien mengubah prinsip akuntansi dalam penyajian angka pendapatan penjualan dan tidak adanya pengungkapan

akibat perubahan penerapan prinsip terhadap laba bersih, hal ini mengakibatkan tidak dapat diperbandingkannya laporan keuangan klien tahun yang diaudit dengan laporan keuangan klien disajikan dalam tahun sebelumnya.

4. Kemungkinan klien melakukan pisah batas (*cutoff*) transaksi penjualan secara tidak tepat dan tidak konsisten dengan penggunaan tahun sebelumnya. Seperti halnya, transaksi penjualan tahun 20X1 dicatat oleh klien sebagai pendapatan penjualan tahun 20X2. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan angka pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi.
5. Kemungkinan terjadinya kesalahan moneter angka pendapatan penjualan karena kesalahan pekerjaan klerikal (*clerical works*), pengumpulan informasi penjualan ini meliputi kegiatan menyalin informasi dari dokumen ke jurnal. Kegiatan menjumlah, mengurangi, mengkalikan dan membagi kegiatan meringkas informasi jurnal dan pemindahan jumlahnya posting dalam akun buku besar, kegiatan menyajikan informasi dalam laporan keuangan.

Auditor menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengujian substantif menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap asersi laporan keuangan yang signifikan. Perancangan pengujian substantif meliputi penentuan:

1. Sifat pengujian.
2. Waktu pengujian.
3. Luas pengujian substantif.

G. Prosedur Pelaksanaan Pengujian Substantif

Ada delapan prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif yaitu:

1. Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka.
2. Pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka.
3. Menginspeksi dokumen dan catatan.
4. Melakukan penghitungan kembali

5. Konfirmasi.
6. Analisis.
7. *Tracing* atau pengusutan.
8. *Vouching* atau penelusuran.

H. Sifat Pengujian Substansif

Jika tingkat risiko deteksi yang dapat diterima adalah rendah maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif yang biasanya juga lebih mahal. Ada tiga tipe pengujian substantif yang dapat digunakan yaitu:

1. Pengujian atas transaksi.
2. Prosedur analitis.
3. Pengujian terperinci atas saldo.

I. Pengujian Atas Transaksi

Pengujian transaksi (*substantive test of transaction*) termasuk prosedur-prosedur audit untuk pengujian kecermatan pencatatan transaksi. Tujuan pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan transaksi akuntansi klien terotorisasi pantas, dicatat, dan diikhtisarkan dalam jurnal dengan benar dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar (Arens, 2008).

1. Pengujian Detail Transaksi

Pengujian transaksi secara rinci dilakukan untuk menentukan:

- a. Ketepatan otorisasi transaksi akuntansi auditee
- b. Ketepatan pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal.
- c. Kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu.

Ketika auditor percaya bahwa transaksi di catat dengan benar dalam jurnal dan diposting dengan benar, maka auditor akan percaya bahwa total buku besar adalah benar. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan:

Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif

- a. Ketepatan otorisasi transaksi akuntansi
- b. Kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi jurnal
- c. Kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu.

Metodologi Perancangan Program Audit untuk Pengujian atas Transaksi. Program audit pengujian atas transaksi, biasanya mencakup:

- a. Penjelasan atas dokumentasi pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian intern.
- b. Gambaran prosedur menyeluruh atas struktur pengendalian intern.
- c. Rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan.

Metodologi untuk merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian substantive atas transaksi:

- a. Melaksanakan prosedur untuk memahami struktur pengendalian intern
- b. Menetapkan risiko pengendalian.
- c. Mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengujian atas pengendalian.
- d. Merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit berkaitan transaksi:
 - Prosedur audit.
 - besar sampel.
 - pos/unsur yang dipilih.
 - saat pelaksanaan.

Prosedur pengujian atas transaksi mencakup pengujian atas pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan rencana risiko pengendalian yang ditetapkan. Jika pengendalian efektif dan risiko pengendalian yang telah direncanakan rendah, maka penekanan diberikan pada pengujian atas pengendalian. Beberapa uji substantif transaksi juga ditekankan. Prosedur dilakukan dalam memperoleh pemahaman pengendalian

intern akan mempengaruhi pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif dalam transaksi (Halim, 2008).

Prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi:

- a. *Tracing*: pilih satu sampel *sales invoice* dan telusur ke *sales journal*.
- b. *Vouching*: pilih satu sampel transaksi yang dicatat dalam *sales journal* dan telusur ke *sales invoices*.
- c. *Reperforming*: periksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada *sales invoice*.
- d. *Inquiring*: tanyakan pada klien apakah ada transaksi-transaksi *related parties*.

2. Prosedur Analitis

Prosedur analitis adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah:

- a. Memahami bidang usaha klien.
- b. Menetapkan kemampuan kelangsdungan hidup entitas.
- c. Indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan.
- d. Mengurangi pengujian audit yang lebih rinci.

Efektifitas dan efisiensi prosedur analitis dalam mendeteksi kemungkinan terjadi salah saji material, tergantung pada faktor:

- a. Sifat asersi.
- b. Kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan.
- c. Tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan.
- d. Ketepatan harapan.

Prosedur analitis dilakukan pada tiga tahap audit yang berbeda, yaitu:

Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif

- a. Tahap perencanaan untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang perlu memenuhi resiko audit yang diinginkan (disyaratkan).
- b. Selama pelaksanaan audit bersama- sama dengan pengujian atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo (bebas pilih).
- c. Mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian ke- layakan akhir (disyaratkan).

3. Pengujian terinci atas saldo

Pengujian terinci atas saldo memusatkan saldo akhrit buku besar baik akun neraca maupun laba rugi, tetapi penekanan utama adalah pada laporan posisi keuangan. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi tahap–tahap sebagai berikut:

- a. Menetapkan materialitas dan resiko audit yang dapat di terima dan resiko bawaan suatu akun.
- b. Menetapkan resiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi.
- c. Merancang pengujian pengendalian, transaksi dan prosedur analisis untuk suatu siklus akuntansi.
- d. Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit, pengujian terinci atas saldo yang direncanakan meliputi prosedur audit, besar sampel, pos garing miring unsure yang dipilih dan saat pengujian.

Pengujian Detail Saldo, metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi empat tahapan, yaitu:

- a. Menilai materialitas dan risiko bawaan suatu akun.
- b. Menetapkan risiko pengendalian.
- c. Merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis.
- d. Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan.

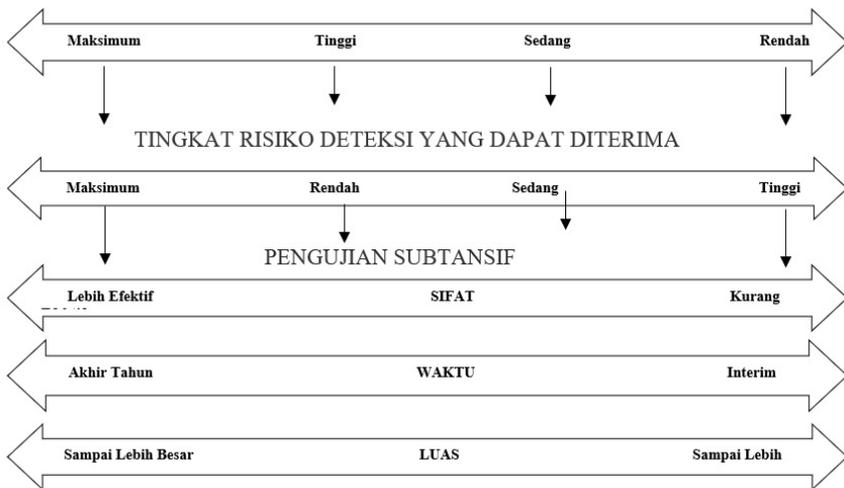
Tabel 10.2.
Hubungan Risiko Deteksi dengan Pengujian Detail Saldo.

Tingkat Risiko Deteksi	Langkah Pengujian Detail Saldo
Tinggi	<i>Scan</i> rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi ketepatan perhitungan matematisnya.
Moderat	<i>Review</i> rekonsiliasi bank yang dibuat klien dan verifikasi pada sebagian besar item-itemnya.
Rendah	Buatlah rekonsiliasi bank dan verifikasi item-item yang direkonsiliasi tersebut.

J. Penentuan Saat Pelaksanaan Pengujian Substansif

Tingkat risiko deteksi dapat mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika risiko deteksi rendah maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca.

PERKIRAAN TINGKAT RISIKO BAWAAN DAN RISIKO PENGENDALIAN



Gambar 10.1.
Hubungan Risiko–Risiko Audit dengan Sifat, Saat dan Luas Pengujian Subtansif.

Sumber: Halim, 2018

K. Luas Pengujian Substantif

Semakin tingkat risiko detektif rendah yang diterima, maka bukti yang dikumpulkan banyak, auditor dapat mengubah keseluruhan bukti yang dihimpun dengan mengubah luas pengujian substantif. Keputusan auditor rancangan pengujian substantif didokumentasikan pada kertas kerja bentuk program audit (William, 2003).

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- Pengujian Pengendalian
- Aktivitas Pengendalian
- Tipe Pengujian Pengendalian
- Prosedur Pengendalian
- Lingkup Pengujian Pengendalian
- Risiko Pengendalian
- Langkah Pengujian Pengendalian
- Salah Saji Potensial
- Risiko Pengendalian
- Prosedur Analitis
- Pengujian Rinci Transaksi
- Pengujian Substansif
- Jenis Pengujian Substansif

CONTOH SOAL

1. Apakah perbedaan antara pengujian pengendalian dan pengujian substansif?
2. Jelaskan bagaimana penentuan risiko pengendalian!
3. Jelaskan bagaimana prosedur pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substansif!
4. Jelaskan enam tahap pemeriksaan yang menggunakan pendekatan tingkat pengendalian yang ditetapkan lebih rendah!
5. Buatlah contoh langkah pengujian pengendalian atas kas masuk dan keluar serta pencatatan pada persediaan!



BAB XI

SAMPLING AUDIT

Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 26, *Sampling Audit* merupakan penerapan prosedur audit atas kurangnya seratus persen unsur suatu saldo akun ataupun kelompok transaksi yang bertujuan menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Audit *sampling* dapat dilakukan dengan dua pendekatan umum, yaitu: Nonstatistik dan Statistik.

Kedua pendekatan tersebut mewajibkan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya atas suatu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta menghubungkan sampel bukti audit lain kedalam kesimpulan saldo akun atau kelompok transaksi berkaitan. Kedua pendekatan digunakan audit, karena tidak ada jaminan di antara keduanya lebih baik dari yang lain. *Sampling* dipergunakan sebagai menginferensi karakteristik populasi. Keuntungan dari *sampling* itu sendiri adalah:

1. Menghemat sumber daya: biaya, waktu, tenaga.
2. Kecepatan mendapatkan informasi (*update*).
3. Ruang lingkup (cakupan) lebih luas.
4. Data/informasi yang diperoleh lebih teliti dan mendalam.
5. Pekerjaan lapangan lebih mudah dibanding cara sensus.

Dalam pelaksanaan, auditor memahami letak saldo akun dan transaksi yang mungkin memiliki salah saji. Auditor memberikan pertimbangan pengetahuan pada perencanaan prosedur auditnya, meliputi *sampling* audit. *Sampling* audit diterapkan untuk melaksanakan uji pengendalian, maupun pengujian substantif. Namun demikian, auditor tidak menerapkan *sampling* audit dalam prosedur pengujian berupa pengajuan pertanyaan dan tanya jawab, observasi, dan prosedur analitis. *Sampling* audit banyak diterapkan auditor pada waktu prosedur pengujian berupa *vouching*, *tracing*, dan konfirmasi. *Sampling* audit jika diterapkan semestinya dapat menghasilkan bukti audit cukup, sesuai yang diinginkan standar pekerjaan lapangan yang ketiga.

A. Tahapan *Sampling* Audit

Berikut langkah *sampling* yang dibagi dalam enam tahap:

1. Menyusun Rencana Audit

Kegiatan *sampling* audit diawali dengan penyusunan rencana audit. Pada tahap ini ditetapkan:

- a. **Jenis pengujian** yang dilakukan dengan menentukan jenis *sampling*. Pada ujian pengendalian digunakan *sampling* atribut, dan pada pengujian substantif digunakan *sampling* variabel.
- b. **Tujuan pengujian**, pada pengujian pengendalian sebagai wadah penelitian derajat keandalan pengendalian, sedangkan pengujian substantif untuk meneliti kewajaran nilai informasi kuantitatif.
- c. **Populasi yang diteliti**, sesuai jenis dan tujuan pengujian akan dilakukan.
- d. **Asumsi-asumsi**, khusus penentuan unit sampel dan pem-

buatan kesimpulan hasil audit, seperti tingkat keandalan, toleransi kesalahan, dll.

2. Menetapkan Jumlah/Unit Sampel

Auditor apabila menggunakan metode *sampling* statistik, maka unit sampel ditetapkan melalui rumus/formula statistik yang sesuai jenis *sampling*. Pada tahap ini hasilnya pernyataan jumlah unit sampel yang diuji pada populasi objek penelitian.

3. Memilih Sampel

Pemilihan sampel dari populasi yang diteliti dengan menggunakan *sampling* statistik, pemilihan sampel harus dilakukan secara acak (*random*).

4. Menguji Sampel

Pada tahap pemilihan sampel, peneliti akan memperoleh informasi sampel yang harus diteliti. Tahap berikutnya, auditor menerapkan prosedur audit atas sampel. Yang kemudian hasilnya, auditor mendapatkan informasi mengenai keadaan sampel tersebut.

5. Mengestimasi Keadaan Populasi

Auditor mengevaluasi hasil *sampling* untuk membuat estimasi keadaan populasi. Misalnya estimasi tingkat penyimpangan/kesalahan, estimasi nilai interval populasi, dan sebagainya.

6. Membuat Simpulan Hasil Audit

Berdasarkan estimasi kondisi populasi, auditor melakukan simpulan hasil audit. Biasanya hasil simpulan audit dengan perhatian dan perbandingan derajat kesalahan populasi atas batas kesalahan yang ditolerir auditor. Jika kesalahan dalam populasi masih pada batas toleransi, mengartikan populasi dipercaya. Sebaliknya, jika kesalahan populasi melebihi batas toleransi, populasi tidak dapat dipercaya.

B. *Sampling* Audit Statistik dan Non Statistik

Terdapat dua pendekatan umum *sampling* audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang memadai yaitu *Sampling* statistik dan *Sampling* non statistik.

1. *Sampling Statistik*

Halim (2008) menyatakan *sampling statistik* adalah penggunaan rencana *sampling* (*sampling plan*) sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat *statement* tentang populasi. Dua syarat yang wajib dipenuhi supaya prosedur audit bisa dikategorikan sebagai *sampling statistik*. Pertama, sampel harus dipilih random. Random dalam hal ini merupakan lawan *arbitrari* atau *judgmental*. Seleksi random menawarkan kesempatan sampel tidak bias. Kedua, hasil sampel dievaluasi secara matematis. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka tidak dapat sebagai *sampling statistik*. Berikut digambarkan tipe *sampling* audit syarat pengkategorian tipe-tipe tersebut.

Tabel 11.1. Tipe *Sampling Audit*.

No	<i>Types of Audit Sampling</i>	<i>Sample Selection</i>	<i>Sample Evaluation</i>
1	<i>100 percent</i>	<i>Key items</i>	<i>Conclusive</i>
2	<i>Judgement Sample</i>	<i>Judgmental</i>	<i>Judgmental</i>
3	<i>Representative Sample</i>	<i>Random</i>	<i>Judgmental</i>
4	<i>Statistical Sample</i>	<i>Random</i>	<i>Mathematical</i>

Sumber: Halim, 2008.

Untuk memilih sampel secara random ada beberapa metode yang bisa digunakan:

a. *Simple Random Sampling.*

Pemilihan random digunakan untuk memastikan setiap elemen populasi mempunyai peluang sama dalam pemilihan. Tabel bilangan acak dipakai untuk mencapai kerandoman (*randomness*).

b. *Stratified Random Sampling.*

Membagi populasi dalam kelompok-kelompok (*grup/stratum*) dan kemudian melaksanakan pemilihan secara *random* untuk tiap kelompok. Kelebihan metode ini, yang pertama, pemilihan sampel dihubungkan dengan item kunci, serta menggunakan teknik audit beda bagi tiap *stratum*. Kedua, stratifikasi yang menaikkan reliabilitas sampel dan mengurangi

besarannya sampel (*sample size*) dibutuhkan. Jika sampel homogen dikelompokkan maka keefektifan dan keefisienan sampel bisa ditingkatkan.

c. *Systematic Sampling*.

Menggunakan random *start point* kemudian memilih tiap populasi. Kelebihan metode ini penggunaannya mudah. Namun masalahnya adalah masih timbul sampel yang bias.

d. *Sampling Probability Proportional to Size (Dollar Unit Sampling)*.

Memilih sampel secara random maka probabilitas terkait dengan nilai (*size*). Dengan metode ini unit nilai tercatatnya besar secara proporsional dapat memiliki lebih banyak kesempatan terpilih dari unit nilai tercatatnya kecil.

2. *Sampling Non Statistik*

Sampling non statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subyektif berdasarkan pengalaman auditor. Randol (2011) mendefinisikan *sampling* yang sampelnya dipilih subyektif, hingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasilnya tidak dievaluasi matematis. Ada beberapa metode pemilihan sampel yang dikategorikan dalam *sampling non statistik*, sebagai berikut:

a. *Haphazard sampling*. Auditor memilih sampel yang representatif terhadap populasi berdasar *judgement* individu tanpa *perandom probabilistik* (semacam tabel bilangan *random*). Untuk menghindari bias, sampel dipilih tanpa memperhatikan ukuran, sumber, atau ciri-ciri khas lainnya (Arens dkk, 2003). Tetapi kelemahan utama metode ini adalah kesulitan untuk benar-benar menghilangkan bias pemilihan.

b. *Block sampling*. Menggunakan seleksi satu atau lebih kelompok elemen populasi berurut. Bila satu item dalam blok terpilih maka secara berurut item-item berikutnya dalam blok akan terpilih otomatis. Metode ini secara teoritis adalah metode pemilihan sampel yang representatif namun jarang dipakai disebabkan tidak efisien. Waktu dan biaya untuk

memilih sampel yang memadai agar representatif terhadap populasi sangat mahal.

- c. **Systematic sampling.** Menggunakan *start point* ditentukan *judgement* kemudian memilih elemen *populasi ke n*. Sampel dipilih berdasar interval dari pembagian unit populasi jumlah sampel.
- d. **Directed sampling.** Menggunakan seleksi *judgement* elemen bernilai (*high value*) ataupun elemen yang diyakini *error*. Auditor tidak mendasar pemilihan kesempatan sama (probabilistik), namun lebih berdasarkan kriteria. Kriteria yang biasa digunakan adalah:
 - 1) Item-item yang paling mungkin mengandung salah saji.
 - 2) Item-item yang memiliki karakteristik populasi tertentu.
 - 3) Item yang mempunyai nilai tinggi (*large dollar coverage*).

Judgement atau *sampling* non statistik dikritik karena berlebihan mengandalkan intuisi dan sering irasional faktor-faktor subyektif. Misalnya reaksi personal auditor terhadap karyawan klien, proses pengadilan, dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan penugasan bisa sangat mempengaruhi ukuran sampel. Terlepas kemungkinan hal-hal tersebut, *sampling* non statistik akan seefektif *sampling* statistik. Banyak situasi yang membuat *judgement sampling* lebih sesuai dari pada *sampling* statistik.

C. *Sampling* dan Risiko Audit

Ketidakpastian dalam penerapan prosedur audit disebut risiko audit. Risiko audit yakni risiko dalam auditor, tanpa memodifikasi pendapatnya atas suatu laporan keuangan mencakup salah saji material.

Dengan pertimbangan profesional, auditor menilai faktor penentuan risiko bawaan dan risiko pengendalian (menentukan risiko pengendalian rendah daripada tingkat maksimum menuntut pelaksana pengujian atas pengendalian), dan melakukan pengujian substantif (prosedur analitik dan pengujian atas rincian saldo-saldo akun atau kelompok transaksi) membatasi risiko deteksi.

Risiko audit ketidakpastian disebabkan oleh *sampling* dan ketidakpastian disebabkan oleh faktor-faktor selain *sampling*. Risiko *sampling*, jika pengujian pengendalian atau pengujian substantif terbatas atas sampel, kesimpulan auditor menjadi lain jika cara pengujian sama diterapkan terhadap semua unsur saldo akun atas kelompok transaksi. Dengan pengertian, suatu sampel tertentu mungkin mengandung salah saji moneter atau penyimpangan dari pengendalian yang telah ditetapkan, secara proporsional lebih besar atau kurang dalam saldo akun atau kelompok transaksi secara keseluruhan.

Risiko nonsampling meliputi aspek risiko audit yang tidak berkaitan dengan *sampling*. Seorang auditor menerapkan prosedur audit terhadap transaksi atau saldo dan gagal mendeteksi salah saji material. Risiko nonsampling mencakup kemungkinan pemilihan prosedur audit yang tidak semestinya mencapai tujuan audit tertentu. Sebagai contohnya, pengiriman surat konfirmasi piutang tercatat tidak diandalkan untuk menemukan piutang yang tidak tercatat. Risiko nonsampling muncul karena auditor gagal mengenali salah saji dokumen yang diperiksanya, membuat prosedur audit menjadi tidak efektif walaupun telah memeriksa semua data.

Jenis Pengujian Audit yang Mungkin Memerlukan Sampling

1. Pengujian pengendalian.
2. Pengujian substantif atas transaksi.
3. Pengujian atas rincian saldo.

Perbedaan utama antara pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan pengujian atas rincian saldo terletak pada apa yang ingin diukur oleh auditor.

D. Jenis *Statistical Sampling*

Ada dua macam teknik *sampling* statistik, yaitu:

1. *Attribute Sampling*

Teknik ini digunakan dalam pengujian pengendalian. Kegunaannya untuk memperkirakan tingkat deviasi atau pe-

nyimpangan dari pengendalian yang ditentukan dalam populasi.

2. *Variables Sampling*

Teknik ini digunakan dalam pengujian substantif. Kegunaan *variables sampling* untuk memperkirakan jumlah rupiah total dari populasi atau jumlah.

E. *Risiko Sampling*

Auditor harus menerapkan pertimbangan profesional dalam menentukan risiko *sampling*. Dalam menyelenggarakan pengujian substantif atas rincian, auditor memperhatikan dua aspek dari risiko *sampling*:

1. Risiko keliru menerima (*Risk of Incorrect Acceptance*), adalah risiko mengambil kesimpulan, berdasarkan hasil sampel, yang menyatakan saldo akun tidak mengisikan salah saji secara material, padahal kenyataannya saldo akun telah salah saji secara material.
2. Risiko keliru menolak (*Risk of Incorrect Rejection*), yaitu risiko yang mengambil kesimpulan dari hasil sampel, bahwa saldo akun berisi salah saji bermaterial, padahal kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji secara material.

Auditor juga memperhatikan dua aspek risiko *sampling* dalam menyelenggarakan pengujian pengendalian jika ia menggunakan *sampling*:

1. Risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah (*Risk of Assessing Control Risk Too Low*), ialah risiko penentuan tingkat risiko pengendalian, atas hasil sample, terlalu rendah dibandingkan dengan efektivitas operasi pengendalian sesungguhnya.
2. Risiko penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu tinggi (*Risk of Assessing Control Risk Too High*), yakni risiko menentukan tingkat risiko pengendalian berdasarkan hasil sample, yang terlalu tinggi dibanding efektivitas operasi pengendalian yang sesungguhnya.

Risiko keliru menolak dan risiko penentuan tingkat pengendalian yang terlalu tinggi, berkaitan dengan efisiensi audit. Contohnya, jika penilaian auditor sampel audit menuntun kesimpulan awal yang keliru suatu saldo salah saji material, padahal kenyataannya tidak demikian, maka penerapan prosedur tambahan dan pertimbangan atas bukti-bukti audit akan menuntun auditor ke kesimpulan yang benar. Sama halnya, penilaian auditor sampel menuntunnya pada tingkat risiko pengendalian tinggi, jadi biasanya auditor memperluas lingkup pengujian substantif sebagai kompensasi anggapan-nya yang ketidakefektifan pengendalian. Walaupun audit dalam pelaksanaannya kurang efisien dalam kondisi tersebut, namun tetap efektif.

Risiko keliru menerima dan penentuan tingkat risiko pengendalian yang terlalu rendah, berkaitan dengan efektivitas audit dalam pendeteksian ada atau tidaknya salah saji yang bersifat material.

F. Teknik *Sampling* Statistik

Jenis tehnik *sampling* statistik, yaitu: *sampling* atribut dan *sampling* variabel serta tehnik gabungan antara keduanya.

1. *Sampling* Atribut

Sampling atribut suatu metode untuk melakukan perkiraan dan estimasi terhadap bagian populasi yang mengandung karakter atau atribut tertentu. *Sampling* ini prioritas digunakan dalam pengujian-pengujian pengendalian intern. *Sampling* atribut membuat kesimpulan mengenai tingkat kejadian di populasi, dan biasa untuk menguji tingkat ketaatan prosedur di dalam populasi.

Sebagaimana misalnya auditor ingin menentukan prosentase banyaknya bukti pembayaran namun tidak didukung dengan bukti tertentu atau tidak diotorisasi pejabat yang berwenang. Untuk menguji pengendalian intern itu auditor akan menggunakan salah satu dari tiga metode *sampling*, mencakup estimasi atribut (*sampling fixed-sample-size*), *sampling* sekuensial (*sampling* atribut keputusan atau *stop or go sampling*) dan *sampling* temuan (*discovery sampling*). Langkah-langkah dalam *sampling* atribut:

- a) Tentukan tujuan pengujian yang hendak dilakukan oleh auditor.
- b) Definisikan populasi dan satuan atau unit *samplingnya*.
- c) Definisikan atribut yang menjadi objek pengukuran dan apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan.
- d) Tentukan tingkat kesalahan tertinggi yang dapat ditolelir.
- e) Buat estimasi atau perkiraan mengenai tingkat penyimpangan di dalam populasi, yaitu jumlah penyimpangan di dalam sampel dibagi dengan besarnya sampel.
- f) Tentukan tingkat keyakinan, biasanya dalam presentase.
- g) Tentukan besarnya sampel.
- h) Pilih sampel secara acak.
- i) Lakukan prosedur audit.
- j) Lakukan evaluasi hasil audit sampel pada langkah 9.

2. *Sampling* Variabel

Sampling variable untuk melakukan perkiraan (estimasi) terhadap nilai asli dari saldo suatu akun atau menentukan besaran nilai kesalahan. *Sampling* terutama digunakan pengujian substantif guna menentukan tingkat andalannya jumlah akun, dan dilakukan dengan salah satu dari beberapa metode sebagai berikut: (1) estimasi satuan nilai tengah, (2) estimasi selisih, (3) estimasi perbandingan, dan (4) estimasi regresi.

Keempat metode ini dapat dilaksanakan melalui stratifikasi atau tanpa stratifikasi. *Sampling* stratifikasi adalah metode *sampling* yang membagikan populasi menjadi dua atau lebih sub disebut istilah strata, dan kemudian sampel dipilih masing-masing strata, jadi tiap-tiap strata ini selanjutnya diaudit secara terpisah.

Pada umumnya *sampling* variabel dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam pengujian substantif, yang dimaksudkan untuk menentukan kewajaran nilai buku suatu akun.
- b) Untuk membuat estimasi mengenai nilai saldo suatu akun atau suatu kelas tertentu dari transaksi-transaksi yang

berkaitan seperti taksiran saldo piutang atau taksiran total penjualan untuk suatu periode tertentu.

Secara lebih spesifik *sampling variable* ini dapat diterapkan oleh auditor untuk melakukan pekerjaan audit berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pengujian akun piutang.
- b) Pengujian jumlah kuantitas, harga dan nilai persediaan.
- c) Penggantian metode penilaian persediaan dari metode FIFO ke LIFO.
- d) Pengujian jumlah penambahan aktiva tetap.
- e) Pengujian terhadap transaksi-transaksi untuk menentukan besarnya nilai transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai.

Meskipun banyak yang bersifat kuantitatif dalam cakupan *sampling* variabel, metode ini hanya digunakan apabila estimasi penyimpangan baku dari populasi dapat diketahui. Disamping itu, *sampling* ini juga bergantung pada karakteristik atau sifat-sifat statistik distribusi normal. Selain pengklasifikasian berupa *sampling* variabel tanpa stratifikasi dan *sampling* variabel dengan stratifikasi, *sampling* variabel dan biasanya dikategorikan menjadi empat metode sebagai berikut: (1) estimasi satuan nilai tengah, (2) estimasi selisih, (3) estimasi perbandingan, dan (4) estimasi regresi.

Langkah-langkah dalam *sampling* variabel:

- a) Tentukan tujuan pengujian yang hendak dilakukan oleh auditor.
- b) Definisikan populasi dan satuan unit *sampling*-nya.
- c) Definisikan atau tentukan tingkat keyakinan.
- d) Estimasi tingkat kesalahan tertinggi yang dapat ditolelir.
- e) Tentukan besarnya risiko alfa dan risiko beta.
- f) Pilih dan perikwasampel pendhuluan secara acak.
- g) Perhatikan variasi di dalam populasi.
- h) Tentukan besarnya sampel .
- i) Pilih dan periksa sampel tambahan.

- j) Lakukan prosedur audit.
- k) Buat estimasi mengenai nilai akun atau nilai total populasi.
- l) Hitung rengtang keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel.
- m) Buat kesimpulan secara menyeluru mengenai hasil pemeriksaan sampel.

3. *Monetary Unit Sampling*

Metode ini merupakan gabungan dari *sampling* atribut dan *sampling* variabel atau modifikasi dari *sampling* atribut, yaitu *sampling* atribut yang digunakan untuk menyatakan suatu kesimpulan tentang nilai yang sebenarnya dari saldo suatu akun atau untuk menentukan besarnya nilai suatu kesalahan

Langkah-langkah audit dalam *sampling monetary unit sampling*, sebagai berikut:

- a) Tentukan tujuan pengujian yang hendak dilakukan oleh auditor
- b) Definisikan populasi dan satuan atau unit *sampling*-nya
- c) Estimasi tingkat kesalahan tertinggi yang dapat ditolelir
- d) Tentukan besarnya sampel dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Risiko data yang dapat diterima.
 - 2) Tingkat kesalahan yang dapat ditolelir.
 - 3) Perkiraan mengenai tingkat penyimpangan dalam populasi, apakah kesalahannya 100% atau kurang.
- e) Pilih sampel secara acak, secara sistematis atau dengan bantuan computer.
- f) Lakukan prosedur audit.
- g) Evaluasi hasil audit sampel dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Apakah tidak ada kesalahan yang dijumpai.
 - 2) Apakah kesalahan yang dijumpai 100%.
 - 3) Apakah kesalahan yang dijumpai kurang dari 100%.
 - 4) Aspek-aspek kualitatif dari penyimpangan tersebut.
 - 5) Aspek-aspek kuantitatif dari penyimpangan tersebut.

- h) Buat kesimpulan secara menyeluruh mengenai pengendalian intern atau pengujian yang dilakukan.

Ada beberapa unsur-unsur dapat mempengaruhi hasil sampling, yang mempengaruhi unit sampel, yaitu:

1. **Unit populasi.** Unit populasi adalah banyaknya satuan anggota populasi. Misalnya kita melakukan audit atas mutasi pengeluaran kas tahun 2001 yang terdiri atas 3.500 kuitansi dengan nilai Rp 800 juta.
2. **Standar deviasi.** Standar deviasi adalah angka yang menunjukkan jarak antara nilai rata-rata populasi dengan para anggota secara umum sekaligus menunjukkan tingkat heterogenitas/homogenitas data dalam populasi.

$$\text{Standar Deviasi} = \sigma = \sqrt{\Sigma (X_i - \mu)^2 / N}$$

3. **Tingkat keyakinan atau keandalan.** Tingkat keyakinan adalah derajat keandalan sampel terhadap populasi yang diwakilinya, ditunjukkan oleh perkiraan persentase banyaknya populasi yang terwakili oleh sampel.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Sampling Audit*
- Rencana *Sampling*
- *Sampling Attribute*
- Unit Sampel
- *Sampling Statistik dan Nonstatistik*
- Risiko Audit
- *Variable Sampling*
- Risiko *Sampling*
- *Risk of Assessing Control Too Low*
- *Risk of Assessing Control Too High*
- *Different Estimation*
- *Monetary Unit Sampling*
- Keyakinan dan Keandalan

CONTOH SOAL

1. Apa tujuan auditor menerapkan teknik *sampling* pada pengujian pengendalian?
2. Dalam menerapkan metode *sampling*, hal apa yang menjadi bahan pengambilan simpulan terhadap suatu populasi?
3. Apabila auditor menginginkan hasil *sampling* yang andal, maka auditor harus mengupayakan?
4. Sampel yang representatif merupakan keharusan dalam penggunaan metode *sampling*. Sampel dianggap representatif apabila:
 - a. Jumlahnya minimal 10% dari total populasi
 - b. Jumlahnya 100% dari total populasi
 - c. Dapat mewakili anggota populasi
 - d. Kesalahan *sampling* yang dihasilkan besar. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut?
5. Banyak sedikitnya jumlah sampel yang akan dipilih tergantung dari jumlah unit populasi. Semakin banyak anggota populasi maka jumlah sampel akan:
 - a. Semakin banyak
 - b. Semakin sedikit
 - c. Tidak berubah
 - d. Menjadi nol.Jelaskan maksud pernyataan tersebut!



BAB XII

FRAUD AUDITING

A. Gambaran Umum *Fraud*

Pengertian kecurangan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (PSA No.70 seksi 316.2 paragraf (4) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.

Arens (2014) menyatakan definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut: suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menipu atau membohongi, sebuah metode atau cara yang tidak dilakukan secara jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak kepemilikan orang lain yang sah, baik karena suatu perbuatan atau akibat yang fatal dari perbuatan itu sendiri. Lebih lanjut Arens (2014) menyatakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan atas laporan keuangan, *fraud* didefinisikan sebagai *an*

intentional misstatement of financial statements atau salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan.

Fraud adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidak jujuran. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi (Rezaee and Riley, 2010).

Defini lain *Fraud* adalah segala bentuk perbuatan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan dalam bentuk dari *fraudulent financial statement*, *missappropriation asset*, dan *corruption* yang memunculkan risiko keuangan dalam lembaga (Arens, 2014; IIA, 2013; ACFE 2014; Belkaoui, 2004; Singleton and Singleton, 2010; Rahmatika, 2020).

Kecurangan (*fraud*) dibedakan dengan kesalahan (*errors*). Kesalahan dideskripsikan sebagai "*Unintentional Mistakes*" (kesalahan tidak di sengaja). Kesalahan terjadi pada tahapan pengelolaan transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengikhtisaran proses dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dalam banyak bentuk matematis. Kritisal, atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Apabila kesalahan di sengaja, maka kesalahan merupakan kecurangan (*fraudulent*). Istilah "*irregularly*" merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan.

Menurut Halim (2018), secara umum unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah:

1. Harus terdapat pernyataan yang menyesatkan (*misrepresentation*).
2. Mencakup suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*).
3. Fakta bersifat material (*material fact*).
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*).
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi.

6. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*).
7. Ada pihak yang merugikan (*detriment*).

B. Tipologi *Fraud*

Menurut ACFE (2014), *Fraud* dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi besar berdasarkan perbuatan yaitu antara lain

1. Penyimpangan atas aset (*asset missappropriation*)

Asset Missappropriation merupakan penyalahgunaan, penggelapan atau pencurian aset atau harta perusahaan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. *Fraud* jenis ini merupakan jenis kecurangan yang sifatnya berwujud (*tangible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*). Biasanya *Asset Missappropriation* identik dengan jenis *employee fraud* karena mayoritas pelaku memang berada pada pihak dalam perusahaan atau kedudukan sebagai karyawan perusahaan.

2. Pernyataan dibuat salah atau menipu (*fraudulent statement*)

Laporan yang menyesatkan (*Fraudulent Statement*) merupakan bentuk dari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap hasil atau pengungkapan yang nilainya material yang bertujuan untuk menipu pengguna laporan keuangan, dengan melaporkan laba atau aset lainnya lebih tinggi dari yang sebenarnya (Arens., 2014; Belkaoui, 2004:61). *Fraudulent statement* merupakan jenis *fraud* yang digolongkan kedalam tindakan yang biasanya dilakukan oleh pihak manajemen, pejabat eksekutif dan/atau manajer senior dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*). *Fraudulent statement* bisa dianalogikan dengan istilah *window dressing*, *accounting gimmicks* (tipu muslihat akuntansi), *illegal earning management* (manajemen laba yang tidak sah), *income smoothing* (perataan laba) dan sebagainya.

3. Korupsi (*corruption*)

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain atau

kolusi dengan cara kerja sama yang terstruktur sehingga menghasilkan simbiosis mutualisme antara pihak-pihak yang bekerja sama. Menurut ACFE (2014), Korupsi dibagi menjadi empat klasifikasi:

1) Suap (*Bribery*)

Red Flag yang berhubungan dengan penyuapan antara lain: perubahan *life style* dari pegawai, terdapat hubungan antara vendor dengan pegawai, pemisahan tugas yang lemah antara menyetujui vendor dengan invoice (Singleton and Singleton, 2010).

2) Pemerasan Ekonomi (*Economic Extortion*)

Secara umum pemerasan ekonomi merupakan kebalikan dari penyuapan. Karyawan meminta kepada vendor sejumlah uang agar disetujui kontrak dan *invoice*-nya. *Red Flag* yang berhubungan dengan pemerasan ekonomi sama dengan penyuapan (Singleton and Singleton, 2010).

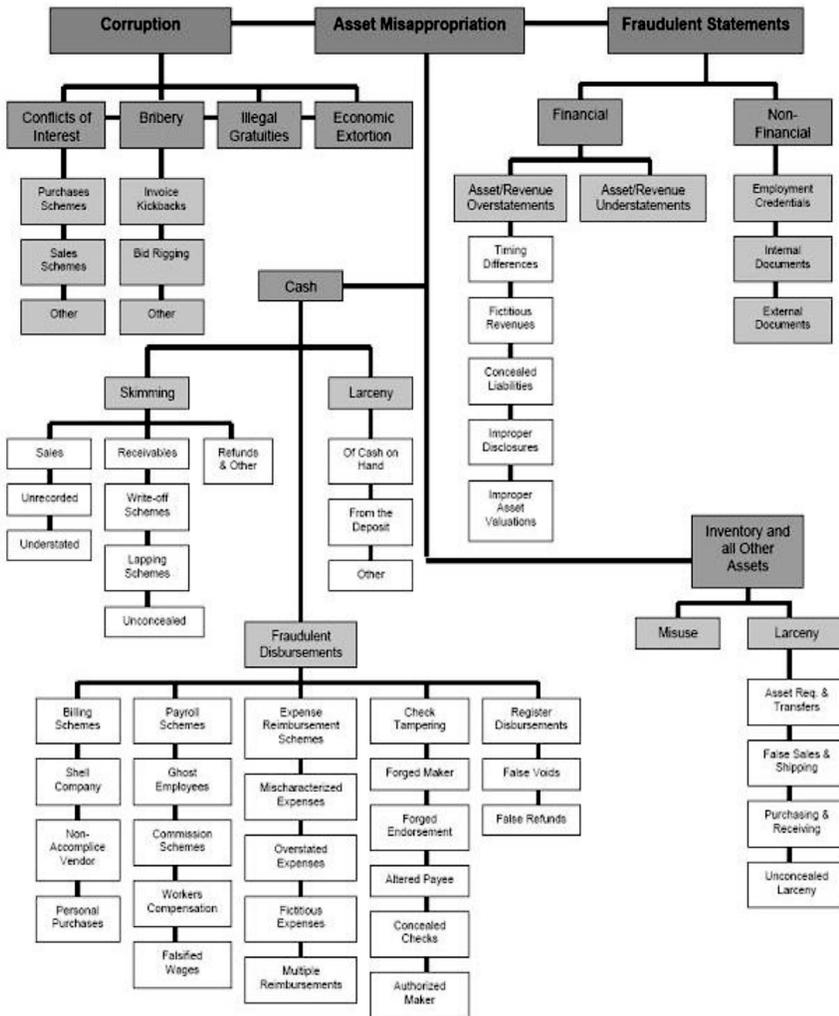
3) Gratifikasi ilegal (*Illegal Gratitudes*)

Red Flag Gratifikasi ilegal hamper sama dengan suap atau pemerasan ekonomi. Terdapat perubahan *life style* dari pegawai dan terdapatnya hubungan yang tidak biasa antara vendor dengan pegawai (Singleton and Singleton, 2010).

4) Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Red Flag yang berhubungan dengan konflik kepentingan antara lain: volume transaksi yang besar dengan vendor tertentu, Terdapat hubungan antara pegawai dengan pihak ketiga yang tidak diketahui, Ketidakjelasan pembagian tugas dalam menangani kontrak dan menyetujui invoice (Singleton and Singleton, 2010).

Fraud Auditing



Gambar 12.1. *Fraud Tree.*

Sumber: ACFE (2014)

C. Jenis-Jenis *Fraud*

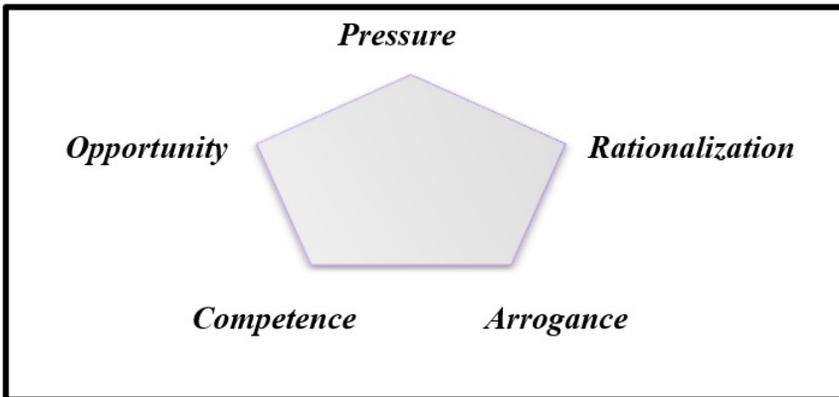
Menurut berbagai sumber penggolongan jenis *fraud* dapat dibedakan antara lain Arens et al., (2014); Albercht and Albrecht, (2011); Weirich et al., (2010:199); Belkaoui, (2004:61)

1. **Berdasarkan letak pelaku di entitas** yaitu:
 - a. *Fraud* oleh pihak internal entitas.
 - b. *Fraud* oleh pihak eksternal entitas.
 - c. *Fraud* oleh pihak internal dan eksternal entitas.
2. **Berdasarkan korbanya**, *fraud* menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. *Fraud* terhadap entitas (*fraud against organization*).
 - b. *Fraud* oleh entitas (*fraud by organization*).
3. **Berdasarkan jenis industrinya**, *fraud* dikenal dengan istilah:
 - a. *Banking fraud*.
 - b. *Credit card fraud*.
 - c. *Insurance fraud*.
 - d. *Securities fraud*, dan
 - e. *Tax fraud*.
4. Berdasarkan pencatatan, *fraud* dikelompokkan menjadi:
 - a. *Fraud* yang dapat dilihat atau ditelusuri pada pembukuan, data dan catatan akuntansi (*fraud open on-the books*).
 - b. *Fraud* yang tersembunyi diantara catatan akuntansi (*fraud hidden on-the books*).
 - c. *Fraud* yang tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat dideteksi melalui pembukuan akuntansi (*fraud off-the books*).
5. **Berdasarkan frekuensi terjadinya**, *fraud* dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Tidak berulang (*non-repeating fraud*).
 - b. Berulang (*repeating fraud*) sehingga menjadi kebiasaan.
6. **Berdasarkan jenis pelaku**, *fraud* dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:
 - a. *Employee fraud*, penipuan yang dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan mengambil aset kas, persediaan dll secara ilegal sehingga pemberi kerja merasa dirugikan
 - b. *Management fraud*, penipuan yang biasanya disebut dengan skandal akuntansi yaitu dilakukan oleh manajer puncak dengan cara memanipulasi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

- c. *Investment Scams*, penipuan terkait dengan aktivitas investasi yang sebenarnya tidak memiliki nilai lalu ditawarkan dan dijual kepada investor.
- d. *Vendor fraud*, merupakan penipuan yang dilakukan oleh vendor utama maupun vendor dengan pegawai perusahaan agar dari persekongkolan itu didapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan.
- e. *Customer fraud*, penipuan yang dilakukan oleh pelanggan dengan modus mencari kepercayaan terlebih dahulu kepada perusahaan kemudian setelah mendapat kepercayaan lalu mereka menghilangkan diri setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biasanya berkaitan dengan pembayaran tagihan yang menunggak atau tidak mau melunasi utangnya.

D. Faktor-Faktor Pemicu *Fraud*

Perkembangan teori penyebab terjadinya *fraud* telah mengalami perkembangan, dari *fraud triangle* menjadi *fraud pentagon* dengan *risk factor* dikembangkan menjadi 5 (lima):



Gambar 12.2 *Fraud Pentagon Theory*.

Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Jonathan Marks yang menjadi partner dalam *Fraud and Ethics Practice* di Crowe H LLP tahun 2011. Berikut ini faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*:

1. ***Pressure***

Pressure atau tekanan merupakan motivasi/dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Pada umumnya Motivasi/dorongan timbul akibat dari tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial yang mendesak sehingga seseorang tergiur untuk melakukan penggelapan atau kecurangan.

2. ***Opportunity***

Opportunity atau peluang merupakan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan atau *fraud*. Pada dasarnya ada dua faktor yang dapat menimbulkan peluang seseorang untuk berbuat kecurangan (*fraud*) yaitu lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan dan *good corporate governance* atau tata kelola yang buruk.

3. ***Rationalization***

Rationalization atau rasionalisasi merupakan suatu sikap yang menganggap bahwa yang seseorang lakukan adalah bukan perbuatan yang salah. Pelaku akan mencari pembenaran atas apa yang akan mereka lakukan untuk tetap mempertahankan jati dirinya yang berstatus sebagai orang yang dipercaya.

4. ***Competence***

Competence atau kemampuan merupakan bentuk keahlian dari seseorang dalam memanfaatkan situasi dan kondisi pengendalian internal yang lemah untuk melakukan tindakan penyimpangan. Pelaku *fraud* dikatakan mempunyai keahlian atau kemampuan jika mampu mempengaruhi seseorang dengan mudah untuk terlibat, mampu berbohong dengan efektif dan dapat mengontrol emosi dengan baik pada saat dilakukan investigasi.

5. ***Arrogance***

Arrogance atau Arogansi adalah sikap sombong dan angkuh yang dimiliki seseorang serta berkeyakinan bahwa tindakan kecurangan yang telah dilakukan tidak akan diketahui dan aturan hukum yang dibuat tidak akan menjeratnya. *Arrogance* biasanya muncul karena sifat mementingkan diri sendiri, semakin besar muncul sifat tersebut maka arogansi seseorang akan semakin besar.

E. Pendeteksian *Fraud*

1. Deteksi Kecurangan

Mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Cepat atau lambatnya pendeteksian bergantung pada (Mulyadi, 2002):

- a. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiiasi sistem atau menutup celah dari praktek kecurangannya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak kecurangan.
- b. Faktor ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit bebrbasis risiko (*risk based audit*) dan membangun Jaringan Informan (*Audit Intelligence*) dengan tetap bersikap hati-hati.

2. Audit Berbasis Risiko (*Risk-based Audit*) untuk Deteksi Kecurangan

Audit berbasis risiko dalam konteks mendeteksi tindak kecurangan adalah: “rangkaian aktivitas pengawasan yang terencana, dan berkesinambungan dalam rangka memetakan, mengamati, memverifikasi dan menganalisis semua titik-titik kritis risiko (*critical risk points*) yang berpotensi menimbulkan tindak kecurangan”.

Langkah langkah mengaudit dengan tujuan deteksi kecurangan, yaitu:

- a. **Pemetaan (*Mapping*)** dengan mengidentifikasi titik-titik kritis risiko terjadinya tindak kecurangan. Misal pemetaan kriteria keuangan, masukan (khususnya keluhan) dari berbagai pihak, hingga riwayat kasus yang pernah terjadi.
- b. **Pengamatan (*Observing*)** dengan memperdalam semua titik risiko berdasarkan situasi aktual di lapangan. Caranya dengan mewawancarai pihak-pihak terkait tentang kendala/masalah aktual. Jika terjadi resistensi, membangun jaringan informan (*Audit Intelligence*) merupakan hal yang sangat penting.

- c. **Verifikasi Transaksi dan Analisis Data (*Verifying and Analyzing*)** bertujuan untuk mempertegas kesimpulan bahwa tindak kecurangan mungkin ada atau rawan terjadi.

**Tabel 12.1 .
Praktek Kecurangan dan Dalih Berdasarkan Sistem.**

Praktek Kecurangan	Dalih berdasarkan Sistem
Transaksi bisnis yang didasari pengajuan secara “potong kompas”, yaitu meminta persetujuan kepada pemegang otoritas yang lebih tinggi.	Merasa jauh lebih sah daripada sekedar persetujuan dari pejabat di bawahnya sebagaimana ditentukan oleh sistem.
Transaksi bisnis (pembelian barang, pengeluaran biaya, dan lain-lain) atas order yang dikondisikan sebagai “ASAP” (<i>As Soon As Possible</i>).	Merasa Prosedur/Kebijakan hanya berlaku bagi transaksi reguler dan situasi normatif, tidak berlaku dalam situasi “ <i>last minutes</i> ”.
Transaksi yang didasarkan pada kriteria atau disposisi khusus yang diarahkan kepada Vendor/ <i>Supplier</i> tertentu saja.	Merasa Kriteria/Disposisi yang diberikan sebagai bagian dari Otoritas yang dimiliki, tidak menyalahi Prosedur/Kebijakan yang tidak mengatur detail terkait hal itu.
Transaksi yang mengabaikan pemenuhan persyaratan hanya karena faktor kedekatan hubungan dengan pemegang otoritas (atasan, bagian keuangan/ pembelian, dan sebagainya).	Menggunakan prinsip umum yang berlaku dalam bisnis, yaitu faktor “saling percaya” (<i>trust</i>) lebih penting dari sekedar memenuhi Prosedur/Kebijakan tertulis.
Pemakaian uang atau barang untuk kepentingan pribadi yang tidak tercatat secara resmi.	Pemakaian uang/barang bukan dalam kaitannya dengan transaksi resmi perusahaan dan diasumsikan tidak berlangsung lama, sehingga tidak perlu dicatat.
Pemenuhan kewajiban keuangan yang melebihi tenggat waktu yang ditentukan.	Menggunakan pertimbangan nilai strategis pihak terutang dan konsekuensi negatif bila hal itu bisa merusak relasi yang sudah terjalin lama.

Sumber Priantara (2013); Tunggal (2012: 215).

3. Pengembangan Jaringan Informan (*Audit Intelligence*) untuk Deteksi Kecurangan

Audit intelligence adalah strategi atau upaya berkesinambungan membangun sebuah jaringan informasi aktual bagi tim audit dalam rangka menunjang aktivitas Audit berbasis Risiko (*Risk-based Audit*), khususnya untuk mengantisipasi risiko yang berdampak negatif terhadap organisasi serta untuk melakukan cegah-tangkal atas praktek tindak kecurangan.

4. Indikasi Awal

Persyaratan minimal agar dapat dikategorikan sebagai Indikasi Awal adalah adanya 2 alat bukti yang sah, yang terdiri dari:

- **Saksi** yang memiliki akses ke bukti fisik atau mengetahui langsung (bukan dari orang lain) praktek kecurangan atau terlibat langsung dalam proses tindak kecurangan.
- **Bukti Fisik** seperti bon/kwitansi transaksi dana, tanda terima barang, dokumen otentik perusahaan, data yang dikeluarkan dari sistem aplikasi perusahaan, dan sebagainya. Dengan indikasi awal tersebut auditor dapat melakukan Audit Investigasi atau langsung.

5. Audit Investigasi (*Investigative Audit*)

Audit Investigasi (*Investigative Audit*) adalah bentuk Audit Khusus (*special Audit*) berupa rangkaian penyelidikan yang bertujuan memastikan kebenaran suatu tindak kecurangan, dengan berdasarkan adanya indikasi awal.

Sebagai bagian dari Deteksi Kecurangan, sama seperti *Risk-based Audit* dan *Audit Intelligence*, *Investigative Audit* harus dijalankan dengan hati-hati sekaligus harus menjadi serangkaian proses yang cepat. Hal itu karena investigasi cenderung akan menghadapi situasi yang tidak pasti. Contoh Investigasi menggunakan indikasi awal yang belum tentu mengarah pada kecurangan yang berujung pada pemberian sanksi berat. Kerahasiaan investigasi mengalami 'kebocoran', dimana gerak-gerik tim investigasi telah diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan, yang cepat atau lambat in-

formasi itu akan sampai ke tangan para pelaku yang sedang menjadi sasaran investigasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Audit Investigasi perlu dibedakan dalam 2 tahapan:

- Pendalaman indikasi, dimana indikasi awal belum cukup untuk menyimpulkan benar tidaknya tindak kecurangan.
- Konfrontasi ke pelaku, dimana indikasi awal sudah cukup untuk mengarahkan investigasi kepada pelaku.

F. Penanganan *Fraud*

1. Penanganan Kasus (*Fraud Treatment*)

Proses Audit Investigasi menurut Priantara (2013) dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan serba cepat, biasanya akan menyisakan beberapa hal yang belum tuntas, seperti:

Tabel 12.2.
Penanganan Kasus.

Penanganan Kasus	Pemantik Keterlibatan Audit
Audit Forensik	Adanya pengaduan (Delik Aduan), hasil Audit Investigasi, ancaman dampak "sistemik" dari sebuah kasus.
Pengungkapan Fakta	Dampak "sistemik" yang memerlukan upaya korektif atau preventif yang ditangani bersama oleh banyak pihak di internal perusahaan.
Mitigasi Kerugian	Besarnya kerugian perusahaan yang harus dihitung dan harus dipertanggungjawabkan oleh (para) pelaku.
Sanksi dan Kerugian	Adanya kesan kurangnya bukti untuk penindakan, sanksi yang menimbulkan berbagai pernyataan keberatan, kasus 'terpaksa' harus dibawa ke meja hijau.

Sumber Priantara (2013).

2. Penanganan Delik Aduan dan Audit Forensik

Audit Forensik (*Forensic Audit*) adalah bentuk Audit Khusus (*Special Audit*) berupa rangkaian pendalaman materi tindak kecurangan untuk mengukur luas cakupan kasus dan kecukupan alat bukti dalam rangka mengarahkan kasus pada pemberian sanksi, atau lebih jauh lagi bertujuan mengantisipasi bila kasus kecurangan harus dibawa ke proses litigasi (ke jalur hukum).

Audit Forensik pada dasarnya juga terdiri atas aktivitas-aktivitas Audit Investigasi, dimana yang menjadi indikasi awal adalah hasil Audit Investigasi yang sudah ada. Setidaknya ada 3 alasan mengapa diperlukan Audit Forensik, yaitu:

- 1) Kemungkinan tindak kecurangan meluas ke lingkup (data, pelaku, lokasi, modus) lain atau memiliki dampak sistemik (terjadi "*system break*", korupsi berjamaah, dan sebagainya).
- 2) Kecurangan mengarah pada sanksi berat, dimana persyaratan hukum formal (khususnya kecukupan saksi dan bukti fisik) harus dipenuhi secara memadai.
- 3) Kecurangan berkonsekuensi dibawa ke jalur hukum, khususnya diajukan oleh pihak pelaku, baik berdasarkan UU Ketenagakerjaan maupun Hukum Positif (Perdata/Pidana).

3. Penanganan Implikasi Lanjutan dari Penyelesaian Kasus

Implikasi lanjutan dari penyelesaian kasus kecurangan berakibat pada beberapa pihak:

- a. Bagi kelompok yang merespons secara *open minded*, kebutuhan diatas lebih untuk pembelajaran membangun upaya preventif, dimana bentuk kecurangan yang sama mungkin bisa 'menjerat' dirinya atau terjadi di lingkungan unit kerjanya.
- b. Bagi kelompok yang merespons cenderung tendensius, kebutuhan diatas hanya sebagai bahan penilaian apakah perusahaan telah berlaku adil terhadap pelaku, yang dinilai lebih sebagai "korban" dari pembiaran adanya kelemahan sistem.

Dengan adanya beberapa kasus ini berdampak pada beberapa akibat:

- a. “Gelar Perkara” agar diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi.
- b. “Mitigasi Kerugian” yaitu upaya pencegahan kerugian yang masih berlangsung atau perhitungan kembali tingkat kerugian yang belum selesai dihitung.
- c. “Rekomendasi Sanksi” yang telah dikeluarkan oleh tim audit agar siap dievaluasi seberapa wajar hasil pemeriksaan yang dilakukan.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Fraud*
- *Errors*
- *Asset Missappropriation*
- *Fraudulent Statement*
- *Corruption*
- *Fraud Tree*
- *Fraud Pentagon Theory*
- *Pendeteksian Fraud*
- *Risk Based Audit*
- *Mapping*
- *Observing*
- *Verfying and Analzying*
- *Audit Intelligence*
- *Investigative Audit*
- *Fraud Treatment*
- *Forensic Audit*

CONTOH SOAL

1. Apakah perbedaan antara *fraud* dan *error*? Bagaimanakah indikator dalam menilai bahwa pernyataan yang salah itu termasuk *fraud* atau *error*? Jelaskan!
2. Menurut anda, jenis *fraud* manakah yang berpotensi paling sering dilakukan dan jenis *fraud* manakah yang dapat menimbulkan kerugian paling besar? Mengapa demikian, Jelaskan!
3. Bagaimana cara auditor dalam mendeteksi terjadinya *fraud*? Jelaskan secara singkat!
4. Auditor dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mengungkap adanya tindakan *fraud*. Menurut pendapat anda sejauh mana tanggung jawab auditor dalam mengungkap adanya tindakan *fraud*?
5. Faktor-faktor apa saja yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan *fraud*?



BAB XIII

AUDITING EDP

A. Definisi Auditing EDP

Perkembangan teknologi komputer dapat dilihat dengan semakin canggihnya teknologi komputer, dan semakin banyaknya produsen komputer. Bertambahnya produsen komputer dan perangkat terkait, membuat harga komputer semakin terjangkau oleh konsumen. Hal ini mendukung perkembangan sistem Pengolahan Data Elektronik (PDE) atau *Electronic Data Processing* (EDP) dengan memanfaatkan komputer, termasuk sistem pengolahan data akuntansi. Banyak perusahaan yang telah mengubah sistem akuntansi manual menjadi sistem EDP (Agoes, 2017). EDP yakni salah satu hasil atas pengembangan teknologi penting, ada empat komponen sistem EDP, yaitu:

1. Perangkat keras (*hardware*) komputer.
2. Perangkat lunak (*software*) komputer.

3. Metode pengorganisasian data.
4. Metode pemrosesan data.

B. Kelebihan dan Kelemahan Sistem EDP Dibanding Sistem Manual

- 1. Kelebihan sistem EDP terkait auditing** (Akmal dan Hadi, 2010):
 - a. Sistem EDP memberi konsistensi yang baik dalam pemrosesan data dibanding manual.
 - b. Sistem edp memberikan laporan akuntansi tepat waktu dan efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual.
 - c. Sistem EDP sebagai upaya pencegahan kesalahan penulisan dan perhitungan transaksi yang sering terjadi pada sistem manual.
- 2. Kelemahan system EDP berkaitan dengan auditing:**
 - a. Sistem EDP menghasilkan historis transaksi terbatas jika dibandingkan dengan sistem manual.
 - b. Kurangnya bukti dokumenter terkait kinerja pengendalian sistem EDP dibanding sistem manual.
 - c. Informasi pada system EDP tidak *visible* ataupun susah dipantau daripada system manual.

C. Pengendalian Intern Pada Sistem EDP

Pengendalian intern pada system EDP mencakup prosedur manual dan prosedur rancangan program komputer. Prosedur pengendalian program komputer dan manual ini terdiri atas:

1. Pengendalian umum,
2. Pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum yang merupakan pengendalian keseluruhan dapat berdampak pada lingkungan EDP. Pengendalian ini berhubungan atas keseluruhan bagian sistem EDP. Pengendalian aplikasi ialah pengendalian khusus aplikasi akuntansi, meliputi pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya.

D. Penerapan Standar Auditing Pada Sistem EDP

Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki pelatihan dan keahlian memadai sebagai auditor. Oleh karena itu, kemampuan dan pengetahuan auditor yang diperlukan tergantung pada kompleksitas sistem EDP, dan tanggung jawab auditor yang ditentukan (Agoes, 2004).

Standar pekerjaan lapangan pertama menyatakan bahwa audit harus direncanakan dengan baik termasuk audit klien dengan sistem EDP. Berkaitan dengan hal ini, maka auditor harus mempertimbangkan:

1. Luas penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi.
2. Kompleksitas operasi klien.
3. Struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer.
4. Ketersediaan data dalam *hard copy* dan *computer-readable form*.
5. Penggunaan TABK (teknik audit berbantuan komputer) untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing.

E. Pemahaman Struktur Pengendalian Intern

Bila sistem EDP digunakan secara signifikan dalam aplikasi akuntansi klien, maka auditor wajib mengumpulkan pemahaman struktur pengendalian internal EDP untuk merencanakan audit. Pemahaman tersebut harus mencakup tiga elemen yakni struktur pengendalian intern, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Auditor menilai rancangan pengendalian EDP, dan menguji apakah dijalankan dalam operasi (Arikunto, 2006).

Prosedur penghimpunan pemahaman ekstensif bila auditor menggunakan strategi audit pendekatan *lower assessed level of control risk*. Auditor menghimpun pemahaman untuk memahami :

1. Kelompok transaksi operasi entitas diproses sistem EDP yang signifikan untuk laporan keuangan.
2. Catatan akuntansi, dokumen pendukung, *machine-readable information*, dan akun khusus dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pemrosesan dan pelaporan sistem EDP.

3. Bagaimana komputer digunakan untuk memproses data.
4. Jenis salah saji potensial yang dapat terjadi.

F. Menentukan Risiko Pengendalian

Proses menentukan risiko pengendalian dalam struktur pengendalian EDP sama dengan struktur pengendalian system manual, yang meliputi (Arikunto, 2006):

1. Mengidentifikasi adanya salah saji potensial yang mungkin terjadi untuk setiap asersi.
2. Mengidentifikasi prosedur pengendalian yang perlu untuk mencagah dan mendeteksi salah saji tersebut.
3. Melaksanakan pengujian pengendalian.

Ada dua cara dalam uji pengendalian sistem EDP, yaitu:

1. Pengujian pengendalian dengan komputer atau *auditing through the computer*.
2. Pengujian pengendalian tanpa komputer atau *auditing around the computer*.

G. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)

SPAP seksi 327. Par 2 menyatakan beberapa manfaat TABK, seperti berikut:

1. Tidak terdapat sumber atau tidak adanya jejak audit, mewajibkan auditor menggunakan TABK. TABK digunakan saat melaksanakan uji substantif dan pengendalian.
2. TABK dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi prosedur audit.

Penggunaan TABK untuk pengujian pengendalian sangat dianjurkan terutama apabila ada kondisi:

1. Pengendalian intern yang signifikan built up pada program komputer.
2. Tidak ada jejak transaksi memadai.
3. Pengujian mencakup atas data yang sangat besar.

Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan auditor dalam melaksanakan prosedur audit melalui komputer atau TABK. Ketiga pendekatan tersebut meliputi:

1. *Test Data Approach*

Tujuan pada pendekatan pengujian data yaitu untuk menentukan apakah program komputer klien dapat menangani transaksi secara tepat. Pengujian mencakup pengujian kemampuan program komputer atas menolak penerimaan dan pengolahan transaksi tidak valid. Program komputer klien akan beraksi secara tepat pada jenis data yang berbeda, yaitu data yang tidak valid dan valid (Arens, 2011). Pendekatan ini hanya menguji fungsi pengendalian atas program yang diuji.

2. *Parallel Simulation Approach*

Tujuan pendekatan pengujian data yakni sebagai pengujian akurasi maupun ketepatan output yang dihasilkan sistem klien. Pada pendekatan ini, tahap pertama auditor meminta data aktual pada klien. Auditor kemudian memasukan data aktual klien. Auditor menggunakan komputer miliknya dalam mengolah data dengan program milik auditor. Setelah itu, auditor memperoleh hasil *output* komputer. Hasil *output* ini kemudian dibandingkan dengan *output* aktual klien. Pendekatan ini digunakan untuk memroses kembali data historis klien. Yaitu data sebelum tahun audit, yang dapat diuji dan diolah hasilnya.

3. *Integrated Test Facility Approach*

Pada metode ini, auditor membuat model perusahaan. Model yang merupakan abstraksi dari dunia nyata. Jadi, auditor menciptakan suatu sub sistem kecil, seperti tiruan perusahaan mini atau divisi, pada sistem EDP klien. Auditor kemudian memasukan data transaksi pengujian pada system secara bersama dengan data aktual. Data pengujian dan data actual klien diproses bersama-sama oleh sistem klien. Metode ini mempunyai kelemahan yang sangat signifikan yaitu data aktual klien dapat rusak. Kerusakan ini disebabkan dua hal. Pertama, data terhapus bersama-sama dengan data transaksi saat penghapusan data pengujian. Kedua, terdapat data pengujian yang tidak terhapus oleh auditor, misalnya karena kelalaian auditor.

H. *Auditing Around The Computer*

Selain dengan menggunakan komputer dalam pengujian pengendalian, auditor juga dapat melakukan pengujian dengan metode *auditing around the computer*. Pengujian pengendalian pada metode ini, adalah sama dengan pengujian pengendalian pada sistem manual. Cara ini digunakan apabila auditor hanya menggunakan pemahaman SPI yang tidak terkait dengan sistem EDP dalam menentukan risiko pengendalian. Auditor tidak menguji pengendalian sistem EDP klien.

Auditor harus memperoleh *audit trail* atau *transaction trail* yang jelas dan lengkap bila menggunakan metode ini. Auditor harus mempunyai akses terhadap dokumen sumber yang memadai. *Output* komputer harus dalam bentuk print out sehingga dapat dibaca auditor, *auditing around the computer* dapat dilaksanakan auditor apabila kedua hal atas dapat terpenuhi. Apabila *print out* dan dokumen sumber dapat dibaca auditor, maka auditor dapat melakukan tracing maupun *vouching*.

Teknik dan Pendekatan audit berbasis komputer, Audit disekitar komputer (*audit arround the computer*)

- Asumsi: *Output* yang benar hasilnya dari proses penginputan, sehingga proses komputer berjalan baik
- Kondisi: Telusuran audit lengkap dan tampak, operasional proses tidak kompleks dan sedikit kelengkapan dokumentasi, seperti diagram alir-data atau *flowchart* sistem tersedia.

I. *Software Audit dan Generalized Audit Software*

Auditor dapat menggunakan berbagai macam paket perangkat lunak atau *software* audit dalam melaksanakan audit. Satu jenis perangkat lunak dalam *auditing* yang umum dipakai adalah *generalized audit software*. Disamping itu, ada beberapa *software* yang dapat mendukung pelaksanaan audit, baik secara tidak langsung maupun langsung.

Generalized audit software (GAS) merupakan penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas atau prosedur pengujian audit secara independen terhadap *record* klien. *Generalized audit software*

berisi sejumlah program komputer yang bersama-sama melaksanakan berbagai macam fungsi pengolahan data. *Generalized audit software* dikembangkan suatu kantor akuntan publik untuk dipakai pada berbagai audit atas klien maupun tahun audit yang berbeda. Pengembangan dan pemeliharaan *generalized audit software* memerlukan biaya yang tinggi.

Ada dua keuntungan penggunaan *generalized audit software*. *Pertama*, *generalized audit software* dikembangkan dengan cara semua staf auditor dilatih cepat untuk penggunaan program umum tersebut. *Kedua*, program umum tunggal diterapkan dalam lingkup tugas pengujian luas, tanpa menambah biaya membuat program individual.

GAS dapat diterapkan pada pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Contoh penggunaan GAS pada pengujian pengendalian adalah seperti perbandingan harga jual barang dagangan antara file faktur penjualan yang terkomputerisasi, dengan master file yang berisi data yang terotorisasi. Perbandingan ini disusun untuk menentukan frekuensi harga yang tak terototrisasi. GAS juga dapat diterapkan pada pengujian substantif. Contoh penggunaan GAS pada pengujian substantif adalah seperti pemilihan atau seleksi dan pencatatan sampel audit, menguji perhitungan dan membuat perhitungan.

J. Commercial General-Use Software

Commercial general-use software merupakan penggunaan perangkat lunak mudah dioperasikan dan relatif sederhana. Perangkat lunak ini mudah didapatkan dengan harga yang ringan. Contoh perangkat lunak komersial yang banyak dipakai adalah *electronic spreadsheet* atau pengolah angka, dan pengolah kata atau *word processors*. Contoh pengolah angka antara lain Lotus 123, Quarto Pro, Micosoft Excel, VisiCalc, SuperCalc, dan Multiplan. Contoh pengolah kata yang populer antara lain Word Star, Word Perfect, Micosoft Word, Perfect Writer, dan sebagainya.

Selain itu masih banyak perangkat lunak yang membantu auditor dalam melaksanakan tugasnya. Ada perangkat lunak statistik

yang dapat membantu auditor perhitungan auditor yang berkaitan erat dengan statistika. Ada perangkat lunak yang membantu auditor untuk membuat *flowchart*, seperti Flowcharting, Easyflow, dan ABC Flowcharting, ada pula perangkat lunak untuk membuat program seperti BASIC.

K. Audit Komputer

Audit IT merupakan proses kontrol pengujian infrastruktur teknologi informasi berhubungan masalah audit finansial dan audit internal. Audit IT dikenal istilah EDP Auditing (*Electronic Data Processing*), biasanya digunakan dalam penguraian jenis aktifitas komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebut adalah penjelasan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian-pengendalian internal dalam EDP. Jenis aktivitas ini disebutkan sebagai auditing komputer. Penggunaan istilah lainnya adalah menjelaskan manfaat komputer bagi auditor pada pelaksanaan kerjaan audit yang tidak dilakukan manual. Jenis ini disebut audit dengan computer (Agoes, 2017)

Audit IT sendiri merupakan gabungan atas berbagai macam ilmu, mencakup Traditional Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi, Ilmu Komputer, dan Behavioral Science. Audit IT bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (*availability*), kerahasiaan (*confidentiality*), dan keutuhan (*integrity*) dari sistem informasi organisasi.

1. Proses Audit Komputer

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor melakukan proses audit di lingkungan PDE mempunyai 4 tahapan audit sebagai berikut:

- a. Perencanaan Audit (*Audit Planning*). Tujuan perencanaan audit menentukan *why, how, when* dan *by whom* suatu audit dilaksanakan. Aktivasnya meliputi: penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, pengorganisasian tim audit, pemahaman operasi bisnis klien, pengkajian hasil audit sebelumnya (jika ada), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit, dan penetapan resiko dalam

lingkungan audit, misalkan bahwa *inherent risk*, *control risk* dan *detection risk* dalam sebuah *on-line processing*, *networks*, dan teknologi maju *database* lainnya akan lebih besar daripada sebuah sistem akuntansi manual.

- b. Penyiapan program audit (*Prepare audit program*). Yaitu: mengumpulkan bukti audit (*Collection of Audit Evidence*) meliputi: mengobservasi aktivitas operasional di lingkungan ED, mengkaji ulang sistem dokumentasi EDP, mendiskusikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan petugas berwenang, pengujian keberadaan dan kondisi fisik aktiva, konfirmasi melalui pihak ketiga, menilai kembali dan *re-performance* prosedur sistem EDP, *vouching* ke dokumen sumber, dan *analytical review* dan metode *sampling*.
- c. Evaluasi bukti (*Evaluation of Audit Evidence*). Auditor dengan bukti perolehan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), jika *inherent risk* dan *control risk* sangat tinggi, maka mendapatkan *reasonable assurance* yang lebih besar. Aktivitas evaluasi bukti yang diperoleh meliputi: menilai (*assess*) kualitas pengendalian internal EDP menilai reliabilitas informasi EDP, menilai kinerja operasional EDP, mempertimbangkan kembali kebutuhan adanya bukti tambahan, mempertimbangkan faktor resiko, mempertimbangkan tingkat materialitas, dan bagaimana perolehan bukti audit.
- d. Mengkomunikasikan hasil audit. Auditor menyiapkan temuan dan rekomendasi usulan pemeriksaan di dukung bukti dan kertas kerjanya. Setelah direkomendasikan dipantau apakah rekomendasinya itu ditindaklanjuti.

2. Survei Awal dalam Audit Komputer

Sebelum auditor menentukan sifat dan pengujian luas, auditor harus memahami bisnis *auditee* (kebijakan, struktur organisasi, dan praktik yang dilakukan). Setelah itu, di analisis risiko auditnya. Melalui *review* pengendalian intern. Dalam tahap ini, auditor juga mengidentifikasi aplikasi penting dan berusaha untuk memahami pengendalian terhadap transaksi yang diproses oleh aplikasi tersebut.

3. Program Audit dalam Audit Komputer

Audit TI berfokus menentukan risiko relevan dengan aset informasi, dan menilai kontrol pengurangan risiko dengan menerapkan kontrol, pengaruh risiko dapat diminimalkan, akan tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan semua risiko. Banyak metode audit dalam teknologi informasi. Memungkinkan adanya perbedaan. Beberapa metode tersebut berbeda karena disebabkan sebagai berikut:

- a. Otomatisasi, dengan pemrosesan data elektronik mulai dari input sampai *output* secara otomatis, bentuk penggunaan dan jumlah kertas minimal, bahkan seringkali tidak ada (*paperless office*) sehingga penelusuran dokumen (*tracing*) audit kurang dibanding sistem manual yang menggunakan dokumen dan kertas.
- b. Keterkaitan aktivitas terkait catatan-catatan yang kurang terjaga.
- c. Dengan sistem online mengakibatkan output seringkali tidak tercetak.
- d. "*Audit Around Computer*" yang mengabaikan sistem komputer tetapi yang dilihat atau yang diuji adalah *Input* dan *Output*.
- e. "*Audit Through Computer*" menggunakan bantuan komputer (atau *software*) untuk mengaudit.

Jika pelaksanaan audit sistem informasi berbasis komputer dilaksanakan secara konvensional pada lingkungan Pemrosesan Data Elektronik seperti halnya sistem manual, maka cenderung tidak menghasilkan hasil memuaskan, baik bagi klien ataupun auditor itu sendiri, bahkan tidak efisien dan terarah.

Untuk itu seringkali proses pengembangan sistem informasi akuntansi mengikut sertakan akuntan. Jika akuntan terlibat dalam desain sistem Pemrosesan Data Elektronik sebuah organisasi maka akan memudahkan pengendalian dan penelusuran audit ketika klien tersebut meminta untuk pekerjaan audit.

Ada 2 keuntungan jika seorang akuntan terlibat dalam di-sain sistem informasi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik, yaitu

- a. Meminimalisasi biaya modifikasi sistem setelah implementasi.
- b. Mengurangi pengujian selama proses audit.

L. Tahap-Tahap Audit Sistem Informasi

Menurut Arens (2014) Audit Sistem Informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam tahapan. Berikut 5 tahap audit:

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum auditor menentukan pengujian dan sifat yang harus dilakukan, auditor memahami bisnis *auditee* (kebijakan, struktur organisasi, dan praktik yang dilakukan). Setelah itu, menganalisis risiko audit. Meliputi *review* pengendalian intern. Pada tahap ini, auditor mengidentifikasi aplikasi penting dan berusaha memahami pengendalian transaksi yang diproses aplikasi.

2. Tahap Pemeriksaan Rinci

Pada tahap ini auditor mengupayakan untuk mendapat informasi mendalam atas pemahaman pengendalian sistem komputer klien. Auditor harus memperkirakan hasil audit yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai dasar menilai struktur pengendalian intern dipercaya atau tidak. Kuat ataupun tidaknya pengendalian tersebut menjadi dasar auditor menentukan langkah selanjutnya.

3. Tahap Pengujian Kesesuaian

Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan terinci mengenai saldo akun dan transaksi. Informasi yang digunakan dalam file data yang diambil dengan menggunakan *software* CAATs. Pendekatan basis ini menggunakan CAATs dan uji substantif untuk memeriksa integritas data. Dengan demikian, CAATs digunakan sebagai pengambilan data integritas dan keandalan.

4. Tahap Pengujian Kebenaran Bukti

Tujuan pengujian kebenaran bukti ialah memperoleh bukti kompeten. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan: mengidentifikasi kesalahan pemrosesan data, menilai kualitas data,

mengidentifikasi ketidakkonsistenan data, membandingkan data dengan perhitungan fisik, dan mengkonfirmasi data dari sumber luar perusahaan.

5. Tahap Penilaian Secara Umum atas Hasil Pengujian

Pada tahap ini auditor diharapkan telah menilai apakah bukti yang diperoleh dapat maupun tidak mendukung informasi. Hasil penilaian ini selanjutnya menjadi dasar auditor untuk menyiapkan pendapatnya dalam laporan auditan.

Meliputi struktur pengendalian intern perusahaan, mencakup, yaitu Pengendalian Aplikasi (*Application Control*) dan Pengendalian Umum (*General Control*). Tujuan pengendalian umum yakni sebagai penjamin integritas data dalam sistem komputer sekaligus meyakinkan aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan pemrosesan data. Sementara, tujuan pengendalian aplikasi tersebut yaitu memastikan data yang di-*input* benar, baik pemrosesannya, dan pengendalian yang memadai atas *output* yang dihasilkan.

M. Metodologi Audit IT

Dalam Audit bidang Teknologi Informasi terdapat beberapa metodologi antara lain:

1. COBIT. Dibuat oleh organisasi ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*) dan dikembangkan IT Governance Institute COBIT dapat membantu pengimplementasian sistem kontrol, namun pada metode ini tidak mengulas detail dan dianggap kurang *user friendly*.
2. BS 7799. Kebijakan dan prosedur untuk memilih kontrol memadai dalam mengelola pendekatan berbasis, olehnya dalam mendefinisikan 'resiko' dengan Evaluasi yang detail dan digunakan sebagai dokumentasi "*best practice*".
3. BSI-IT (*Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik*). Dibuat oleh German BSI (GISA: *German Information Security Agency*). Metode ini menggunakan evaluasi konsep manual & keamanan, metodologi evaluasi tidak dijelaskan namun digunakan (*user friendly*) dan sangat detail. Sehingga metodologi ini

kurang cocok untuk menganalisa resiko. Dan metode ini tidak terdapat grafik dalam representasinya.

4. ITSEC (*IT Security Evaluation Criteria*). Dikembangkan oleh negara-negara seperti berikut UK, Jerman, Perancis, Belanda. Merupakan metode yang sistematis untuk evaluasi keamanan produk dan sistem.
5. *Common Criteria* (CC) Dikembangkan oleh USA dengan menggunakan standart internasional ISO. Metode ini memiliki jaminan fungsionalitas terpercaya dan digunakan untuk audit keamanan sistem.

ISTILAH-ISTILAH PENTING

- *Electronic Data Processing (EDP)*
- Kelebihan dan Kekurangan EDP
- *Software dan Hardware Computer*
- *Auditing Through The Computer*
- *Test Data Approach*
- *Parallel Simulation Approach*
- *Integrated Test Facility Approach*
- *Auditing Around The Computer*
- *Generalized Audit Software*
- *Commercial General-Use Software*
- Perbedaan Auditing EDP dan Konvensional
- Audit Sistem Informasi
- Metodologi Audit IT

CONTOH SOAL

1. Apakah definisi dari Auditing EDP dan Jelaskan bagaimana proses dari Auditing EDP!
2. Sebutkan manfaat dan tujuan dari adanya system pengolahan data elektronik!
3. Jelaskan perbedaan metodologi antara Auditing EDP dengan Auditing Konvensional!
4. Apakah Audit IT itu ? dan ada berpakah tahapan dari proses Audit IT? Jelaskan secara lengkap!
5. Hal-Hal apasajakah yang menyebabkan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dianjurkan untuk dilakukan? dan Bagaimanakah tahapan-tahapan dalam melaksanakan TABK? Jelaskan!

Daftar Pustaka

- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2014. *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2017. *Buku 1 Praktikum Audit* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing* Edisi 3 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- AICPA. 2002. *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit*. New York: AICPA.
- Albrecht, W.S. and Albercht, C.O. 2011. *Fraud Examination*. Thomson South- Western.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* Jilid 1 Edisi Kedua belas. Jakarta. Erlangga.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., dan Beasly, Mark S. 2014 *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach*, 9th Edition. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Belkaoui, A.R. 2012. *Accounting Theory*. Thomson Learning. London.
- Bertens, K. 2000. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Boynton. Raymond and Kell. 2006. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh. Erlangga: Jakarta.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). 1980. *Statement of Financial Accounting Concepts No.2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Stamford: Connecticut
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1 Edisi Keempat*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Halim, Abdul. 2018. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan Jilid 1*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institute of Internal Auditors, 2004. *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. The IIA Research Foundation, Maitland avenue Almonte Spring.
- Konrath, Laweey F. 2002. *Auditing Concepts and Applications, A Risk-Analysis Approach*, 5th Edition. West Publishing Company.
- Mardi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Mautz, R. K dan Sharaf, H. A. 1977. *The Philosophy of Auditing*. America: American of Accounting Assoc.
- Mulyadi. 2002. *Auditing buku 1 Jilid 3 Edisi keenam*. Jakarta: Salemba Empat
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media

- Rahmatika, Dien Noviany. 2020. *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Randol J. ELDER. 2011. *Audit Dan Jasa Assurance Jilid 2* , Jakarta: Erlangga
- Rezaee & Riley, Richard. 2010. *Prevention and Detection*. Canada
- Singleton, Tommie W and Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*. Fourth Edition. United State of America. Wiley Corporate F&A.
- Tunggal, Amin Widjaja 2012. *Internal Auditing*, Edisi Lima. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang No 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Undang-Undang No 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
- Laporan Keuangan Bank Mega tahun 2017.
- Weirich, Thomas R., Pearson, Thomas C., Churyk, Natalie T. 2010. *Accounting & Auditing Research: Tools & Strategies*, Seventh Edition. John Willey & Sons, Inc,
- William C. 2003. *Modern Auditing* Edisi 5. New York: John Willey and Sons Inc.
- Www.idx.co.id, diakses tanggal 28 November 2019.

Profil Penulis



Dr. Dien Noviany Rahmatika., SE., MM., Ak., CA

Lahir di Brebes, 28 November 1975. Menamatkan S-1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro tahun 1997, dan S2 pada Program Magister Manajemen di dua konsentrasi Keuangan dan Perdagangan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2000. Pendidikan doktor diselesaikan pada proram Doktoral Ilmu Akuntansi Universitas Padjajaran tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Aktif di Ikatan Akuntan Indonesia, dan menjadi Peer Review di beberapa jurnal nasional dan internasional. Buku yang pernah diterbitkan adalah *Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah* dan *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris*.



Eva Anggra Yunita SE., M.Acc., Ak

Lahir di Tegal, 7 Juni 1990. Pekerjaan sebagai dosen tetap prodi Akuntansi di FEB Universitas Pancasakti Tegal. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di FEB UNS pada tahun 2013, kemudian melanjutkan program gelar ganda (*double degree*) Master of Accounting konsentrasi Auditing dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) di UGM selesai pada tahun 2015. Pengalaman penulis sebelum menjadi dosen adalah pernah menjadi junior auditor di KAP BIG 4 Ernest&Young (EY). Penulis juga sempat dan tengah melakukan aktivitas konsultasi terkait bidang akuntansi di beberapa UMKM kabupaten Tegal.



Globalisasi dunia bisnis telah banyak menembus batas-batas wilayah. Seiring dengan perkembangan bisnis, masalah dan praktek kecurangan atau fraud terutama masalah keuangan menjadi hal utama yang perlu dilakukan pengawasan atau monitoring atas sebuah perusahaan. Manajemen perusahaan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan menyampaikannya kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kegiatan evaluasi atas kinerja keuangan dari manajemen perusahaan dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan pihak eksternal yang independen yaitu Auditor.

Auditor mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan yang tertuang dalam laporan keuangan berdasarkan bukti temuan. Buku ini memberikan pengetahuan dan bekal bagaimana menjadi auditor yang baik dan beretika. Pemahaman konsep fundamental dalam audit umumnya berkenaan dengan penentuan sifat dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan, sebagai dasar memadai untuk memberikan opini audit.

Buku ini dilengkapi dengan kasus dan contoh sederhana untuk memberikan gambaran tentang bagaimana cara kerja auditor dalam memberikan audit yang berkualitas dan juga memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai auditing untuk dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Buku ini disusun secara konseptual melalui setiap judul di dalamnya. Sasaran pembaca akademis adalah para mahasiswa dan juga sesama pengajar di bidang akuntansi, manajemen dan auditing.

Diterbitkan Oleh:


tanah air
Beta

Jl. Jogja-Wates Km. 10, Dsh. Pedes RT 04
Argomulyo, Sedayu, Bantul
DI Yogyakarta 55753
T: (0274) 6498157

NON FIKSI/UMUM

ISBN 978-623-92876-8-9

